



**KEMENPORA**

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARHAGA  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN**

**KINERJA**

**SEKRETARIAT**

**2025**



BERGERAK, BERSATU, BERPRESTASI



Gambar 1.1 Foto Seskemenpora

## KATA PENGANTAR SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 disusun sebagai wujud implementasi SAKIP dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat Kemenpora dalam mendukung pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional. Pelaksanaan kinerja tahun 2025 selaras dengan RKP 2025 dan RPJMN 2025–2029, khususnya penguatan SDM unggul, peningkatan kualitas pemuda, partisipasi olahraga, dan tata kelola birokrasi. Sekretariat Kemenpora

berperan strategis dalam mendukung tata kelola internal melalui layanan manajerial, administratif, serta fasilitasi kebijakan agar program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Berbagai penguatan dilakukan melalui perencanaan berbasis kinerja, transformasi digital, peningkatan layanan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan peningkatan kinerja ke depan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, disertai apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi.

Dalam rangka mewujudkan Renstra 2025–2029, Kemenpora terus mengawal SAKIP untuk meningkatkan nilai B sebagai koridor akuntabilitas kinerja. Kinerja organisasi juga diperkuat melalui capaian Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,67, Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,35, serta predikat Keterbukaan Informasi Publik kategori “Informatif” dengan nilai 98,57. Pada aspek legislasi dan hukum, Indeks Reformasi Hukum mencapai 99,40, meningkat dari 86,8 pada tahun 2024. Sementara itu, dukungan digitalisasi ditunjukkan melalui Indeks SPBE sebesar 3,75, mencerminkan penerapan tata kelola pemerintahan digital yang semakin efektif.

Kemenpora juga terus mendulang apresiasi dari berbagai pihak sepanjang tahun 2025, di antaranya: 1). Kemenpora berhasil meraih dua penghargaan bergengsi di Government Social Media (GSM) Award 2025; 2). Menjadi tuan rumah dan peserta aktif di Indonesia Sports Summit (ISS) 2025; 3). SEA Games 2025 di

Thailand dengan target medali emas dan posisi tiga besar.; 4). Kemenpora RI meraih Juara I Kategori Utilisasi BMN Terbaik pada Anugerah Reksa Bandha 2025;

Capaian yang diraih tetap menyisakan tantangan yang memerlukan perbaikan dan inovasi berkelanjutan seiring meningkatnya tuntutan kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat. Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja dan penggunaan APBN, sekaligus menegaskan komitmen transformasi pembangunan, khususnya penguatan SDM unggul melalui pendidikan, digitalisasi, infrastruktur, reformasi ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,



Dr. Gunawan Suswantoro

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu birokrasi yang mampu menciptakan sistem birokrasi yang dinamis, *agile*, profesional dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upayanya mewujudkan Reformasi Birokrasi yang adaptif dan bersaing global, serta dalam meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan telah melakukan reformulasi sasaran program untuk meningkatkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Dalam agenda peningkatan tata kelola tersebut telah ditetapkan sasaran pada unit kerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu: 1) Meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel. Sesuai Rencana Kerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga 2024, terdapat 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Program yang ditetapkan dan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 130 Tahun 2023 ada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan yaitu : 1) Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran; 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3) Indeks SPBE; 4) Indeks Kepuasan Masyarakat; 5) Indeks Maturitas SPIP Terintegrasi; dan 6) Indeks Kualitas Pengelolaan Aset Kemenpora.

Sekretariat Kemenpora terus meningkatkan kerja-kerja dalam menyelenggarakan tata kelola birokrasi untuk melayani publik. Dalam pelaksanaannya, publik memberikan berbagai apresiasi atas kecepatan, kemudahan dan kualitas layanan baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2025, kinerja Sekretariat secara keseluruhan dapat dicapai dengan kriteria “Sangat Baik” mencapai 103.50 % dengan realisasi anggaran mencapai 91,83% .

## CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENPORA YANG BERDAMPAK PADA KEDIGDAYAAN BANGSA

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan beberapa prestasi dan penghargaan yang menggambarkan kinerja di berbagai tugas dan fungsi pada program dukungan manajemen diantaranya :

### 1. Moto GP Mandalika 2025

Penyelenggaraan Moto GP edisi 2025 mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi dan eksposur yang signifikan:

Jumlah Penonton : Mencapai 120.000+ penonton (termasuk wisatawan mancanegara), meningkat 15% dari tahun sebelumnya.



Gambar 1.2 Foto Pelaksanaan Moto GP Mandalika 2025

**Dampak Ekonomi :**  
Estimasi nilai ekonomi nasional mencapai Rp4,8 Triliun melalui sektor akomodasi, transportasi, dan UMKM.

**Global Reach :**  
Disiarkan ke lebih dari 200 negara, memperkuat *brand* Indonesia sebagai destinasi olahraga dunia.

**Global Impact :** Menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat *sport tourism* dunia. Keberhasilan menyelenggarakan ajang balap motor paling bergengsi ini membuktikan kesiapan infrastruktur dan profesionalisme manajerial bangsa dalam skala global.

### 2. ASEAN School Games 2025

Indonesia berhasil menjadi juara umum dalam *14th ASEAN School Games* 2025 di Brunei Darussalam.

Kontingen Indonesia mengumpulkan 93 medali dari tujuh cabang olahraga, yang terdiri dari 42 medali emas, 30 medali perak, dan 20 medali perunggu.

Kejayaan di level pelajar menjadi indikator keberhasilan regenerasi atlet nasional, dengan capaian kinerja:

- a. Juara Umum: Indonesia sukses meraih predikat Juara Umum dengan perolehan 45 Medali Emas.
- b. Pemecahan Rekor: Terjadi 8 pemecahan rekor baru ASG oleh atlet pelajar Indonesia pada cabang renang dan atletik.
- c. Partisipasi: Melibatkan 250 atlet pelajar dari 38 provinsi sebagai bentuk pemerataan pembinaan olahraga.



Gambar 1.3 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan ASEAN School Games 2025

Impact: Investasi pada "Akar Rumput" (*grassroots*). Kesuksesan di ASG membuktikan bahwa Indonesia memiliki cadangan talenta muda yang melimpah dan kompetitif, menjamin keberlanjutan kejayaan bangsa di masa depan.

### 3. SEA Games Thailand 2025

Indonesia kembali menorehkan sejarah di ajang olahraga Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir, Merah Putih sukses finis sebagai *runner-up* SEA Games, menyamai pencapaian bersejarah pada SEA Games 1995 Chiang Mai, Thailand.

Pada SEA Games 2025 Thailand yang berlangsung pada 9–20 Desember 2025, kontingen Indonesia tampil impresif dengan mengoleksi 91 medali emas, 111 perak, dan 131 perunggu, atau total 333 medali, mengantarkan Indonesia menempati peringkat kedua klasemen akhir.



Gambar 1.4 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan SEA Games 2025

Capaian ini menjadi raihan emas terbanyak Indonesia sepanjang keikutsertaan SEA Games di luar negeri setelah edisi 1989 Kuala Lumpur (102 emas) dan 1991 Manila (92 emas).

Prestasi tersebut juga menunjukkan peningkatan signifikan dibanding SEA Games 2023 Kamboja, di mana Indonesia meraih 87 emas, 80 perak, dan 109 perunggu.

Bonus penghargaan Rp1 miliar bagi atlet peraih medali emas, tertinggi sepanjang sejarah penghargaan SEA Games oleh pemerintah Indonesia. Nilai tersebut naik dua kali lipat dibanding SEA Games 2023 Kamboja yang sebesar Rp500 juta.

Penyaluran bonus dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) berdasarkan Keputusan Menpora RI Nomor 219 Tahun 2025. Untuk atlet perorangan, bonus diberikan sebesar Rp1 miliar (emas), Rp315 juta (perak), dan Rp157,5 juta (perunggu). Atlet ganda menerima Rp800 juta (emas), Rp252 juta (perak), dan Rp126 juta (perunggu), sementara atlet beregu memperoleh Rp500 juta (emas), Rp220,5 juta (perak), dan Rp110,25 juta (perunggu).

#### 4. World Artistic Gymnastics & Asian Fencing Championships 2025

Pencapaian pada cabang olahraga spesifik menunjukkan diversifikasi prestasi:



Gambar 1.5 Foto Sesmenpora (paling tengah) saat Pers Konferensi FIG Artistic Gymnastic World Championships 2025



Gambar 1.6 Foto Atlet Indonesia (kanan) melawan Atlet Korea saat Pelaksanaan Asian Fencing Championships 2025

- **Senam Artistik:** Indonesia berhasil menempatkan **2 atlet dalam babak Final (Top 8 Dunia)** pada alat spesifik, sebuah sejarah baru bagi senam Indonesia di level kejuaraan dunia.
- **Anggar Asia:** Meraih **1 Medali Perak dan 2 Perunggu** di tingkat Asia, meningkatkan peringkat dunia (FIE Ranking) atlet Indonesia secara signifikan ke posisi **30 besar dunia**.

Dampak : Penetrasi pada cabang olahraga elit global. Kehadiran dan prestasi atlet Indonesia di kejuaraan dunia senam artistik membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di cabang olahraga dengan tingkat kesulitan dan prestise teknis yang tinggi. Di cabang olahraga anggar ini semakin memperluas jangkauan prestasi Indonesia pada cabang olahraga individu yang kompetitif di tingkat kontinental.

## PENGHARGAAN/*AWARD* KEMENPORA

### 1. ANUGERAH REKSA BANDHA

Pada ajang Anugerah Reksa Bandha 2025, Kemenpora RI berhasil meraih Juara I Kategori Utilisasi BMN Terbaik. Prestasi ini merupakan bukti nyata dari komitmen Kemenpora RI dalam memperkuat tata kelola aset negara.



Gambar 1.7 Foto Kepala Biro Keuangan dan Umum (tengah) pada saat menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2025

Meraih Juara I Kategori Utilisasi BMN Terbaik pada Anugerah Reksa Bandha 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pencapaian tahun sebelumnya, melanjutkan tren positif pengelolaan aset yang sudah dimulai sejak 2023. Kemenpora dinilai unggul dalam beberapa komponen krusial, antara lain:

- 1) Penetapan Status Penggunaan BMN.
- 2) Pengelolaan BMN Terindikasi Idle dan Optimalisasi Aset.
- 3) Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Non-Tusi.
- 4) Asuransi BMN sebagai bentuk pengamanan aset.

### Dampak Bagi Organisasi

Penghargaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan indikator bahwa Kemenpora telah berhasil menjalankan prinsip efektivitas dan akuntabilitas publik. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset, kementerian berkontribusi langsung pada efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara melalui PNBP. Barang Milik Negara yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel.

## 2. Government Social Media Summit (GSM Award)

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mencatatkan capaian kinerja di bidang komunikasi publik melalui perolehan penghargaan pada ajang Government Social Media Summit (GSMS) Award 2025. Dalam ajang tersebut, Kemenpora berhasil meraih predikat Pemenang Best Use of Image (Kategori Kementerian) serta Top 3 Best Account (Kategori Kementerian). Capaian ini menjadi bentuk pengakuan eksternal terhadap kualitas pengelolaan media sosial kementerian dalam mendukung penyampaian informasi publik yang efektif, kredibel, dan selaras dengan dinamika komunikasi digital.



Gambar 1.8 Penghargaan GSM Award

Keberhasilan ini mencerminkan kemampuan Kemenpora dalam memanfaatkan media sosial sebagai instrumen strategis komunikasi kebijakan, program, serta nilai kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat luas. Pengelolaan konten visual yang konsisten, informatif, dan berorientasi pada pesan kebijakan menunjukkan bahwa komunikasi publik tidak hanya berfokus pada aspek estetika, tetapi juga pada kejelasan substansi dan konteks informasi yang disampaikan. Selain itu, capaian Top 3 Best Account menegaskan bahwa akun resmi media sosial Kemenpora dikelola secara profesional dan berkelanjutan, dengan perencanaan konten yang terstruktur, responsivitas terhadap isu strategis, serta kemampuan membangun interaksi dan kepercayaan publik.

## Badan Kepegawaian Negara Award (BKN Award)



Gambar 1.9 Penghargaan BKN Award

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memperoleh **penghargaan BKN Awards** sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang **akuntabel, profesional, dan berbasis sistem merit**. Penghargaan ini

mencerminkan komitmen Kemenpora dalam memperkuat tata kelola SDM aparatur yang selaras dengan reformasi birokrasi nasional.

Capaian Kemenpora dalam ajang **BKN Awards** antara lain meliputi :

### 1. Kategori Implementasi Sistem Merit Terbaik

Penghargaan ini diberikan atas konsistensi Kemenpora dalam menerapkan prinsip sistem merit pada seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengembangan kompetensi, hingga manajemen talenta.

### 2. Kategori Pengelolaan Data Kepegawaian Terbaik

Kemenpora dinilai berhasil mengelola data kepegawaian yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem informasi kepegawaian nasional secara optimal.

### 3. Kategori Penilaian Kinerja ASN Terbaik

Penghargaan ini menunjukkan keberhasilan Kemenpora dalam mengimplementasikan manajemen kinerja ASN yang terukur, berbasis indikator kinerja, serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

### 4. Kategori Pengembangan Kompetensi ASN

Kemenpora memperoleh apresiasi atas upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan, pembelajaran digital, dan pengembangan karier berbasis kebutuhan organisasi.

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 - 2025

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Program

No.	Indikator Kinerja Program	2021	2022	2023	2024	2025	Target 2025	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora	69,77	69,80	68,88	80,35	80,35	80,40	99,9%
2.	Nilai SAKIP Kemenpora	67.93	67.03	67.73	68,08	68,08	70	97,3%
3.	Nilai PM SAKIP Sekretariat Kemenpora	79,75	74,47	80,45	82	74.39	75	99.2%
4.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,48	3,32	3,35	3,75	3,75	3,75	100%
5.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora	75,94	80,76	95,8	99,41	98,57	99,41	99.2
6.	Indeks Sistem Merit	269,5	269,5	293,5	293,5	293,5	295	99.5%
7.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	-	-	100%	100	100	100	100%
8.	Indeks Pelayanan Publik	3,76	3,85	3,77	4,31	4,67	4,32	108.01%
9.	Indeks Reformasi Hukum	-	66,35	67,82	86,8	99,40	87	114.25%
10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora	82,91	80,68	80,08	90,15	92.19	90,15	102.26%

11.	Indeks Pengelolaan Aset	2,43	2,57	2,65	3,51	3,75	3,1	120%
12.	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	63,15	67,74	69,18	77,78	87,19	72	101%
13.	Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora	89,97	88,24	80,77	90,06	91	90,06	101%
14.	Persentase Opini Positif Media terhadap pemberitaan Kemenpora	-	-	-	-	92,6%	91%	101,8%
15.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	-	-	90,23	87,15	91,27	87,5	104,3%
16.	Indeks Pembangunan Statistik	-	-	-	-	2,69	2,69	100%
17.	Indeks BerAkhlaq	-	-	1,95	63,2	62,9	63	99,9%

## PROFIL PEJABAT

GUNAWAN SUSWANTORO

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Gambar 1.10 Foto Sekretaris  
Kementerian Pemuda dan  
Olahraga



### RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN:

- DIKLAT ADUMLA ANGGKATAN XX DEPDAGRI (1998)
- DIKLATPIM TK. III DEPDAGRI (2005)
- DIKLATPIM TK. II ANGGKATAN XXX LAN-RI (2011)
- DIKLATPIM TK. I ANGGKATAN XXIV LAN-RI (2012)
- PPSA XXIII LEMHANNAS RI (2021)

### RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL:

- STAF BIRO HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI (1993-2000)
- PJ. KEPALA SUB BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II, PUSAT KAJIAN HUKUM, DEPARTEMEN DALAM NEGERI (2000-2001)
- KEPALA SUB BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMENTASI PUSAT KAJIAN HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI (2001-2002)
- KEPALA SEKSI BIMBINGAN POLISI PAMONG PRAJA DITJEN PEM. UMUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI (2002-2004)
- KEPALA SEKSI FASILITAS KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH WIL. II, DITJEN PUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI (2004-2006)
- KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI (2006-2008)
- KASUBDIT PEMBAURAN & KEWARGANEGARAAN, DIT. PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI (2008-2009)
- KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU (2009-2013)
- SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILU (2013-2022)
- SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (2022-SEKARANG)

LHKPN :

LHKPN 2023

LHKPN 2024

## DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENPORA YANG BERDAMPAK PADA KEDIGDAYAAN BANGSA.....	v
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM.....	xi
PROFIL PEJABAT .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Struktur Organisasi.....	3
C. Ruang Lingkup, Tugas dan Fungsi .....	4
D. Fungsi Sesuai Permenpora 1 Tahun 2025 .....	4
E. Jumlah Unit Organisasi.....	4
F. Sumber Daya Manusia.....	6
G. Aspek Strategis.....	8
H. Sistematika Penyajian.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis Sekretariat 2025-2029 .....	13
B. Informasi Kinerja .....	14
C. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.....	18
D. Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahun 2025 .....	21
E. Postur Anggaran.....	30
F. Pengukuran Kinerja Sekretariat Tahun 2025.....	34
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>36</b>
3.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi.....	37
3.1.2 Nilai SAKIP Kemenpora.....	50
3.1.3 Nilai PM SAKIP Sekretariat Kemenpora .....	58
3.1.4 Indeks SPBE .....	64

3.1.5 Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	72
3.1.6 Indeks Sistem Merit.....	77
3.1.7 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi .....	85
3.1.8 Indeks Pelayanan Publik .....	92
3.1.9 Indeks Reformasi Hukum .....	101
3.1.10 Indikator Pelaksanaan Anggaran Kemenpora .....	106
3.1.11 Indeks Pengelolaan Aset .....	111
3.1.12 Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK .....	115
3.1.13 Survey Kepuasan Masyarakat .....	118
3.1.14 Persentase Opini Positif Media Terhadap Pemberitaan Kemenpora .....	124
3.1.15 Indeks Perencanaan Pembangunan .....	127
3.1.16 Indeks Pembangunan Statistik .....	133
3.1.17 Indeks BerAKHLAK .....	143
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
4.1 Kesimpulan .....	148
4.2 Kendala dan Tantangan .....	148
4.3 Rekomendasi Kebijakan dan Upaya Perbaikan.....	149

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Program .....	xi
Tabel 1.2 Tugas Organisasi pada Eselon 2 Sekretariat Kemenpora Tahun 2025 .....	5
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai pada Sekretariat Kemenpora Tahun 2025 .....	6
Tabel 2.1 Sasaran Program Sekretariat Kemenpora Tahun 2025 .....	18
Tabel 2.2 Output Program Sekretariat Kemenpora Tahun 2025 .....	19
Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data Sekretariat Kemenpora 2025.....	23
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Kemenpora 2025.....	25
Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Humas Protokol Sekretariat Kemenpora 2025.....	26
Tabel 2.6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro SDMO Sekretariat Kemenpora 2025 .....	27
Tabel 2.7 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Hukum dan Kerjasama Sekretariat Kemenpora 2025.....	28
Tabel 2.8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Inspektorat Kemenpora 2025.....	29
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Sekretariat Kemenpora TA 2025.....	33
Tabel 3.1 Indeks RB Kemenpora Tahun 2023-2024.....	40
Tabel 3.2 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dalam Indeks Reformasi .....	48
Tabel 3.3 Perkembangan Nilai SAKIP Kemenpora .....	51
Tabel 3.4 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan dan Nilai SAKIP Kemenpora .....	55
Tabel 3.5 Perbandingan Nilai SAKIP Kemenpora dengan KL lain .....	56
Tabel 3.6 Nilai PM SAKIP Sekretariat Kemenpora .....	59
Tabel 3.7 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Nilai.....	61
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Hasil Evaluasi AKIP .....	62

Tabel 3.9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data Sekretariat Kemenpora 2025 .....	69
Tabel 3.10 Nilai Rata-rata Indeks SPBE Kemenpora.....	70
Tabel 3.11 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora .....	75
Tabel 3.12 Analisis Perbandingan Skor IKIP .....	76
Tabel 3.13 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Indeks Sistem Merit Kemenpora .....	84
Tabel 3.14 Struktur jabatan Kemenpora sebelum dan setelah pelaksanaan PSO .....	87
Tabel 3.15 Nilai dan Kategori Indeks Pelayanan Publik .....	94
Tabel 3.16 Capaian Indeks Pelayanan Publik 2020-2025 .....	95
Tabel 3.17 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022-2025.....	96
Tabel 3.18 Hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri 2025 .....	97
Tabel 3.19 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada Indeks Pelayanan Publik Kemenpora .....	199
Tabel 3.20 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada Indeks Reformasi Hukum Kemenpora.....	104
Tabel 3.21 Analisis Perbandingan Skor IRH .....	104
Tabel 3.22 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora .....	109
Tabel 3.23 Analisis Nilai IKPA.....	109
Tabel 3.24 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada Indeks Pengelolaan Aset Kemenpora .....	113
Tabel 3.25 Tindak Lanjut Rekomendasi APIP/BPK RI yang Ditindaklanjuti ...	116
Tabel 3.26 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Tingkat Survey Kepuasan Kemenpora .....	123
Tabel 3.27 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Persentase Opini Positif Media Terhadap Kemenpora .....	127
Tabel 3.28 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Kemenpora .....	132



Tabel 3.29 Penilaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan EPPS .....	135
Tabel 3.30 Hasil Penilaian EPPS untuk Indeks Pembangunan Statistik Kemenpora .....	135
Tabel 3.31 Hasil Penilaian EPPS untuk Indeks Pembangunan Statistik Kemenpora masing-masing aspek domain.....	135
Tabel 3.32 Alokasi anggaran IPS Tahun 2025.....	140
Tabel 3.33 Data IPS Nasional Tahun 2025 .....	140

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Foto Seskemenpora .....	ii
Gambar 1.2 Foto Pelaksanaan Moto GP Mandalika 2025.....	v
Gambar 1.3 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan ASEAN <i>School Games</i> 2025.....	vi
Gambar 1.4 Foto Tim Indonesia saat Pelaksanaan SEA <i>Games</i> 2025.....	vi
Gambar 1.5 Foto Sesmenpora (paling tengah) saat Pers Konferensi FIG <i>Artistic Gymnastic World Championships</i> 2025 .....	vii
Gambar 1.6 Foto Atlet Indonesia (kanan) melawan Atlet Korea saat Pelaksanaan <i>Asian Fencing Championships</i> 2025 .....	vii
Gambar 1.7 Foto Kepala Biro Keuangan dan Umum (tengah) pada saat menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2025.....	viii
Gambar 1.8 Penghargaan GSM Award.....	ix
Gambar 1.9 Penghargaan BKN Award .....	x
Gambar 1.10 Foto Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.....	xiii
Gambar 1.11 Infografis Pelaporan Kinerja .....	2
Gambar 1.12 Infografis Peraturan terkait Penyusunan LKJ Kemenpora.....	3
Gambar 1.13 Bagan Struktur Organisasi Kemenpora.....	3
Gambar 1.14 Bagan Ruang Lingkup, Tugas dan Fungsi Kemenpora .....	4
Gambar 1.15 Infografis Permenpora 1 Tahun 2025 .....	4
Gambar 1.16 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin .....	6
Gambar 1.17 Infografis Program Prioritas Kemenpora Tahun 2025-2029.....	8
Gambar 2.1 Infografis Visi Misi Kemenpora .....	14
Gambar 2.2 Pohon Kinerja Sekretariat Kemenpora 2025-2029.....	17
Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenpora 2025 .....	22
Gambar 2.4 Perjalanan Pagu Sekretariat Kemenpora TA 2025 .....	32
Gambar 2.5 Tabel Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator Kinerja Sekretariat Kemenpora TA 2021-2025.....	35

Gambar 3.1 Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 2023-2025.....	37
Gambar 3.2 Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan RPJMN 2025-2029 .....	38
Gambar 3.3 Agenda Reformasi Birokrasi Tematik.....	39
Gambar 3.4 Dampak ekonomi event olahraga.....	43
Gambar 3.5 Nilai SAKIP Kemenpora.....	50
Gambar 3.6 Nilai PM SAKIP SEKRETARIAT Kemenpora.....	58
Gambar 3.7 Indeks SPBE Kemenpora.....	64
Gambar 3.8 Capaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik .....	72
Gambar 3.9 Capaian Kinerja Indikator Indeks Sistem Merit .....	77
Gambar 3.10 Gambar Penyerahan Piagam Penghargaan.....	79
Gambar 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi .....	85
Gambar 3.12 Rumus Perhitungan PSO.....	86
Gambar 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik .....	92
Gambar 3.14 Aspek dan Prinsip Evaluasi PEKPPP.....	93
Gambar 3.15 Alur Proses Perolehan Indeks Pelayanan Publik.....	94
Gambar 3.16 Persentase Realisasi Anggaran dan Kinerja.....	99
Gambar 3.17 Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Hukum .....	101
Gambar 3.18 Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kemenpora.....	106
Gambar 3.19 Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Aset.....	111
Gambar 3.20 Foto Pengharhaan Reksa Bandha.....	114
Gambar 3.21 Capaian Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK .....	115
Gambar 3.22 Capaian Kinerja Indikator Survey Kepuasan Masyarakat .....	118
Gambar 3.23 Unsur penilaian SKM .....	119
Gambar 3.24 Capaian Kinerja Indikator Persentase Opini Positif Media terhadap Pemberitaan Kemenpora .....	124
Gambar 3.25 Capaian Kinerja Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan.....	127
Gambar 3.26 Formulasi Perhitungan Persentase Opini Positif Media	

terhadap Pemberitaan Kemenpora.....	128
Gambar 3.27 Capaian Kinerja Indkator Indeks Pembangunan Statistik.....	133
Gambar 3.28 Foto-foto Rapat terkait Pembahasan Indeks Pembangunan Statistik tahun 2025.....	137
Gambar 3.29 Tampilan Portal Satu Data Pemuda dan Olahraga.....	138
Gambar 3.30 Laporan IPP dan IPO 2025.....	139
Gambar 3.31 Perolehan Skor ODIN 74.....	141
Gambar 3.32 Capaian Kinerja Indikator Indeks BerAkhlak.....	143

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK .....	7
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan.....	7
Grafik 2.1 Postur Anggaran Sekretariat Kemenpora 2025.....	30
Grafik 2.2 Alokasi Anggaran Sekretariat Kemenpora TA 2021-2025.....	33
Grafik 3.1 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2024 ...	39
Grafik 3.2 Capaian Indeks Pelayanan Publik 2020-2025 .....	95
Grafik 3.3 Data IKM Eselon 1 Kemenpora.....	120
Grafik 3.4 Perbandingan Skor IKM Kemenpora 2021-2025.....	120
Grafik 3.5 Tren Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Tahun 2021–2025.....	129
Grafik 3.6 Capaian perdomain pada IPS Kemenpora 2023-2025.....	136



# LAPORAN KINERJA 2025

## SEKRETARIAT KEMENPORA

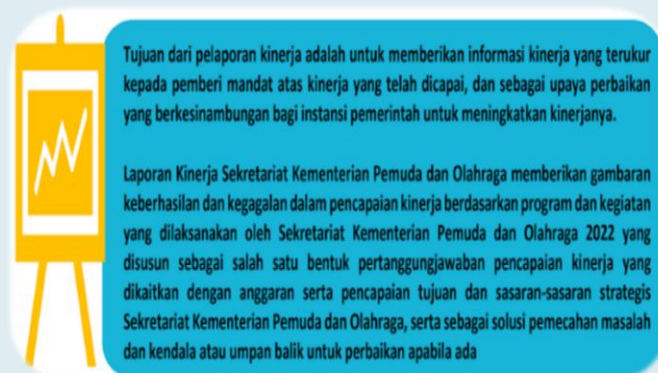


# BAB 1

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga akan terus berupaya menggerakkan roda birokrasi dalam mendukung meningkatkan pelayanan publik dalam mewujudkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Sekretariat maupun Kementerian. Rangkaian program dan kegiatan tahun 2025 masih berfokus pada pelayanan publik, keterbukaan informasi publik serta penerapan teknologi agar berjalan efektif, efisien, lincah dan tepat sasaran yang



Gambar 1.11 Infografis Pelaporan Kinerja

tentunya akan berdampak bagi organisasi maupun masyarakat luas.

Dalam pelaksanaan tugas ini diperlukan langkah untuk mewujudkan hal tersebut dan dapat

dipertanggungjawabkan secara akuntabel sesuai dengan

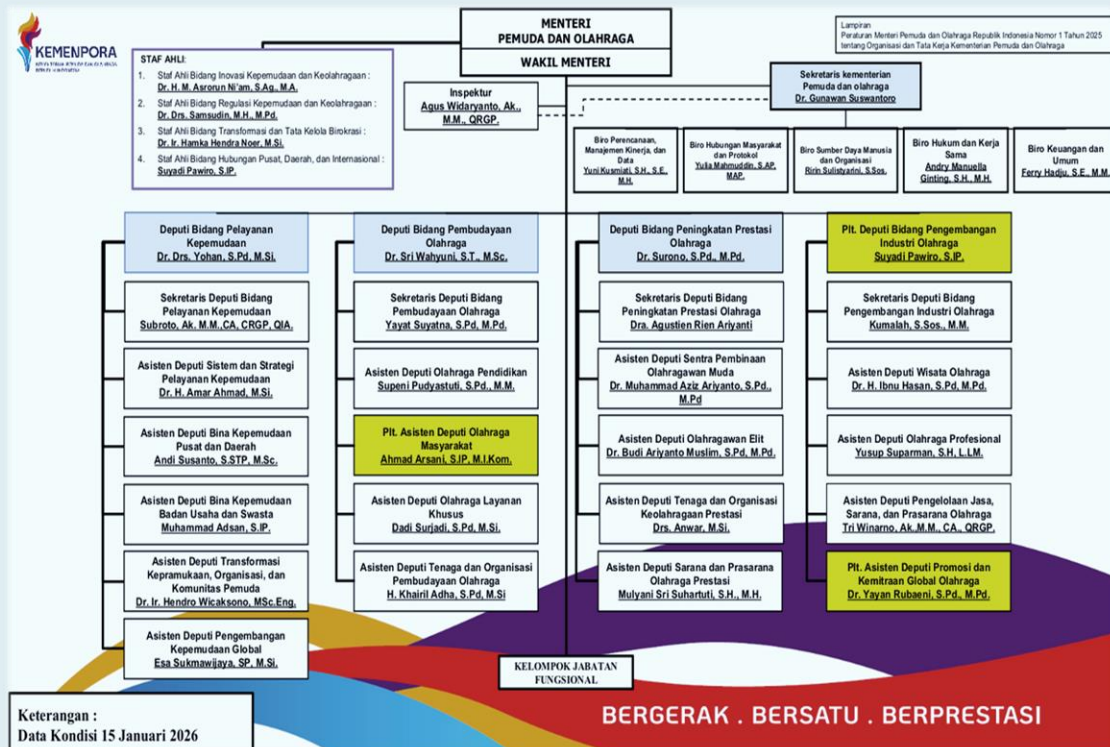
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. SRUKTUR ORGANISASI



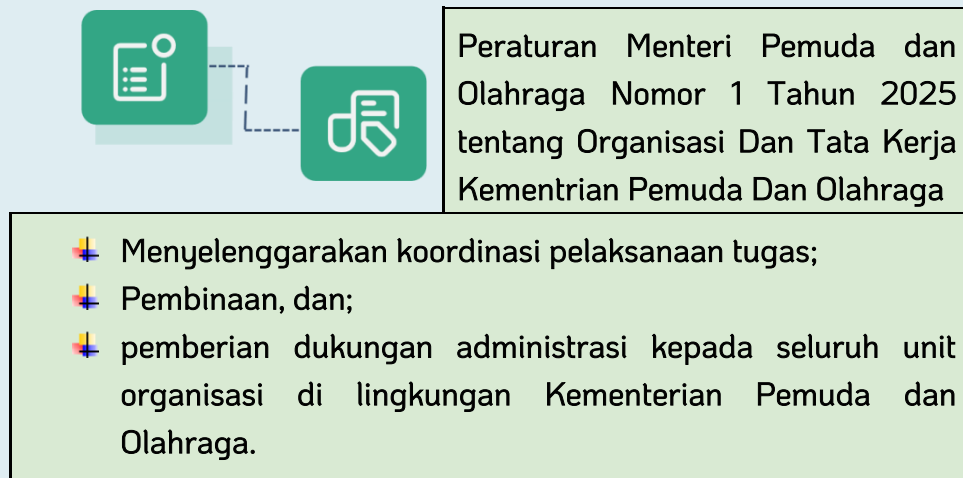
Gambar 1.12 Infografis Peraturan terkait Penyusunan LKJ Kemenpora

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi dan tata kerja, struktur organisasi Kemenpora tertuang dalam Permenpora Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga disajikan sebagai berikut:



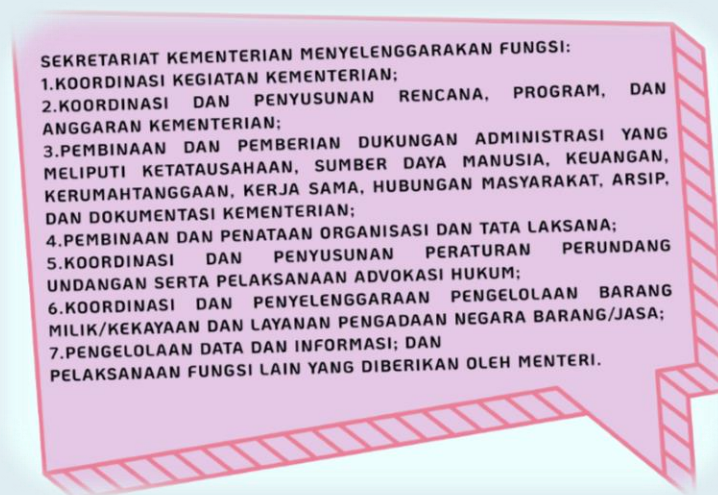
Gambar 1.13 Bagan Struktur Organisasi Kemenpora

### C. RUANG LINGKUP, TUGAS DAN FUNGSI :



Gambar 1.14 Bagan Ruang Lingkup, Tugas dan Fungsi Kemenpora

### D. FUNGSI SESUAI PERMENPORA 1 TAHUN 2025



Gambar 1.15 Infografis Permenpora 1 Tahun 2025

### E. JUMLAH UNIT ORGANISASI

Transformasi Permenpora Nomor 1 Tahun 2025 turut membawa penataan struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga agar lebih ramping, adaptif, dan berorientasi kinerja. Penyesuaian struktur ini diarahkan untuk memperkuat keselarasan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi kinerja, sekaligus mengurangi tumpang tindih tugas antarunit kerja. Penataan organisasi dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, serta mendukung penguatan koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan. Melalui struktur

organisasi yang lebih tepat fungsi, diharapkan kinerja kelembagaan Kemempora semakin optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan prioritas pembangunan nasional.

Susunan struktur organisasi pada Sekretariat Kemempora disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Tugas Organisasi pada Eselon II Sekretariat Kemempora Tahun 2025

No.	UNIT ORGANISASI	TUGAS
1	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, fasilitasi reformasi birokrasi, serta pengelolaan data dan informasi.
2	Biro Humas dan Protokol	Melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, ketatausahaan, dan pengelolaan persuratan.
3	Biro Sumber daya Manusia dan Organisasi	Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, serta pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
4	Biro Hukum dan Kerjasama	Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum, fasilitasi kerja sama, dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah.
5	Biro Keuangan dan Umum	Melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan, layanan kerumahtanggaan, urusan keamanan dalam, barang milik/kekayaan negara, dan klinik serta kearsipan Kementerian.
6	Inspektorat	Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

## F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Sekretaris Kemenpora dan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendukung operasional organisasi, Sekretariat Kemenpora memiliki jumlah pegawai sebanyak 487 pegawai yang mencakup 286 pegawai PNS dan 201 pegawai PPPK yang terdiri dari 299 Laki-Laki dan 188 Perempuan. Dengan rincian pada masing-masing unit kerja eselon II sebagai berikut:

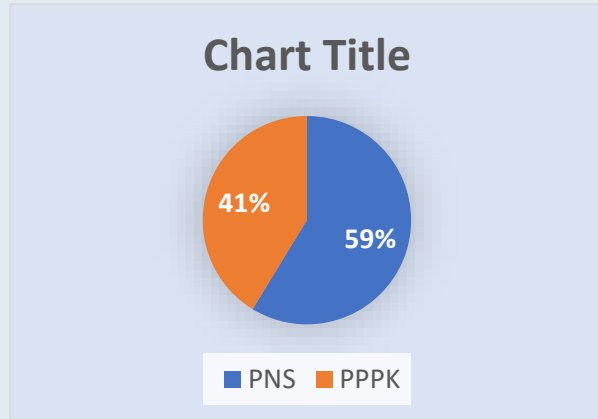
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai pada Sekretariat Kemenpora Tahun 2025

Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data	31	21	56
Biro Humas dan Protokol	26	46	72
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	39	17	56
Biro Hukum dan Kerjasama	19	25	44
Biro Keuangan dan Umum	149	87	236
Inspektorat	13	14	27
<b>Total</b>	<b>299</b>	<b>188</b>	<b>487</b>



Gambar 1.16 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

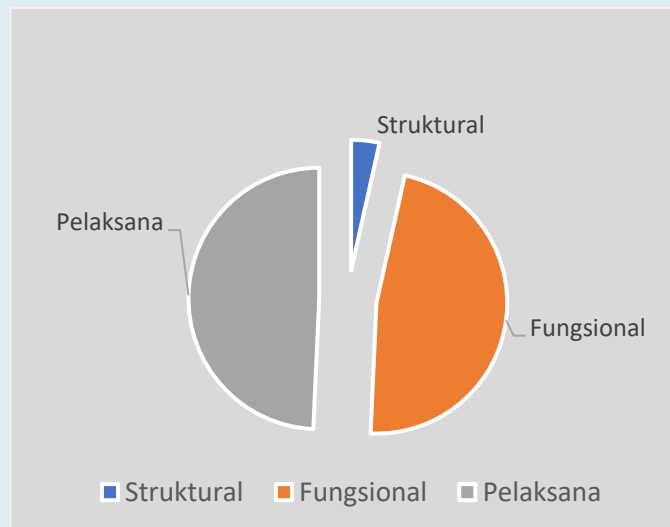
Komposisi Pegawai pada Sekretariat yang berstatus PNS sebanyak 263 orang dan PPPK sebanyak 197 orang dapat diterjemahkan pada grafik sebagai berikut :



Grafik 1.1 Komposisi Pegawai PNS dan PPPK

Komposisi klasifikasi jabatan didominasi oleh Jabatan Pelaksana guna mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan organisasi. Jabatan

Fungsional sebagai penguatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi tetap berperan strategis dalam menjamin efektivitas tata kelola, koordinasi, serta pengendalian kinerja. Struktur jabatan yang proporsional ini menjadi fondasi penerapan sistem merit dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. Komposisi Jabatan Pegawai pada Sekretariat Kemenpora dapat diterjemahkan dalam bagan sebagai berikut :



Grafik 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

## G. ASPEK STRATEGIS



Gambar 1.17 Infografis Program Prioritas Kemenpora Tahun 2025-2029

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat 8 (delapan) misi pembangunan nasional sesuai dengan Asta Cita Presiden menuju Indonesia Emas 2045, salah satunya Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi dan Memperkuat Pembangunan SDM, termasuk Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga dengan sasaran berkenaan dengan program dukungan manajemen Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Sebagaimana turunan dari sasaran pada Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2021-2025, Kemenpora memiliki arah kebijakan dalam program dukungan manajemen yakni terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih yang diuraikan pada perbaikan tata Kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Perbaikan tata kelola kelembagaan, melalui penetapan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka menengah, penyempurnaan struktur kelembagaan yang solid dalam rangka mendorong sistem manajemen yang efektif dan efisien, menyusun perencanaan yang realistis, selaras, terinci dan sesuai dengan kebutuhan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program, kegiatan dan anggaran di seluruh unit kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, mendorong pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan transparan, melaksanakan evaluasi hingga meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal;

2. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara, dengan mendorong adanya rencana pengembangan kompetensi secara berkala kepada setiap pegawai di lingkungan Kemenpora, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal;
3. Penyederhanaan Regulasi dengan melaksanakan deregulasi kebijakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan berdaya guna kepada seluruh stakeholder Kemenpora, menjamin dan menetapkan adanya ketentuan atau pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren, meminimalisasi adanya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangan, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundangan-undangan;
4. Penyesuaian Birokrasi dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur, salah satunya melaksanakan penyesuaian terhadap penyederhanaan birokrasi yang mengganti jabatan administrator dan pengawas menjadi jabatan fungsional di lingkungan Kemenpora;
5. Peningkatan kecepatan pelayanan publik, mencakup penyajian data dan informasi yang akurat dan handal serta membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sinergis dan terintegrasi dalam setiap penyelenggaraan administrasi dan layanan di lingkungan Kementerian pemuda dan Olahraga sehingga tercipta pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.

Pada tahun 2025, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menghadapi beberapa isu/peristiwa utama diantaranya :

1. Efisiensi Anggaran dan Prioritas Program

Pemangkasan anggaran signifikan menjadi isu utama. Kemenpora mengalami pemotongan anggaran hingga sekitar 55–56 % dalam APBN 2025 berdasarkan kebijakan efisiensi pemerintah, mengakibatkan perluasan prioritas dan pengetatan program, termasuk pembatasan pengiriman atlet dan pelatnas tertentu.

Dampaknya:

- Pelatnas (pelatihan nasional) dialihkan ke prioritas cabang olahraga berpeluang medali.
- Penyesuaian program dan pembatasan kegiatan non-prioritas menjadi langkah adaptasi.

2. Penguatan Pelayanan Kepemudaan dan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) **Kemenpora memperluas fokus** pembangunan kepemudaan berbasis bukti, termasuk penyempurnaan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan indikator lebih lengkap yang kini juga diterapkan hingga tingkat kabupaten/kota.

Fokus layanan kepemudaan didorong pada:

- Peningkatan kualitas partisipasi, kepemimpinan, dan kesempatan pemuda.
- Pengembangan indikator empiris untuk arah kebijakan program pemuda.

3. Sports Industry & Ekonomi Olahraga

Kemenpora menempatkan industri olahraga sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, termasuk upaya penyederhanaan regulasi dan mendorong investasi serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain melalui Indonesia Sports Summit 2025.

Langkah strategis:

- Pelatihan manajemen destinasi sports tourism.
- Penyusunan regulasi pendukung guna mendorong pelaku industri olahraga lokal.

## H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ini adalah untuk menjelaskan pencapaian kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga selama tahun 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum terkait dengan latar belakang, dasar hukum, tugas dan wewenang, struktur organisasi, aspek strategis Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sistematika penyajian.

### **BAB II: PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan rencana kerja dan anggaran Sekretariat Kemenpora 2025, serta perjanjian kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

### **BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja Sekretariat Kemenpora beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

### **BAB IV: PENUTUP**

Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 beserta rekomendasinya sebagai perbaikan di masa yang akan datang.



# LAPORAN KINERJA 2025

## SEKRETARIAT KEMENPORA



# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

SUKSES DAN  
REPRESENTASI  
DESAIN BEKAS  
OLAHRAGA NASIONAL



## A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT 2025-2029



Perencanaan Kinerja di tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029, serta capaian kinerja tahun 2022 - 2024. Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan *platform* unit sekretariat atas arah kebijakan terkait pada Dukungan Manajemen diupayakan pada perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyusun perencanaan kinerja yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan kinerja dilakukan seiring dengan agenda penetapan rencana kinerja atau perjanjian kinerja dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen dari instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat. Sekretariat memiliki peran dan strategis dalam mendukung visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka visi dan misi Sekretariat yang akan dicapai sesuai periode renstra 2025 - 2029 yaitu :



Gambar 2.1 Infografis Visi Misi Kemenpora

## TUJUAN

1. Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional;
2. Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur.

## B. INFORMASI KINERJA

Dalam Upaya penyelarasan seluruh dokumen perencanaan, maka perlu disusun informasi kinerja yang memiliki keterhubungan antara sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan hingga di level output. Hal ini tentu akan

memudahkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja, oleh karena itu Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengupayakan adanya pemetaan kinerja yang tersusun melalui pohon kinerja.


## POHON KINERJA

Dalam rangka memastikan keterpaduan dan konsistensi seluruh dokumen perencanaan pembangunan, pada Tahun 2025 Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terus memperkuat penyusunan informasi kinerja yang terintegrasi dan saling terhubung mulai dari sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, hingga pada level output dan outcome. Penyelarasan tersebut menjadi prasyarat penting dalam mendukung proses pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih akurat, objektif, dan berorientasi hasil.

Sebagai upaya konkret, Sekretariat Kemenpora telah mengimplementasikan pemetaan kinerja secara sistematis melalui penyusunan **Pohon Kinerja**. Pohon Kinerja digunakan sebagai instrumen penyelarasan antara sasaran strategis kementerian dengan sasaran unit kerja di bawahnya, sekaligus sebagai alat bantu dalam menjaga keterkaitan logis sebab-akibat antar sasaran kinerja. Melalui pendekatan ini, organisasi diharapkan mampu mengidentifikasi rute logika kinerja yang jelas dalam merumuskan strategi, menentukan prioritas, serta menemukan alternatif solusi yang adaptif guna mencapai outcome yang diharapkan.

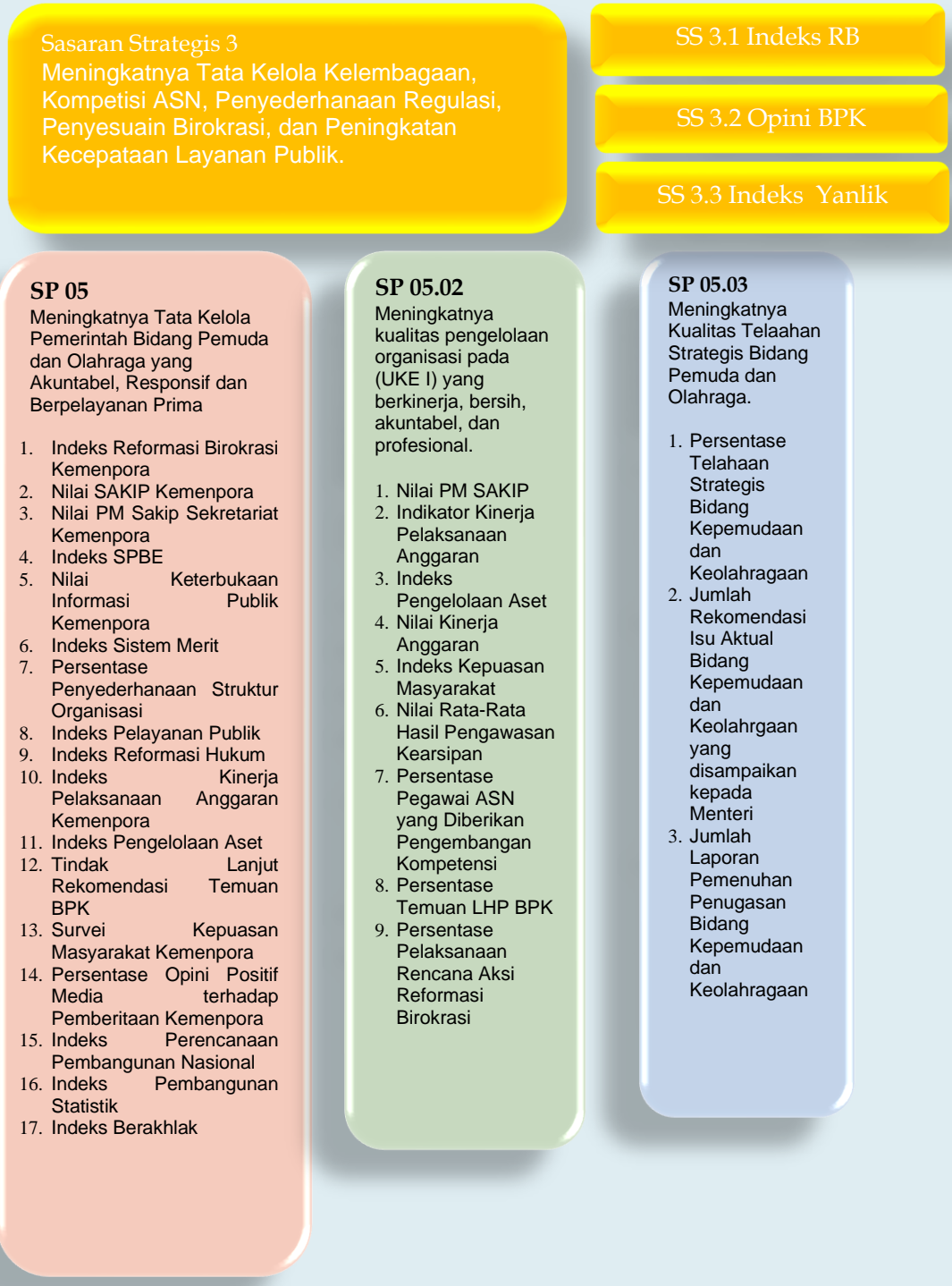
Penerapan Pohon Kinerja juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi Kemenpora Tahun 2025 yang menekankan terwujudnya birokrasi dan layanan publik yang **agile, efektif, dan efisien**. Dalam konteks transformasi birokrasi dan tata kelola, Sekretariat Kemenpora secara berkelanjutan mendorong seluruh unsur organisasi agar lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dipandang sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Lebih lanjut, optimalisasi kinerja pada Tahun 2025 diarahkan pada penguatan orientasi **outcome dan dampak jangka panjang**, tidak semata-mata pada pencapaian output jangka pendek. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah kebijakan dan program dukungan manajemen yang dilaksanakan, sekaligus memperkuat kontribusi Sekretariat Kemenpora terhadap



pencapaian tujuan pembangunan sektor kepemudaan dan keolahragaan secara nasional. Dalam menjalankan fungsi pembinaan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenpora, Sekretariat Kemenpora pada Tahun 2025 didukung oleh **5 (lima) unit kerja setingkat biro** dan **4 (empat) satuan kerja setingkat pusat**. Kinerja Sekretariat Kemenpora diukur melalui **17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Program (IKP)** yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenpora Tahun 2025. Target-target IKP tersebut merupakan agregasi dari berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja lingkup Sekretariat sebagai pengampu Program Dukungan Manajemen.

Dengan kerangka pemetaan kinerja yang semakin matang, dukungan organisasi yang terstruktur, serta indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome, Sekretariat Kemenpora pada Tahun 2025 berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi dan layanan publik yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing.



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Sekretariat Kemenpora 2025-2029

### C. SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN

Selanjutnya sasaran program pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga diimplementasikan dalam berbagai Sasaran Kegiatan yang diampu oleh unit eselon II dibawahnya. Hal ini tercantum dalam Rencana kerja yang digunakan sebagai panduan kegiatan yang merefleksikan target, volume dan anggaran yang digunakan dan menjadi target pelaksanaan kerja di tahun berjalan. Selain itu dokumen renja merupakan revisi atas dokumen rencana yang telah dituangkan dalam renstra, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan, kebijakan atau kondisi eksternal dan internal yang mungkin berubah atau berbeda dengan kondisi pada saat penetapan renstra. Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2025 yang telah disusun, Sekretariat Kemenpora memiliki:

Kode : 092.01.WA  
Program : Dukungan Manajemen

Tabel 2.1 Sasaran Program Sekretariat Kemenpora Tahun 2025

<b>Sasaran Strategis: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif, dan Berpelayanan Prima.</b>				
No	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026	Penanggung Jawab
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora	80.4	81	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
1.2	Nilai SAKIP Kemenpora	70	72	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
1.3	Nilai PM SAKIP Sekretariat Kemenpora	75	-	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
1.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.75	3,78	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
1.5	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora	99.41	99.43	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
1.6	Indeks Sistem Merit	295	297	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1.7	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100%	100%	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1.8	Indeks Pelayanan Publik	4.32	4.35	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data

Sasaran Strategis: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif, dan Berpelayanan Prima.				
No	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026	Penanggung Jawab
1.9	Indeks Reformasi Hukum	87	87.5	Biro Hukum dan Kerjasama
1.10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora	90.15	90.25	Biro Keuangan dan Umum
1.11	Indeks Pengelolaan Aset	3.1	3.76	Biro Keuangan dan Umum
1.12	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	72	73	Inspektorat
1.13	Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora	90.06	90.06	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1.14	Persentase Opini Positif Media terhadap Pemberitaan Kemenpora	91	92.25	Biro Humas dan Protokol
1.15	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	87.5	88	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
1.16	Indeks Pembangunan Statistik	2.69	2.75	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
1.17	Indeks Berakhlak	63	-	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi


## Output Program pada Sekretariat Kemenpora Tahun 2025

Tabel 2.2 Output Program Sekretariat Kemenpora Tahun 2025

NO.	OUTPUT PROGRAM	INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	TARGET INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
1	Terselenggaranya Pengelolaan Layanan Kesekretariatan	Jumlah Undang-Undang yang tersusun	-
		Jumlah Peraturan Pemerintah yang tersusun	1
		Jumlah Peraturan Presiden yang tersusun	1
		Jumlah Peraturan Menteri yang tersusun	4
		Jumlah Layanan Hukum Rekomendasi	173
		Jumlah Naskah Kerja Sama dalam Negeri	9
		Jumlah Naskah Kerja Sama Luar Negeri	5
		Jumlah Layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri	553

		Jumlah Layanan Kehumasan dan Protokoler	2
		Jumlah Layanan Data dan Informasi	1
		Jumlah arsip yang dikelola	1
		Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
		Jumlah pegawai yang mendapat layanan SDM	1,013
		Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola	2
		Jumlah Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	458
		Jumlah Layanan Perkantoran	1
		Jumlah Perbendaharaan dan Laporan	1
		Jumlah Layanan Umum	1
		Jumlah Sarana Penunjang yang disediakan	550 Unit
		Jumlah Prasarana yang dibangun/rehabilitasi/renovasi	7625 M2
		2	Terlaksananya Pengeolaan Layanan Pengawasan Internal
3	Terselenggaranya Layanan Dukungan kedeputian	Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1
		Jumlah layanan SDM	8
		Jumlah Layanan Hukum	12
		Jumlah layanan organisasi dan Tata Kelola Internal	2
		Layanan Kehumasan dan Protokoler	2
		Layanan Data dan Informasi	1
		Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1

#### D. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2025



KEMENTERIAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif, dan Berpelayanan Prima	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora	80,4
		1.2 Nilai SAKIP Kemenpora	70
		1.3 Nilai PM SAKIP Sekretariat Kemenpora	75
		1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,75
		1.5 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora	99,41
		1.6 Indeks Sistem Merit	295
		1.7 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100
		1.8 Indeks Pelayanan Publik	4,32
		1.9 Indeks Reformasi Hukum	87
		1.10 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora	90,15
		1.11 Indeks Pengelolaan Aset	3,1
		1.12 Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	72
		1.13 Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora	90,06
		1.14 Persentase Opini Positif Media terhadap pemberitaan Kemenpora	91%
		1.15 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	87,5

	1.16	Indeks Pembangunan Statistik	2.69
	1.17	Indeks Berakhlak	63

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Rp. 3.000.000.000
2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rp. 13.000.000.000
3. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp. 15.000.000.000
4. Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	Rp. 32.625.485.000
5. Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	Rp. 6.640.949.000
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian	Rp. 8.500.000.000
7. Pengelolaan Keuangan dan Umum	Rp. 339.922.506.000
	=====+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 418.688.940.000</b>

Jakarta, Juli 2025

<b>Menteri Pemuda dan Olahraga,</b>    <b>Ario Bimo Nandito Arlotedjo, SH</b>	<b>Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga,</b>    <b>Dr. Gunawan Suswantoro</b>
---	---

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenpora 2025

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, pada Tahun 2025 Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 1 (satu) Sasaran Program yang didukung oleh 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Penetapan sasaran dan indikator kinerja tersebut dimaksudkan untuk memastikan terselenggaranya fungsi kesekretariatan kementerian secara efektif, efisien, akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Kemenpora secara keseluruhan.

Indikator kinerja sasaran program dan target yang disusun pada Sekretariat Kementerian pemuda dan Olahraga telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, diantaranya spesifik menyebutkan definisi operasional dengan jelas dan perhitungan untuk mencapainya serta dapat diukur. Setiap tahunnya, indikator-indikator tersebut dapat dilakukan evaluasi sehingga memberikan ukuran-ukuran yang lebih handal dalam mencapai sasaran program. Secara rinci definisi operasional dari masing-masing indikator disajikan dalam dokumen Manual Indikator Kinerja Sekretariat.

### Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data Tahun 2025

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data Sekretariat Kemenpora 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel	1.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,1
		1.2 Luas bangunan/renovasi sarana aparatur	6500 m2
		1.3 Pemenuhan pengadaan dan fasilitas kantor/prasarana aparatur	55
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip	2.1 Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip	85
3	Meningkatnya kualitas	3.1 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora	90,15

	pengelolaan Keuangan yang optimal, transparan dan akuntabel	3.2 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Kemenpora	90
		3.3 Tingkat Kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP	100%
4	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Umum yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	4.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Biro Keuangan dan Umum	2 Dokumen
		4.2 Persentase Serapan Anggaran pada Biro Keuangan dan Umum	90%
		4.3 Persentase Capaian Output pada Biro Keuangan dan Umum	100%
		4.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Biro Keuangan dan Umum	90
		4.5 Hasil Pengawasan Kerarsipan pada Biro Keuangan dan Umum	85
		4.6 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Klinik	91

Dalam rangka memastikan ketercapaian indikator kinerja utama pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, telah disusun pula rincian kegiatan unit Eselon II yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja pada Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data, Biro Humas dan Protokol, Biro Sumber Daya Manusia Organisasi, Biro Hukum dan Kerjasama dan Biro Keuangan dan Umum dan Inspektorat.

## Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Keuangan dan Umum Tahun 2025

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Kemenpora 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel	1.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.76
		1. Luas bangunan/renovasi 2 sarana aparatur	6500 m2
		1. Pemenuhan pengadaan dan 3 fasilitas kantor/prasarana aparatur	440
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip	2. Indeks Kualitas Pengelolaan 1 Arsip	82
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan yang optimal, transparan dan akuntabel	3. Nilai Indikator Pelaksanaan 1 Anggaran (IKPA) Kemenpora	90,25
		3. Nilai Indikator Pelaksanaan 2 Anggaran (IKPA) Sekretariat Kemenpora	90
		3. Tingkat Kesesuaian 3 Laporan Keuangan dengan SAP	100%
4	Terselenggaranya Layanan Keuangan dan Umum yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	4. Jumlah Standar Pelayanan 1 dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Biro Keuangan dan Umum	2 Dokumen
		4. Persentase Serapan 2 Anggaran pada Biro Keuangan dan Umum	90%
		4. Persentase Capaian Output 3 pada Biro Keuangan dan Umum	100%
		4. Indeks Kepuasan 4 Masyarakat terhadap	90.06

		layanan pada Biro Keuangan dan Umum	
		4. Hasil Pengawasan	85
		5. Kerarsipan pada Biro Keuangan dan Umum	
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Klinik	91

### Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Humas dan Protokol Tahun 2025

Tabel 2.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Humas Protokol Sekretariat Kemempora 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	1.1 Persentase Opini Positif Media terhadap pemberitaan Kemempora	91%
		1.2 Jumlah Pengunjung Website Kemempora	800.000 Views
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Strategis Pimpinan	2.1 Agenda Setting dan Schedule pelaksanaan Kehumasan dan Protokol Kemempora yang dilaksanakan dengan baik	100%
3	Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	3.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol yang tersusun dan dimanfaatkan	2 Dokumen
		3.2 Persentase Serapan Anggaran pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	91%
		3.3 Persentase Capaian Output pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	91%

		3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	90,06
		3.5 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	75

### Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro SDMO Tahun 2025

Tabel 2.6 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro SDMO Sekretariat Kemenpora 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia	1.1 Indeks Sistem Merit	295
		1.2 Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	80
2	Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan professional	2.1 Indeks Profesionalitas ASN	80
		2.2 Indeks BerAkhlak	64
3	Meningkatnya manajemen organisasi dan tata laksana yang berkualitas	3.1 Jumlah Naskah Kebijakan Penataan Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga	2
		3.2 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	5
		3.3 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	71
		3.4 Nilai Pelayanan Publik Inklusif	85
		3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	92,17
		3.6 Persentase Dokumen SOP yang ditetapkan	100%
4	Terselenggaranya Layanan Sumber Daya	4.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional	2 dokumen

Manusia dan Organisasi yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	Prosedur pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
	4.2 Persentase Serapan Anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	95%
	4.3 Persentase Capaian Output pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	100%
	4.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	92,50
	4.5 Hasil Pengawasan Kearsipan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	85

### Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Hukum dan Kerjasama Tahun 2025

Tabel 2.7 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Hukum dan Kerjasama Sekretariat Kemempora 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Layanan Kerjasama yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	1.1 Persentase Pelayanan Rancangan Naskah Perjanjian yang siap ditandatangani pimpinan	85%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Barang dan Jasa (PBJ)	2.1 Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	60
3	Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum bidang pemuda dan olahraga	3.1 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan/diundangkan	85%
		3.2 Persentase Pelayanan Rekomendasi dan Layanan Hukum	85%

		3.3 Indeks Kualitas Kebijakan	68
		3.4 Indeks Reformasi Hukum	87
4	Terselenggaranya Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Pengelolaan Barang dan Jasa yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	4.1 Jumlah Standar Pelayanan dan/atau Standar Operasional Prosedur pada Biro Hukum dan Kerjasama	2 Dokumen
		4.2 Persentase Serapan Anggaran pada Biro Hukum dan Kerjasama	95%
		4.3 Persentase Capaian Output pada Biro Hukum dan Kerjasama	100%
		4.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Biro Hukum dan Kerjasama	93
		4.5 Hasil Pengawasan Kerarsipan pada Biro Hukum dan Kerjasama	70

### Sasaran Kegiatan dan Indikator Inspektorat Tahun 2025

Tabel 2.8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Inspektorat Kemenpora 2025

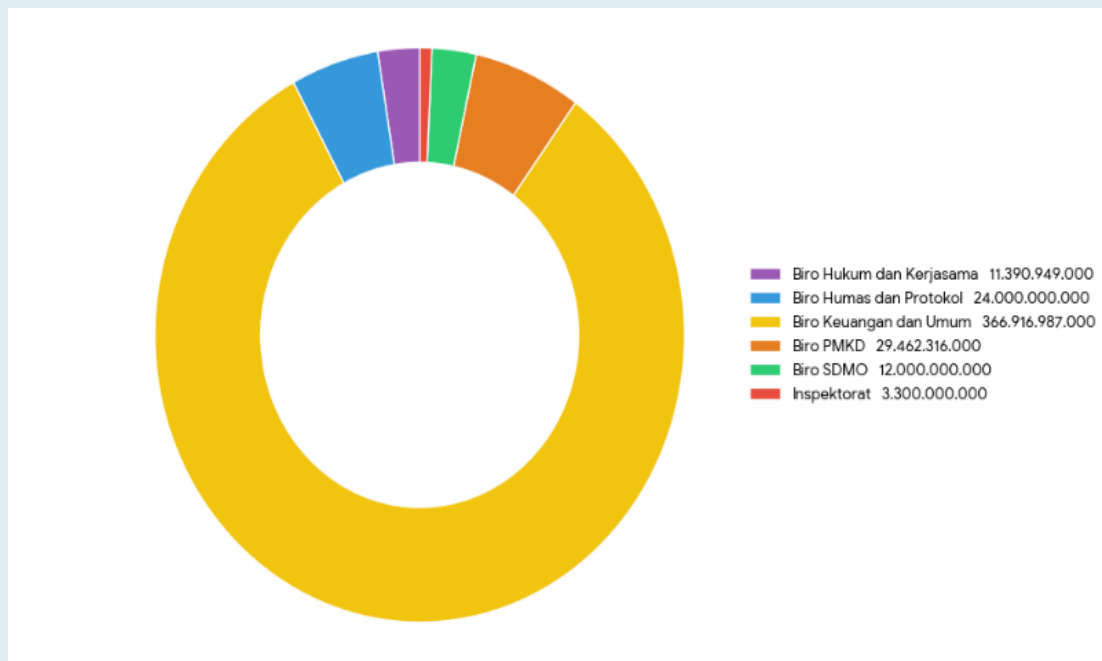
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Audit dan Pengawasan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.1 Persentase Pengawasan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat yang dilaksanakan	90%
		1.2 Indeks maturitas SPIP terintegrasi Kemenpora	3,35
		1.3 Persentase Tindak Lanjut rekomendasi APIP/BPK RI yang ditindaklanjuti	72%
		1.4 Nilai Survey Penilaian Integritas	78
		1.5 Tingkat Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat	90%

		(LAPOR) yang sudah diselesaikan	
2	Terselenggaranya Layanan Inspektorat yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1	Jumlah Standar Pelayanan pada Inspektorat yang tersusun dan termanfaatkan
		2.2	Persentase Serapan Anggaran pada Inspektorat
		2.3	Persentase Capaian Output pada Inspektorat
		2.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pada Inspektorat
		2.5	Hasil Pengawasan Kearsipan pada Inspektorat
			2 Dokumen
			95%
			100%
			91
			78

#### E. POSTUR ANGGARAN

Selanjutnya dalam mendukung ketercapaian setiap indikator kinerja, telah ditetapkan alokasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja Eselon II pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025, secara rinci disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Grafik 2.1 Postur Anggaran Sekretariat Kemenpora 2025



Dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja pada tahun berjalan, postur anggaran hasil revisi ke-7 per tanggal 12 Desember menunjukkan total pagu sebesar **Rp 447.070.252.000**. Distribusi anggaran pada masing-masing unit kerja Eselon II disajikan secara rinci pada grafik di atas.

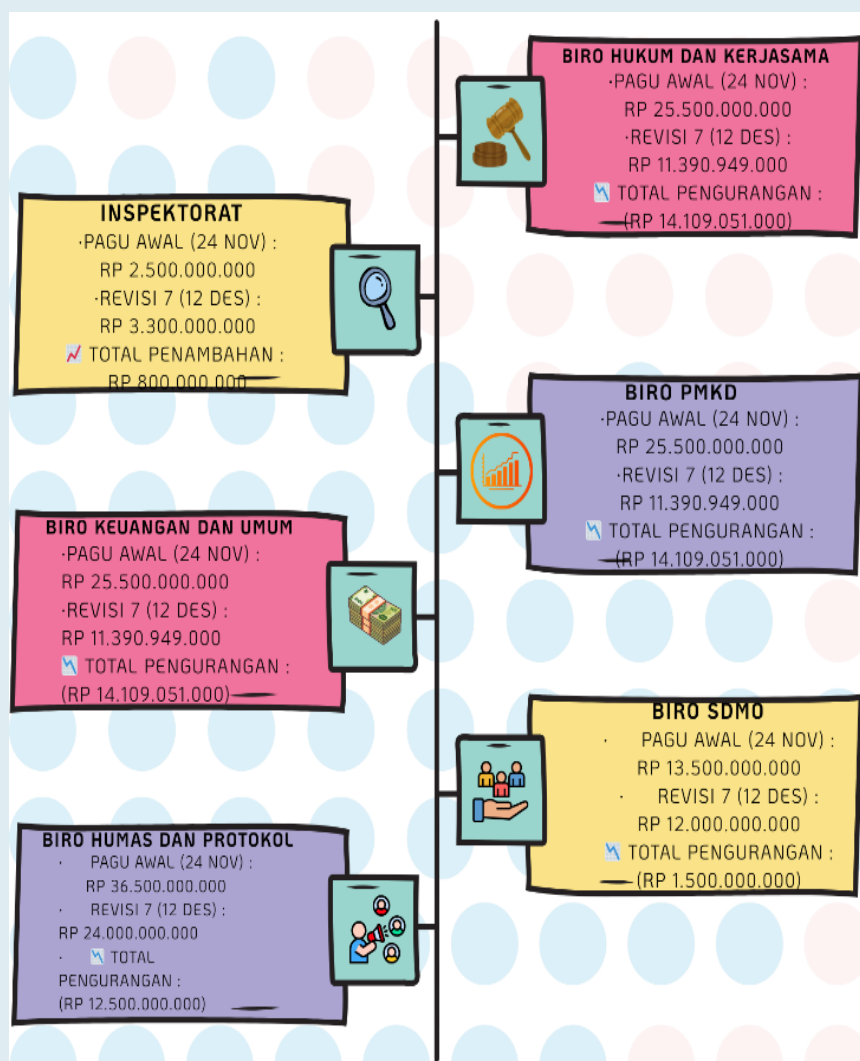
Berdasarkan data tersebut, komposisi anggaran didominasi oleh Biro Keuangan dan Umum dengan alokasi sebesar Rp 366.916.987.000 atau setara dengan 82,07% dari total pagu keseluruhan. Besarnya porsi anggaran pada satuan kerja ini merefleksikan peran strategis Biro Keuangan dan Umum dalam mengelola belanja operasional terpusat, pemeliharaan aset, serta layanan dukungan manajemen bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat.

Adapun distribusi anggaran untuk unit pendukung lainnya adalah sebagai berikut:

1. Biro PMKD mendapatkan alokasi terbesar kedua, yakni Rp 29.462.316.000, untuk mendukung perencanaan dan manajemen kinerja;
2. Biro Humas dan Protokol dialokasikan sebesar Rp 24.000.000.000 guna penguatan komunikasi publik dan keprotokolan;
3. Biro SDMO dan Biro Hukum dan Kerjasama masing-masing memiliki pagu sebesar Rp 12.000.000.000 dan Rp 11.390.949.000;
4. Inspektorat memiliki alokasi sebesar Rp 3.300.000.000 untuk fungsi pengawasan.

Struktur anggaran ini telah disesuaikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) administratif serta teknis guna mencapai target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

## PERJALANAN PAGU



Gambar 2.4 Perjalanan Pagu Sekretariat Kemenpora TA 2025

Alokasi anggaran Sekretariat sebagai berikut **pagu awal Sekretariat** adalah sebesar **Rp 396.181.252.000**, kemudian terjadi pergerakan anggaran sepanjang tahun berjalan hingga pada **revisi ke-7 tanggal 12 Desember** total pagu menjadi sebesar **Rp 447.070.252.000**. Terdapat penambahan total anggaran sebesar **Rp 50.889.000.000** yang dialokasikan kepada Satker Sekretariat dengan rincian perubahan pada masing-masing unit kerja.

Alokasi anggaran terbesar adalah **Biro Keuangan dan Umum** yaitu sebesar **Rp 366.916.987.000** atau **82%** dari total pagu Sekretariat. Anggaran ini diantaranya dialokasikan untuk belanja pegawai, pembayaran gaji, tunjangan kinerja pegawai, serta kebutuhan operasional umum kementerian. Kenaikan signifikan pada Biro Keuangan dan Umum (dari pagu awal Rp 282 Miliar)

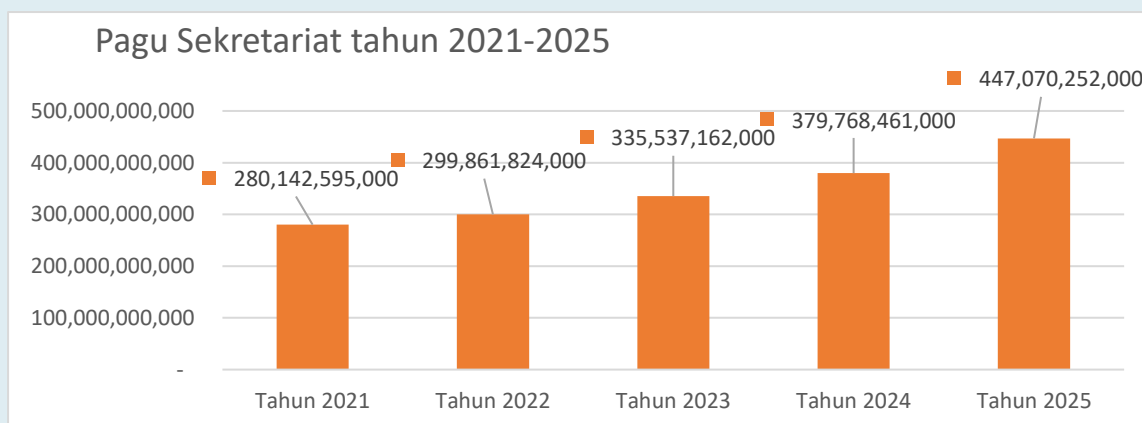
Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Sekretariat Kemenpora TA 2025

Unit Kerja	Pagu Awal	Pagu Revisi 1 (21 Februari)	Pagu Revisi 2 (2 Juli)	Pagu Revisi 3 (15 Juli)	Pagu Revisi 4 (8 September)	Pagu Revisi 5 (12 Oktober)	Pagu Revisi 6 (10 November)	Pagu Revisi 7 (12 Desember)
Inspektorat	2.500.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
Biro Hukum dan Kerjasama	25.500.000.000	25.500.000.000	6.640.949.000	6.640.949.000	6.640.949.000	11.140.949.000	11.390.949.000	11.390.949.000
Biro Humas dan Protokol	36.500.000.000	36.500.000.000	41.381.312.000	41.381.312.000	42.381.312.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
Biro Keuangan dan Umum	282.081.252.000	282.081.252.000	351.035.675.000	351.035.675.000	351.035.675.000	364.916.987.000	366.916.987.000	366.916.987.000
Biro PMKD	36.100.000.000	36.100.000.000	36.512.316.000	36.512.316.000	34.512.316.000	32.512.316.000	29.462.316.000	29.462.316.000
Biro SDMO	13.500.000.000	13.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000	9.500.000.000	11.500.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
<b>Grand Total</b>	<b>396.181.252.000</b>	<b>396.181.252.000</b>	<b>447.070.252.000</b>	<b>447.070.252.000</b>	<b>447.070.252.000</b>	<b>447.070.252.000</b>	<b>447.070.252.000</b>	<b>447.070.252.000</b>

berbanding terbalik dengan beberapa unit lain seperti Biro Humas dan Biro Hukum yang mengalami penyesuaian/pengurangan pagu untuk optimalisasi anggaran di akhir tahun.

### PERKEMBANGAN PAGU SEKRETARIAT (2021-2025)

Tren alokasi anggaran Sekretariat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2025) menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada



Grafik 2.2 Alokasi Anggaran Sekretariat Kemenpora TA 2021-2025

awal periode tahun 2021, pagu anggaran tercatat sebesar Rp 280.142.595.000 dan terus mengalami tren positif hingga tahun 2024 mencapai Rp 379.768.461.000.

Pada tahun 2025, alokasi anggaran Sekretariat mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp 447.070.252.000. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi penambahan pagu sebesar Rp 67.301.791.000 di tahun 2025. Peningkatan anggaran ini sejalan dengan upaya optimalisasi kinerja dan dukungan operasional pada lingkungan Sekretariat Kemempora.

## F. PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT TAHUN 2025

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 diawali dengan pelaksanaan pengukuran kinerja atas Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian target kinerja yang telah direncanakan, dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai selama Tahun 2025.

Metode pengukuran capaian Indikator Kinerja dalam Laporan Kinerja ini dilakukan dengan membandingkan nilai aktual atau realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap nilai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik pengukuran, Indikator Kinerja dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu **IKU Maximize**, **IKU Minimize**, dan **IKU Stabilize**. **IKU Maximize** merupakan indikator yang nilai realisasi kerjanya diharapkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan, **IKU Minimize** merupakan indikator yang nilai realisasinya diharapkan lebih rendah dari target, sedangkan **IKU Stabilize** merupakan indikator yang nilai realisasinya diharapkan berada dalam rentang tertentu.

Namun demikian, seluruh Indikator Kinerja yang digunakan dalam Sasaran Program Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 termasuk dalam kategori **IKU Maximize**, sehingga capaian kinerja diharapkan dapat mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, tingkat capaian Indikator Kinerja ditentukan berdasarkan kriteria penilaian ketercapaian target sebagaimana tercantum dalam **Tabel Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator Kinerja**. Dalam pengukuran

kinerja ini, nilai capaian kinerja dibatasi pada angka maksimal sebesar **120 persen**. Apabila hasil perbandingan antara realisasi dan target menunjukkan

capaian melebihi 120 persen, maka nilai capaian yang dicantumkan dalam Laporan Kinerja ini tetap ditetapkan sebesar **120 persen**.

RENTANG CAPAIAN	KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN	KETERANGAN
Capaian $\geq$ 100	Sangat Baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
90 s.d capaian < 100	Baik	
80 s.d capaian < 90	Cukup	
Capaian < 80	Kurang	

Gambar 2.5 Tabel Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator Kinerja



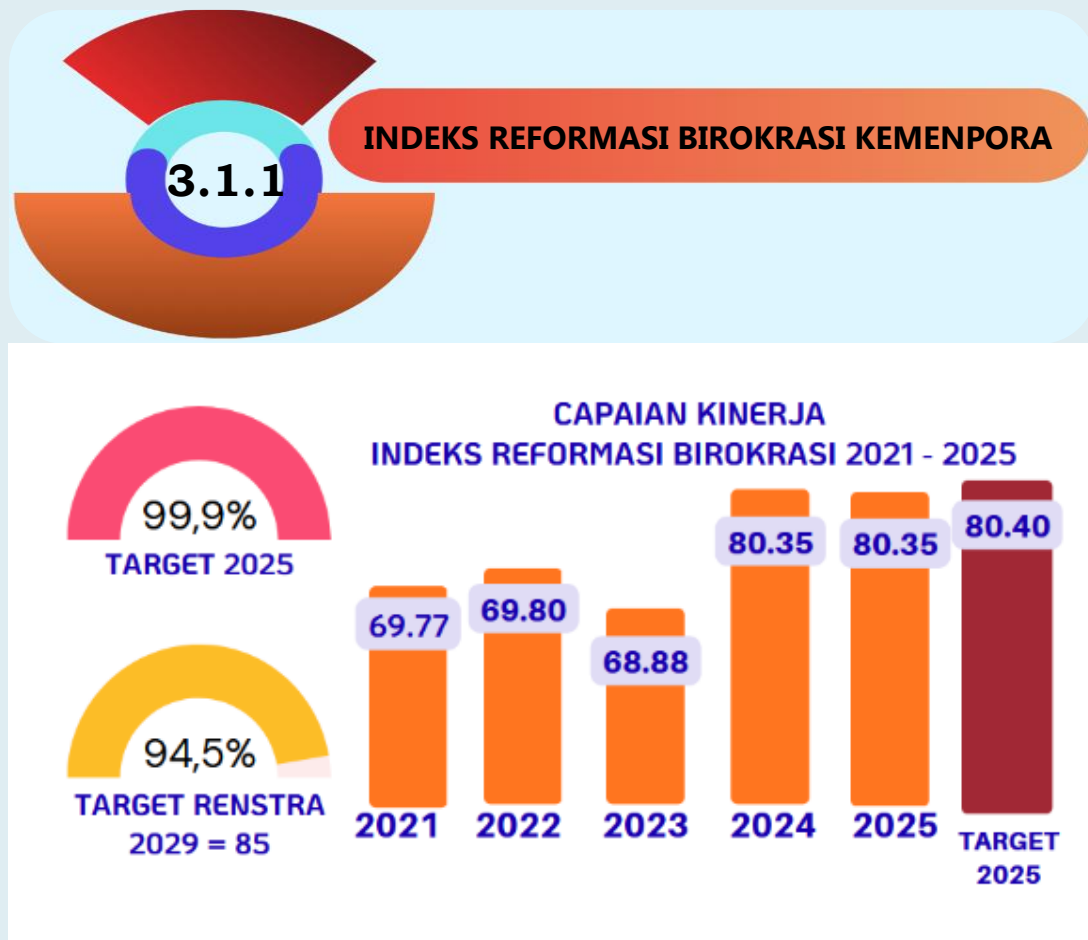
# LAPORAN KINERJA 2025

## SEKRETARIAT KEMENPORA



# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 2023-2025

### A. CAPAIAN KINERJA

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penetapan ini menegaskan bahwa pelaksanaan RB tidak sekadar merupakan agenda internal pemerintah, tetapi merupakan bagian strategis dari arah pembenahan birokrasi secara nasional guna mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan berkelas dunia sebagai prasyarat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

*Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029 sedang proses penyusunan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu sebagai pedoman pelaksanaan RB terdapat Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Sejak Tahun 2023, pelaksanaan RB berfokus pada kegiatan percepatan yang diterjemahkan pada 28 sub komponen pada indikator RB General dan 5 sub komponen pada indikator RB Tematik. Sasaran dan agenda RB General mencakup transformasi tata kelola birokrasi secara umum, yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan RB dan pembangunan.

**Sasaran Pertama**

Terwujudnya pemerintah digital.

**Sasaran Kedua**

Terciptanya aparatur negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem merit.

**Sasaran Ketiga**

Terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif.

**Sasaran Keempat**

Terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi, berbasis jejaring dan lincah

**Sasaran Kelima**

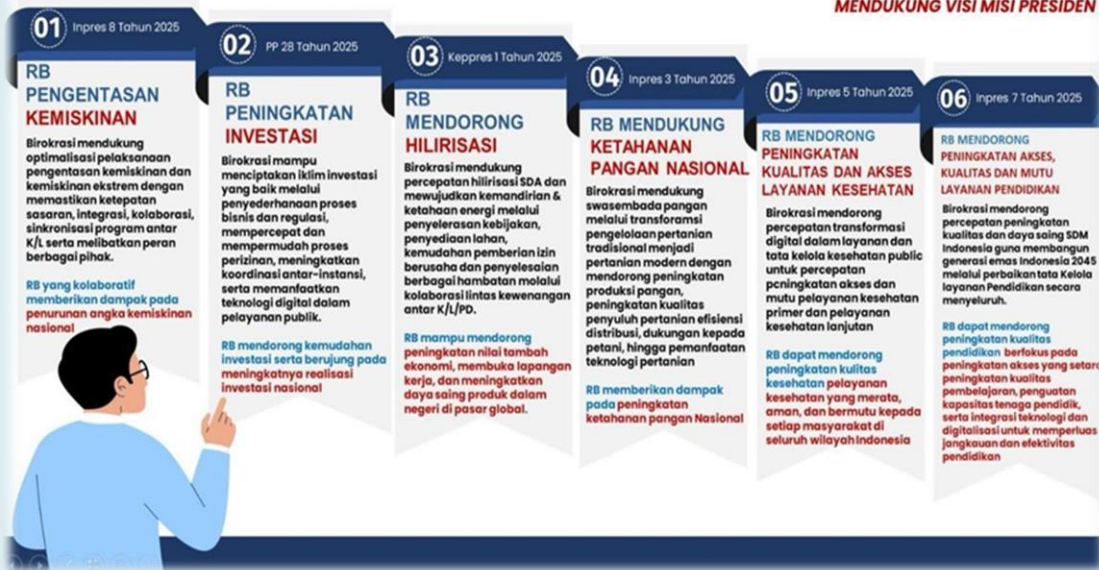
Terwujudnya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

Gambar 3.2 Sasaran RB Tematik Berdasarkan RPJMN 2025-2029

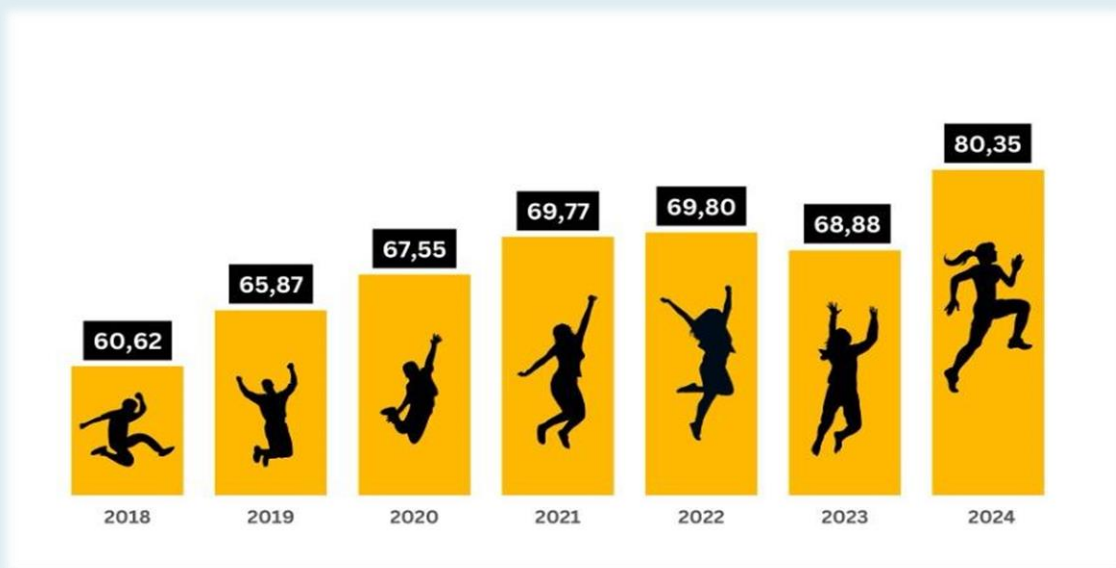
Sasaran dan agenda RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

# RB BERDAMPAK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT

MENDUKUNG VISI MISI PRESIDEN



Gambar 3.3 Agenda RB Tematik Tahun 2025



Grafik 3.1 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2024

## Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora 2023-2024

Tabel 3.1 Indeks RB Kemenpora Tahun 2023-2024

NO	RB KEMENPORA	TAHUN 2023			TAHUN 2024	
		BOBOT	SKOR	SKOR INDEX	SKOR	SKOR INDEX
RB GENERAL		100		66,04		72,64
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	3	2,3	2,3
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7	85,56	5,99	100	5,37
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	100	2
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8	5	2
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3,108	2,49	3,301	2,64
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0,5	0,5	0	0
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	67,73	2,71	68,08	2,72
8	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	90,23	1,8	87,15	1,74
9	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan	2	1	0,4	3	1,2

	Berbasis Elektronik (SPBE)					
10	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	94,15	1,88	91,88	1,84
11	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	87,67	1,75	90,16	1,8
12	Indeks Pengelolaan Aset	2	2,65	1,32	3,74	1,87
13	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,5	2	0,6	4	1,2
14	Indeks Kualitas Kebijakan	1,5	66,33	0,99	66,33	0,99
15	Indeks Reformasi Hukum	1,5	67,82	1,02	86,8	1,3
16	Indeks Pembangunan Statistik	1,5	2,13	0,64	2,69	0,81
17	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	19,63	0,39	50,22	1
18	Indeks Sistem Merit	4	293,5	2,86	293,5	2,86
19	Indeks Pelayanan Publik	1,5	3,77	1,13	4,31	1,29
20	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	55,55	0,83	70,76	1,06
21	Indeks SPBE	9	3,35	6,03	3,75	6,75
22	Capaian Prioritas Nasional	2	93,39	1,87	79,59	1,62
23	Capaian IKU	8	85,71	4,65	72,73	3,46
24	Opini BPK	5	5	5	3	5
25	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	57,2	2,29	58,88	2,36
26	Indeks BerAkhlak	4	1,95	0,08	62,92	2,52
27	Survei Penilaian Integritas	10	66	6,6	77,4	7,74
28	Survei Kepuasan Masyarakat	8	80,28	6,42	90,05	7,2

RB TEMATIK		10		2,84		6,99
1	Pengentasan Kemiskinan	0,8	1,2	1,2	1,23	1,23
2	Realisasi Investasi	0,8	-	-	1,58	1,58
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting	0,8	-	-	0,8	0,8
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,8	1,64	1,64	1,84	1,84
5	Laju Inflasi	0,8	-	-	1,54	1,54
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>68,88</b>		<b>80,35</b>	

### Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 2024

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebesar **80,35** dengan kategori “A” atau tercapai sebesar 99,94% dari target 80,4 mengalami peningkatan **11,47** poin dari capaian di tahun 2023 dengan Indeks RB sebesar 68,88. Nilai ini merupakan gabungan dari hasil evaluasi RB General dengan nilai 72,64 dan RB Tematik dengan nilai sebesar 6,99. Terdapat peningkatan nilai hampir di semua indikator RB General sehingga skor indeks meningkat 6,6 dari tahun 2023. Adapun RB Tematik pada Tahun 2024 Kemenpora berkontribusi pada kelima tema dari yang sebelumnya hanya dua tema.

#### 1. Pengentasan Kemiskinan

Kemenpora berkontribusi dalam upaya peningkatan taraf hidup pemuda kategori P3KE. Kontribusi ini diwujudkan melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi kewirausahaan serta kemandirian pemuda, dengan fokus pada pemberian keterampilan dan dukungan untuk memulai usaha.

Kemenpora melaksanakan Pelatihan *Youth Edulife Skill* bagi pemuda miskin yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Kementerian Sosial. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi strategis dengan Dinas Sosial terkait di masing-masing Kota/Kabupaten.

## 2. Realisasi Investasi

Kemenpora berupaya meningkatkan investasi di sektor olahraga melalui berbagai inisiatif strategis, salah satunya adalah memberikan bantuan untuk penyelenggaraan *event* olahraga tingkat nasional dan regional. Langkah ini diambil dengan tujuan ganda: memperkuat ekosistem olahraga nasional dan menarik investor untuk mendukung pengembangan industri olahraga yang berkelanjutan.

Dukungan finansial dan fasilitasi ini diharapkan dapat menciptakan kompetisi yang berkualitas, meningkatkan daya tarik olahraga bagi masyarakat dan pihak swasta, serta membuka peluang bisnis yang lebih luas. Selain itu, bantuan ini juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan prestasi atlet dan pengembangan infrastruktur olahraga, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Gambar 3.4 Dampak ekonomi event olahraga



## 3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Penanganan Stunting

Kemenpora secara aktif mendukung program penanganan *stunting* dengan mempromosikan budaya olahraga kepada masyarakat luas. Inisiatif ini

didasarkan pada pemahaman bahwa olahraga memiliki peran krusial dalam menunjang kesehatan fisik, termasuk meningkatkan kualitas gizi dan pertumbuhan anak, yang merupakan bagian esensial dari upaya pencegahan *stunting*.

Melalui kampanye ini, Kemenpora mendorong masyarakat untuk mengintegrasikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti senam massal, lomba olahraga tradisional, dan sosialisasi tentang pentingnya olahraga bagi kesehatan keluarga, bertujuan untuk mencapai tujuan ini. Dengan menerapkan pendekatan yang inklusif, Kemenpora berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai investasi kesehatan jangka panjang, dan dengan demikian, berkontribusi pada pencapaian target pengurangan angka *stunting* di Indonesia.

#### 4. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kemenpora telah menunjukkan komitmen kuat dalam memajukan produk dalam negeri sebagai bagian dari strategi nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan melalui berbagai implementasi nyata. Kemenpora memprioritaskan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk fasilitas sarana olahraga. Selain itu, Kemenpora aktif menggalakkan kampanye produk dalam negeri melalui kemitraan dengan industri lokal, yang mencakup penyediaan perlengkapan olahraga, *merchandise*, dan infrastruktur pendukung.

Langkah strategis ini memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha domestik dan sekaligus menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap produk Indonesia. Dengan fokus pada inovasi dan kerja sama strategis, Kemenpora berhasil membentuk ekosistem yang mendukung keberlanjutan industri lokal. Kemenpora juga menjadi contoh nyata bagi institusi lain dalam memanfaatkan potensi produk dalam negeri sebagai motor utama pembangunan.

#### 5. Pengendalian Inflasi

Kemenpora berkomitmen menangani inflasi dengan program kepeloporan pemuda dalam inovasi pangan dan kewirausahaan. Upaya ini melibatkan generasi muda dalam peningkatan produktivitas sektor pangan melalui

teknologi dan kreativitas. Kemenpora membekali pemuda dengan keterampilan dan pengetahuan untuk solusi pengelolaan pangan melalui pelatihan, pendampingan, dan akses sumber daya.

Fasilitasi kewirausahaan menghasilkan pelaku usaha baru yang membuka lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga dengan menyediakan produk berkualitas. Program ini berdampak signifikan pada peningkatan ketahanan pangan lokal, penciptaan ekosistem usaha dinamis, dan kontribusi nyata dalam pengendalian harga pasar. Kemenpora berperan penting memperkuat ekonomi nasional dan mengoptimalkan potensi pemuda sebagai motor perubahan.

## **B. UPAYA DAN KENDALA**

### **1. Upaya**

Upaya Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 yaitu telah mengidentifikasi dukungan program, indikator kegiatan dan rencana aksi yang diproyeksikan menjawab permasalahan tema-tema nasional dalam RB seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dalam upaya penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan penurunan inflasi. Untuk itu telah disusun Rencana Aksi pencapaian RB oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga baik secara general maupun tematik yang relevansinya terbukti kuat berdampak bagi masyarakat, didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

1. Penyederhanaan kelembagaan telah dilakukan melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kelembagaan Kemenpora diharapkan menjadi tepat ukuran, tepat fungsi serta mempercepat proses prosedural pengambilan keputusan di dalam birokrasi.
2. Kemenpora melakukan proses deregulasi dan debirokratisasi yang memiliki tujuan utama untuk membangun sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan. Penyederhanaan regulasi dalam mendukung pelaksanaan UU Kepemudaan dan UU Sistem Keolahragaan Nasional juga telah dilakukan melalui peraturan-peraturan turunannya, baik berkaitan dengan pembangunan kepemudaan maupun pembangunan keolahragaan
3. Penyediaan dukungan teknologi dan informasi serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran. Pembenahan telah dilakukan

- pada beberapa sektor, khususnya kepegawaian dan layanan digitalisasi terkait data dan informasi pelayanan.
4. Pelaksanaan jumlah kerja sama baik luar negeri maupun dalam negeri yang dilakukan harus benar-benar memberikan manfaat baik bagi program maupun masyarakat yang terdampak.
  5. Penyesuaian sistem kerja dalam rangka penyederhanaan birokrasi dan implementasi sistem kerja menggunakan mekanisme tim kerja berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 3 Tahun 2024;
  6. Penyusunan kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenpora berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 97 Tahun 2024;
  7. Pilot Project kebijakan manajemen talenta Kemenpora
  8. Monitoring dan evaluasi kinerja individu dan monitoring capaian dan renaksi kinerja organisasi dilakukan setiap bulan melalui aplikasi e-kinerja Kemenpora
  9. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri sesuai Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022.

## 2. Kendala

Kinerja RB di Kemenpora masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait belum optimalnya integrasi antara SPBE, SAKIP, dan perencanaan kinerja, sehingga arah program belum sepenuhnya didukung data dan evidence yang memadai. Pada aspek RB General, pengelolaan SDM belum sepenuhnya menerapkan prinsip merit karena pemetaan kompetensi, manajemen talenta, serta digitalisasi proses bisnis belum berjalan merata di seluruh unit. Selain itu, penyusunan SOP dan layanan internal masih bersifat parsial dan belum terotomasi, sementara pengawasan internal melalui SPIP belum sepenuhnya berbasis risiko dan tindak lanjut rekomendasi audit masih terlambat. Inovasi pelayanan publik juga belum memiliki standar yang seragam dan belum terintegrasi dalam arsitektur layanan digital Kemenpora, sehingga peningkatan kualitas layanan belum signifikan.

Pada pelaksanaan RB Tematik, khususnya terkait hilirisasi olahraga dan kontribusi program terhadap penurunan kemiskinan ekstrem, masih terdapat sejumlah kendala yang signifikan. Basis data kinerja meliputi data atlet, sport science, industri olahraga, hingga dampak ekonomi kegiatan olahraga belum

sepenuhnya kuat sehingga pengukuran outcome belum dapat dilakukan secara optimal. Sinergi lintas unit dan lintas pemangku kepentingan juga belum terbangun secara solid, menyebabkan program tematik belum menghasilkan value chain yang memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat sosial yang terukur. Selain itu, model bisnis pemanfaatan aset olahraga belum dikembangkan secara sistematis, sehingga potensi value creation melalui BLU, kemitraan, maupun penguatan ekosistem olahraga belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator RB Tematik. Variasi kapasitas unit teknis dalam pengolahan data tematik turut berdampak pada proses monitoring dan evaluasi, yang hingga kini belum secara konsisten menunjukkan kontribusi nyata terhadap hilirisasi olahraga maupun penurunan kemiskinan ekstrem.

### C. OUTCOME

Implementasi RB di Kemenpora menghasilkan sejumlah outcome yang berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Tata kelola birokrasi semakin efektif dan efisien melalui penyederhanaan proses bisnis, penguatan koordinasi lintas-unit, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung manajemen kinerja dan proses pengambilan keputusan. Kualitas layanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan juga menunjukkan perbaikan melalui peningkatan standardisasi layanan, mekanisme pengaduan yang lebih responsif, serta peningkatan profesionalisme SDM yang mendorong layanan lebih cepat, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kemenpora juga mencatat keberhasilan RB melalui dua terobosan utama, yaitu RB Tematik Hilirisasi Olahraga dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada aspek hilirisasi, Kemenpora berhasil mendorong pertumbuhan rantai nilai industri olahraga melalui peningkatan sertifikasi TKDN, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta penyediaan database produk olahraga dalam negeri sebagai acuan dalam kebijakan pengadaan nasional.

Sementara itu, pada agenda pelayanan publik, Kemenpora meningkatkan transparansi dan responsivitas layanan melalui penguatan standar pelayanan, optimalisasi kanal pengaduan digital, serta peningkatan kepatuhan terhadap penilaian Ombudsman. Kedua agenda ini menunjukkan bahwa penerapan RB tidak hanya memperbaiki tata kelola internal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di sektor kepemudaan dan keolahragaan.

#### D. NILAI EFISIENSI

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi, tingkat efisiensi dinilai berdasarkan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dan capaian kinerja yang dihasilkan. Kemenpora mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000 untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.984.890.250 atau 99,24%. Dengan capaian kinerja sebesar 99,93%, tingkat efisiensi yang diperoleh tercatat sebesar 1,006. Hasil ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000 yang dialokasikan untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,4 belum sepenuhnya digunakan secara efisien.

Tabel 3.2 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan dalam Indeks Reformasi Birokrasi

Uraian Sasaran Program/Komponen		Belanja		
		Anggaran	Realisasi	%
6972.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2.000.000.000	1.984.890.250	99,24%

#### E. ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2024, Kemenpora memperoleh Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,35, yang menunjukkan capaian kinerja reformasi birokrasi pada kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan komitmen Kemenpora dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Jika dibandingkan dengan beberapa kementerian lain sebagai benchmark, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora berada pada posisi yang kompetitif. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat indeks sebesar 81,60, dan Kementerian PPN/Bappenas sebesar 81,90, yang relatif lebih tinggi namun masih berada dalam rentang capaian yang sebanding. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM memperoleh indeks sebesar 76,01, lebih rendah dibandingkan Kemenpora.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di KKemenpora telah berada di atas rata-rata beberapa kementerian, serta mendekati capaian kementerian dengan karakter perencanaan dan kebijakan strategis. Ke depan, capaian ini menjadi modal penting untuk terus memperkuat kualitas implementasi reformasi birokrasi, khususnya dalam

peningkatan kinerja berbasis hasil, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **F. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA**

Upaya perbaikan kinerja RB General difokuskan pada penguatan tata kelola internal dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Integrasi antara SPBE, SAKIP, dan perencanaan kinerja diperbaiki melalui pengembangan proses bisnis berbasis digital serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan SDM diperkuat melalui penyusunan peta kompetensi, pengembangan manajemen talenta, serta peningkatan digitalisasi layanan kepegawaian. Selain itu, penguatan pengawasan internal dilakukan melalui penerapan SPIP berbasis risiko yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja, sehingga akuntabilitas dan efektivitas kinerja organisasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Perbaikan kinerja RB Tematik diarahkan untuk memastikan birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Penajaman perencanaan kinerja dilakukan dengan menyelaraskan sasaran, indikator, dan program prioritas berbasis isu strategis kepemudaan dan olahraga, didukung oleh data dan evidence yang terukur. Inovasi kebijakan dan layanan publik dikembangkan secara tematik untuk menjawab kebutuhan pemuda dan insan olahraga, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan tersebut, RB Tematik tidak hanya berfokus pada perbaikan proses birokrasi, tetapi juga pada pencapaian outcome pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

## 3.1.2 NILAI SAKIP KEMENPORA



Gambar 3.5 Nilai SAKIP Kemenpora

### A. CAPAIAN KINERJA

Nilai SAKIP Kemenpora merefleksikan tingkat kualitas penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil (*result oriented government*) dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perkembangan nilai SAKIP Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan **tren peningkatan secara bertahap**. Pada tahun 2022, nilai SAKIP tercatat sebesar **67,03**, meningkat menjadi **67,73** pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi **68,08** dengan kategori **“Baik”**. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tabel 3.3 Perkembangan Nilai SAKIP Kemenpora

Komponen Penilaian	Bobot 2022 - 2024	2020	2021	2022	2023	2024 (Internal)
Perencanaan Kinerja	30%	21.15	21.22	21.04	21.19	21.230
Pengukuran Kinerja	30%	13.61	13.66	16.69	16.94	17.10
Pelaporan Kinerja	15%	12.09	12.14	12.00	12.15	12.19
Evaluasi AKIP Internal	25%	7.76	7.89	17.30	17.45	17.56
Capaian Kinerja		12.96	13.02	-	-	-
Nilai Total	100%	67.57	67.93	67.03	67.73	68.08

Pada tahun 2025, nilai SAKIP yang digunakan masih mengacu pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024, mengingat proses evaluasi SAKIP Tahun 2025 oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi belum ditetapkan pada periode pelaporan. Dengan demikian, capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Tahun 2025 tercatat sebesar **68,08 poin** terhadap target **70 poin**, atau mencapai **97,25%**. Secara *year-on-year*, nilai SAKIP Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar **0,80 poin** atau **1,11%** dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya perbaikan implementasi SAKIP melalui penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja yang dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data telah memberikan dampak positif, meskipun masih diperlukan langkah perbaikan lanjutan untuk mencapai target yang ditetapkan.

## B. UPAYA DAN KENDALA

### 1. Upaya

Beberapa faktor kunci yang mendukung capaian kinerja tahun 2025, Kemenpora telah melakukan langkah-langkah administratif dan sistemik untuk memperbaiki manajemen kinerja:

1. Koordinasi dan pembinaan penyusunan dokumen perencanaan dan kinerja secara berjenjang, mulai dari Renstra, Perjanjian Kinerja, hingga rencana aksi kinerja unit kerja.
2. Menerbitkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja sebagai pedoman operasional di seluruh unit kerja. Regulasi ini menjadi instrumen kunci untuk memastikan bahwa setiap unit kerja ke depan harus melakukan analisis keberhasilan dan kegagalan secara lebih mendalam, serta memastikan adanya kaitan logis (pohon kinerja) antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Memperkuat pengendalian internal melalui sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan melakukan evaluasi mandiri (AKIP internal) terhadap unit-unit Eselon I.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja dalam mendukung proses perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, termasuk untuk memantau rencana aksi dan pengisian data capaian kinerja secara berkala.
5. Melakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra) dengan target operasional tahunan.
6. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, khususnya pada aspek perbaikan kualitas perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.

Sedangkan integrasi implementasi SAKIP di seluruh unit kerja diupayakan melalui :

1. Sinkronisasi Kebijakan:  
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda melakukan penyesuaian target indikator dengan mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres Nomor 52 Tahun 2023).
2. Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON): Fokus pada pembinaan atlet melalui Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS) untuk meningkatkan prestasi di tingkat internasional.

3. Melakukan pemantauan rutin terhadap indikator Sport Development Index (SDI) dan memberikan penjelasan teknis mengenai metode pengambilan data sampling untuk memastikan validitas capaian kinerja.
4. Peningkatan Kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan pengembangan kompetensi sebagai bentuk reward bagi pegawai yang berkinerja baik.
5. Koordinasi Lintas Sektor dengan merancang sistem pengumpulan data kinerja yang lebih andal untuk mengukur indeks pembangunan pemuda secara lebih akurat.

## 2. Kendala

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SAKIP, antara lain:

- **Belum terstandarisasinya implementasi SAKIP pada seluruh unit kerja**, sehingga kualitas penerapan AKIP belum merata.
- **Arsitektur dan penjenjangan kinerja (cascading)** belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.
- **Koordinasi antar unit kerja** dalam siklus manajemen kinerja belum optimal, khususnya pada tahapan pengukuran dan evaluasi kinerja.
- **Keterbatasan kompetensi SDM pengelola AKIP internal**, baik dari sisi pemahaman regulasi maupun kemampuan teknis.

Kendala tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target nilai SAKIP.

### Analisis Faktor Kegagalan

Analisis terhadap ketidaktercapaian target ini mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama :

#### Perencanaan yang Kurang Realistis

Ditemukan bahwa penetapan target pada awal tahun belum sepenuhnya mempertimbangkan tren capaian historis, sehingga terdapat indikator yang targetnya ditetapkan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya, yang berdampak pada penilaian kualitas perencanaan.

#### Kualitas Pelaporan Berkala

Selain itu, laporan kinerja yang selama ini masih disusun Laporan kinerja masih disusun secara tahunan dan belum rutin dilakukan secara triwulanan atau semesteran mengakibatkan pemantauan terhadap hambatan dan efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilakukan secara real-time atau triwulanan. Dokumen pelaporan belum sepenuhnya memuat analisis mendalam mengenai

hambatan, upaya nyata perbaikan, maupun analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk setiap indikator. Hal ini menyebabkan penilaian bobot "C" pada lembar kerja evaluasi.

### **Tindak Lanjut Rekomendasi**

Masih terdapat rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP internal tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh unit kerja. Melalui komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi internal, Kemenpora optimis dapat meningkatkan predikat akuntabilitas kinerjanya pada periode mendatang

## **C. OUTCOME**

Sepanjang tahun 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah berhasil mentransformasi tata kelola organisasi dari orientasi administratif menjadi orientasi hasil (outcome-oriented). Hal ini tercermin dalam beberapa pencapaian strategis sebagai berikut:

### **1. Optimalisasi Tata Kelola (Nilai SAKIP)**

Kemenpora berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dengan Nilai SAKIP sebesar 68.08 (Kategori BB). Pencapaian ini merupakan hasil dari integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang lebih presisi, di mana setiap rupiah anggaran dipastikan berkontribusi langsung pada indikator kinerja utama (IKU).

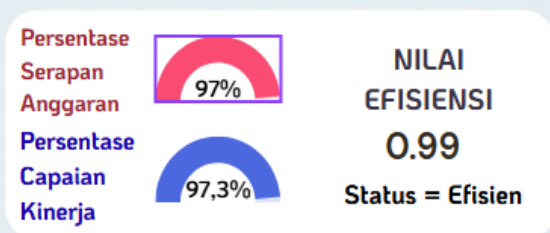
### **2. Dampak Strategis pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

Pencapaian SAKIP tahun 2025 tidak hanya diukur secara angka, namun terlihat pada efektivitas program di lapangan, yaitu :

**Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP):** Melalui sinkronisasi program lintas sektoral, Kemenpora berhasil meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam sektor ekonomi kreatif dan kepemimpinan nasional.

**Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional:** Implementasi DBON yang lebih akuntabel menghasilkan peningkatan tingkat kebugaran masyarakat serta efisiensi pembinaan atlet elite, yang dibuktikan dengan capaian prestasi pada ajang internasional tahun 2025.

#### D. NILAI EFISIENSI



Integrasi nilai efisiensi tersebut ke dalam penilaian SAKIP Kemenpora menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan anggaran yang linear dengan pencapaian target strategis kementerian di bidang pemuda dan

olahraga. Dengan Nilai Efisiensi 0,99 dan Capaian Kinerja 97,3%, Kemenpora berhasil membuktikan bahwa realisasi program tidak hanya sekadar menyerap anggaran (97%), tetapi juga mampu meminimalisir pemborosan dan memastikan setiap alokasi dana memberikan dampak nyata pada indikator kinerja utama. Konsistensi antara serapan dan output ini menjadi poin krusial dalam komponen penguatan akuntabilitas SAKIP, yang berpotensi mempertahankan atau meningkatkan predikat nilai SAKIP Kemenpora melalui perbaikan tata kelola yang berorientasi pada hasil (result-oriented government) serta efisiensi belanja birokrasi.

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan	EBD	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen,	952	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	19.962.316.000	18.872.263.954	94,54%	1	1	100,00%
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	EBD	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	3.000.000.000	2.981.933.687	99,40%	1	1	100,00%

Tabel 3.4 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan dan Nilai SAKIP Kemenpora

#### E. ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta data kinerja tahun 2025, Kemenpora berada pada posisi "Sangat Baik" namun masih memiliki celah kompetitif dengan kementerian papan atas yang sudah mencapai predikat "A" atau "AA".

Berikut adalah tabel perbandingan nilai SAKIP untuk memberikan gambaran posisi Kemenpora di level nasional:

Kategori	Instansi / Entitas	Nilai SAKIP (Predikat)	Status / Posisi Kemenpora
Kementerian Terbaik	Kementerian Luar Negeri	85,73 (A)	Di bawah (Selisih ~8-10 poin)
Kementerian Terbaik	Kementerian Keuangan	83,36 (A)	Di bawah (Selisih ~6-8 poin)
Provinsi Terbaik	D.I. Yogyakarta	AA (Istimewa)	Di bawah (Level Regional Tertinggi)
Kemenpora (Target)	Kemenpora RI	68.08 (BB)	Posisi Menengah
Rerata Nasional	Seluruh K/L	~65 - 71 (B)	Di Atas Rerata Nasional

Tabel 3.5 Perbandingan Nilai SAKIP Kemenpora dengan KL lain

Kemenpora saat ini berada pada kuadran akselerasi, dibandingkan dengan instansi benchmark seperti Kemenlu atau Kemenkeu, Kemenpora masih perlu melakukan penguatan pada aspek budaya kinerja digital dan integrasi perencanaan lintas deputy agar setiap program pemuda dan olahraga memiliki dampak ekonomi yang terukur secara makro.

### Analisis Posisi Kemenpora

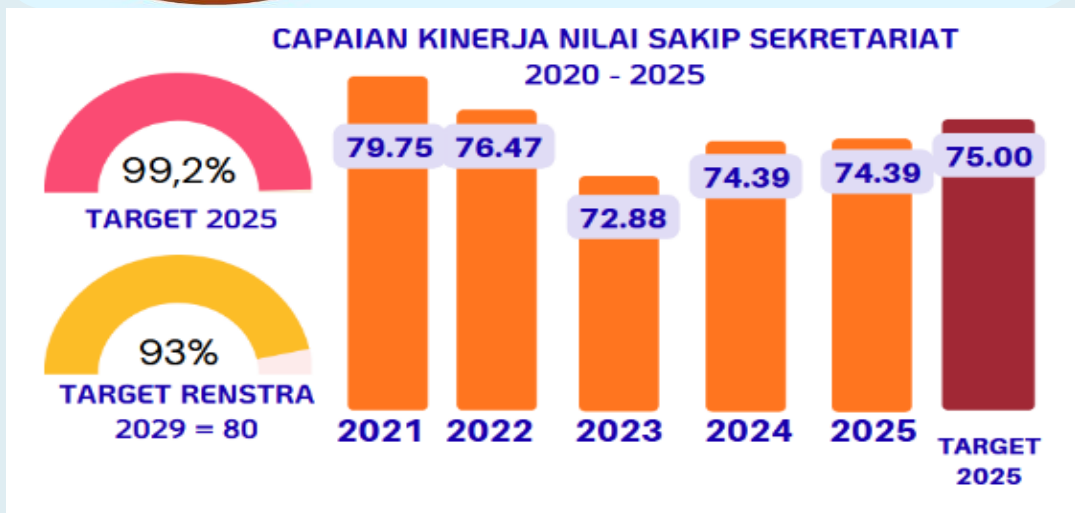
Kemenpora secara konsisten berada sedikit di atas rata-rata nasional instansi pemerintah yang menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas Kemenpora sudah mampu menghubungkan antara penggunaan anggaran dengan hasil (outcome), namun masih perlu penguatan dalam efektivitas dan efisiensi birokrasi yang lebih dalam untuk menembus level "A". Tantangan yang dihadapi di 2025 adalah adanya transisi SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) baru di tahun 2025 menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menata ulang indikator kinerja agar lebih tajam dan berdampak.

## F. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan mendukung pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- **Meningkatkan standardisasi implementasi SAKIP** pada seluruh unit kerja melalui pedoman teknis dan pembinaan berkelanjutan.
- **Menyempurnakan arsitektur dan cascading kinerja** agar sepenuhnya selaras dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021.
- **Memperkuat koordinasi lintas unit kerja** dalam seluruh siklus manajemen kinerja.
- **Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola AKIP**, melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
- **Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kinerja**, guna mendukung pengelolaan kinerja yang terintegrasi, akurat, dan berorientasi hasil.

## NILAI PM SAKIP SEKRETARIAT KEMENPORA



Gambar 3.6 Nilai PM SAKIP SEKRETARIAT Kemenpora

### A. CAPAIAN KINERJA

Indikator Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 ditetapkan dengan **target sebesar 75**. PM SAKIP dilaksanakan sebagai instrumen penguatan akuntabilitas kinerja internal Sekretariat Kemenpora, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP serta Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 133 Tahun 2024 tentang Manajemen Kinerja di Kemenpora.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri SAKIP, Sekretariat Kemenpora memperoleh nilai **74,39** pada **Tahun 2024**, **meningkat dibandingkan capaian Tahun 2023** sebesar **72,88**. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan manajemen kinerja, khususnya pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja.

Secara komponen, nilai PM SAKIP Sekretariat Kemenpora Tahun 2024 didukung oleh capaian Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja yang relatif baik, mencerminkan semakin meningkatnya keselarasan antara dokumen

perencanaan, indikator kinerja, serta proses pemantauan capaian kinerja melalui sistem informasi kinerja yang tersedia. Sementara itu, komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih memerlukan penguatan agar hasil evaluasi kinerja dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target numerik Tahun 2025, capaian nilai 74,39 menempatkan tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat Kemenpora pada kategori B, yang mencerminkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan arah perbaikan yang konsisten. Capaian ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kesekretariatan di lingkungan Kemenpora.

Tabel 3.6 Nilai PM SAKIP Sekretariat Kemenpora

Komponen Penilaian		Bobot	Nilai 2024
a	Perencanaan Kinerja	30	23,91
b	Pengukuran Kinerja	30	28,44
c	Pelaporan Kinerja	15	10,96
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,08
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,39
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

## B. UPAYA DAN KENDALA

### 1. Upaya

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan PM SAKIP, Sekretariat Kemenpora telah melaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain:

- **Pelaksanaan reviu dan pembahasan Perjanjian Kinerja Sekretariat serta unit organisasi eselon II** untuk memastikan keselarasan sasaran, indikator, dan target kinerja.
- **Diseminasi Pedoman Manajemen Kinerja** guna mendorong integrasi perencanaan kinerja dan penguatan pemahaman manajemen kinerja di seluruh unit kerja Sekretariat.

- **Penyusunan Manual Indikator Kinerja (MIK)** Sekretariat Kemenpora Tahun 2025–2029 sebagai acuan dalam perumusan indikator yang terukur, relevan, dan berorientasi hasil.
- **Penginputan, pemantauan, dan reviu data** capaian kinerja secara berkala melalui Aplikasi e-Kinerja Kemenpora dan e-Monev Bappenas.
- **Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Tahun 2024** yang memenuhi prinsip SMART dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kinerja.

## 2. Kendala

Dalam pelaksanaannya, PM SAKIP Sekretariat Kemenpora masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

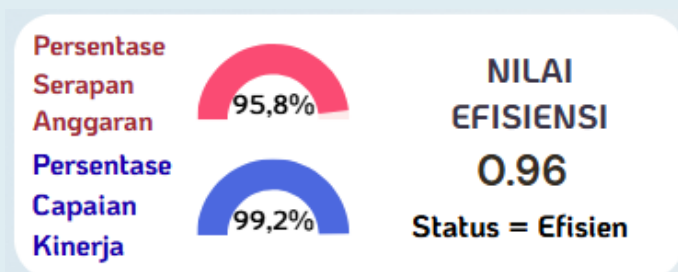
- Belum optimalnya pemetaan kontribusi output Sekretariat terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpora, sehingga sebagian indikator belum sepenuhnya mencerminkan peran strategis Sekretariat.
- Variasi kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan antarbagian, terutama terkait kelengkapan dan validitas evidence pendukung.
- Kapasitas SDM pengelola kinerja yang belum merata, khususnya dalam penyusunan analisis capaian kinerja dan penilaian efektivitas anggaran.
- Sistem data kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga proses verifikasi masih memerlukan pengecekan manual.
- Koordinasi lintas bagian dalam konsolidasi dokumen pendukung PM SAKIP yang belum optimal, berdampak pada ketidakkonsistenan hasil penilaian mandiri.

## C. OUTCOME

Outcome SAKIP Sekretariat Kemenpora diarahkan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil melalui penguatan akuntabilitas di setiap lini organisasi. Dengan pencapaian nilai akumulasi sebesar 74.39 atau kategori B (Baik) pada tingkat Eselon I, Sekretariat telah berhasil membangun sistem manajemen kinerja yang fungsional, mencakup perencanaan yang selaras dengan mandat kementerian hingga publikasi dokumen strategis secara tepat waktu. Keberhasilan ini berdampak pada meningkatnya transparansi informasi kinerja dan efektivitas koordinasi antarunit kerja, yang didukung oleh pemanfaatan aplikasi digital untuk pemantauan rencana aksi secara berkala.

Meskipun menunjukkan tren positif, outcome SAKIP ini masih memerlukan penyempurnaan pada aspek kedalaman analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai target yang lebih tinggi seperti predikat BB. Upaya perbaikan difokuskan pada pemanfaatan realisasi kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan target yang lebih realistis serta penguatan analisis faktor penghambat dalam pelaporan kinerja. Dengan mengintegrasikan hasil evaluasi internal ke dalam kebijakan strategis, Sekretariat berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola tidak hanya terserap secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi pengembangan kepemudaan dan prestasi olahraga nasional.

#### D. NILAI EFISIENSI



Pencapaian Nilai Efisiensi yang secara konsisten berada pada status "Efisien" dengan rentang skor 0,96 menjadi indikator krusial dalam mendukung capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kemenpora sebesar 98,57.

Meskipun angka ini sedikit di bawah target 99,41, korelasi data menunjukkan bahwa pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berjalan dengan manajemen sumber daya yang sangat optimal. Efisiensi tersebut tercermin dari kemampuan PPID dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi berkualitas tinggi dengan serapan anggaran yang sangat terukur di angka 95,8%, namun tetap mampu menghasilkan output layanan informasi yang masif dan akuntabel. Hal ini membuktikan bahwa operasional layanan informasi publik di Kemenpora tidak terjebak pada pemborosan anggaran, melainkan fokus pada efektivitas sistem digital dan responsivitas petugas, sehingga mampu mendekati target indeks KIP nasional secara kompetitif melalui tata kelola yang ramping namun berdampak luas bagi publik.

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	419.560.000	401.958.836	95,80%	1	1	100,00%

Tabel 3.7 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora

## E. ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Perbandingan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP dengan satuan kerja :

Tabel 3.8 Perbandingan capaian kinerja hasil evaluasi AKIP dengan satuan kerja

No	Komponen	Bobot	Sekret	Deputi 1	Deputi 2	Deputi 3	Deputi 4	LPDUK
1	Perencanaan Kinerja	30	23.91	20.26	20.81	21.98	21.91	18.6
2	Pengukuran Kinerja	30	28.44	27.65	26.24	28.51	27.37	22.94
3	Pelaporan Kinerja	15	10.96	11.54	12.43	11.59	11.92	5.03
4	Evaluasi AKIP	25	11.08	11.08	11.08	11.08	11.08	8.25
			74.39	69.63	70.56	73.16	72.78	54.82

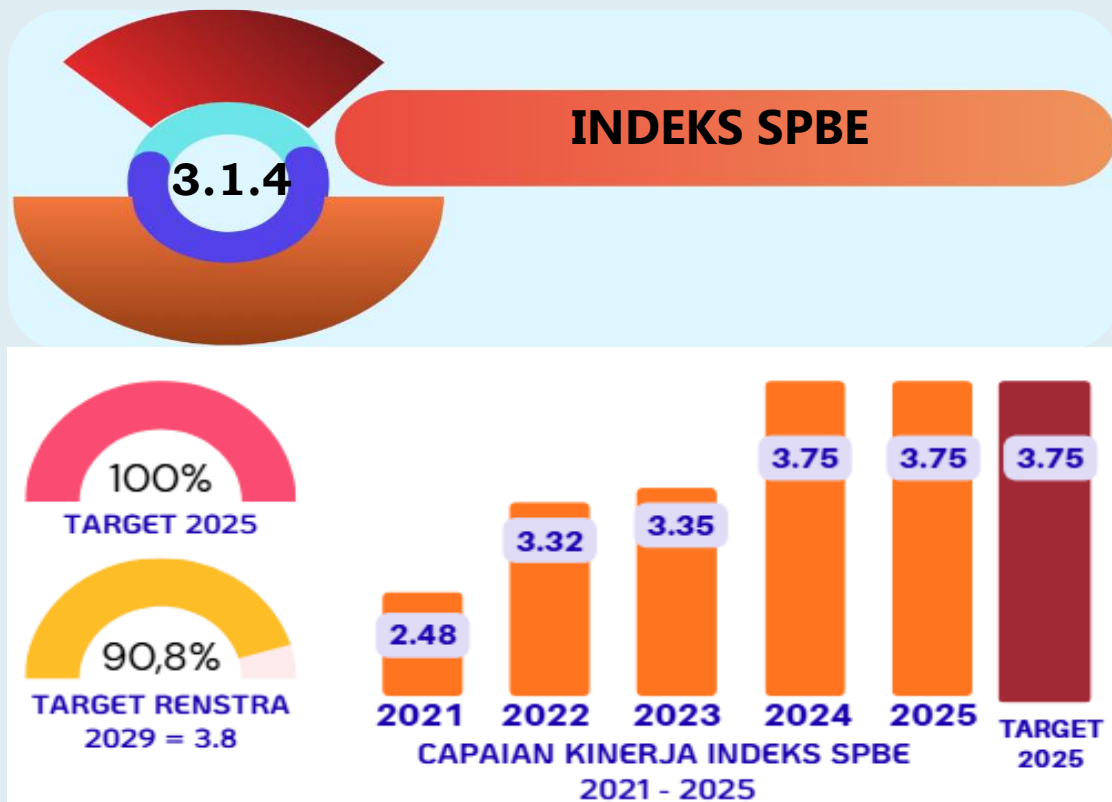
Secara keseluruhan, Sekretariat menempati posisi tertinggi dalam pencapaian nilai AKIP dibandingkan seluruh Deputi dan LPDUK dengan total nilai 74,39. Sekretariat menunjukkan dominasi pada beberapa komponen utama, namun juga memiliki area yang perlu ditingkatkan dibandingkan deputi lain:

- Perencanaan Kinerja (Bobot 30): Sekretariat meraih nilai tertinggi yaitu 23,91. Angka ini jauh mengungguli Satker lain, dengan selisih yang cukup lebar dibandingkan Deputi 1 yang memiliki nilai terendah di kategori deputi (20,26).
- Pengukuran Kinerja (Bobot 30): Sekretariat meraih nilai 28,44. Meskipun sangat tinggi, nilai ini sedikit di bawah Deputi 3 yang memimpin di komponen ini dengan nilai 28,51.
- Pelaporan Kinerja (Bobot 15): Pada komponen ini, Sekretariat justru berada di posisi menengah ke bawah dengan nilai 10,96. Capaian ini lebih rendah dibandingkan seluruh Deputi (1, 2, 3, dan 4), di mana Deputi 2 meraih nilai tertinggi yaitu 12,43.
- Evaluasi AKIP (Bobot 25): Seluruh Deputi dan Sekretariat memiliki nilai yang sama.

## F. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Sebagai upaya peningkatan kinerja dan pencapaian target PM SAKIP pada tahun berikutnya, rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

- **Memperkuat pembinaan dan pendampingan manajemen kinerja** kepada seluruh unit kerja Sekretariat secara berkelanjutan.
- **Meningkatkan kualitas perumusan indikator kinerja dan pemetaan kontribusi output** Sekretariat terhadap sasaran strategis Kemenpora.
- **Mengoptimalkan integrasi sistem informasi kinerja** untuk mendukung validitas data dan efisiensi proses monitoring serta evaluasi.
- **Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi PM SAKIP** sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan



Gambar 3.7 Indeks SPBE Kemenpora

#### A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menunjukkan performa kinerja yang sangat impresif dengan pencapaian Indeks SPBE sebesar 3,75. Angka ini menempatkan Kemenpora pada predikat "Sangat Baik" dan mencerminkan keberhasilan institusi dalam melampaui target kinerja tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 3,40, atau setara dengan tingkat capaian sebesar 110%. Secara historis, capaian tahun 2024 merupakan titik puncak dari tren pertumbuhan positif yang konsisten selama enam tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang memiliki nilai 3,35, Kemenpora berhasil mencatatkan kenaikan signifikan sebesar 0,40 poin. Pertumbuhan ini terlihat sangat kontras jika ditarik jauh ke belakang hingga tahun 2019, di mana saat itu indeks Kemenpora hanya berada di angka 1,5.

Analisis lebih mendalam pada struktur penilaian menunjukkan bahwa kekuatan utama kinerja Kemenpora terletak pada aspek regulasi dan layanan:

- Domain Kebijakan SPBE: Mencapai skor sempurna 5,00, yang mengindikasikan bahwa seluruh fondasi pengaturan internal, mulai dari arsitektur hingga manajemen data, telah dipenuhi secara menyeluruh.
- Domain Layanan SPBE: Meraih skor 3,80, di mana layanan administrasi pemerintahan internal (seperti perencanaan, keuangan, dan kepegawaian) serta layanan publik (seperti pengaduan dan data terbuka) telah berjalan dengan tingkat kematangan yang tinggi.
- Domain Tata Kelola dan Manajemen: Masing-masing mencatatkan nilai 3,50 dan 3,00, yang menunjukkan bahwa struktur koordinasi, infrastruktur teknologi informasi, serta penerapan manajemen risiko dan keamanan informasi telah diimplementasikan secara terstruktur.

Pencapaian indeks 3,75 ini juga memosisikan Kemenpora jauh di atas rata-rata indeks SPBE Nasional yang berada pada angka 3,12. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata indeks kategori Kementerian secara umum yang mencapai 4,03, Kemenpora masih memiliki ruang pertumbuhan untuk mencapai predikat "Memuaskan" di masa mendatang.

## B. UPAYA DAN KENDALA

Kemenpora telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memperkuat ekosistem digitalnya, yang mencakup aspek regulasi, infrastruktur, dan integrasi layanan :

1. Penguatan Landasan Hukum dan Kebijakan: Kemenpora telah menetapkan regulasi utama melalui Permenpora Nomor 2 Tahun 2021 dan diperbarui dengan Permenpora Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penerapan SPBE. Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 97 Tahun 2024 yang menetapkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE secara formal. Kebijakan mengenai "Satu Data" juga telah diperkuat melalui Permenpora Nomor 14 Tahun 2022.
2. Modernisasi Infrastruktur TIK: Upaya nyata terlihat dari konektivitas Layanan Pusat Data Kemenpora yang kini telah terhubung dengan Pusat Data Nasional. Di sisi jaringan, telah dilakukan interkoneksi perangkat dan topologi yang menghubungkan berbagai gedung di lingkungan Kemenpora untuk memastikan kelancaran arus informasi.
3. Integrasi dan Kolaborasi Layanan: Kemenpora telah berhasil mengintegrasikan layanan administrasinya dengan sistem nasional seperti aplikasi SatuDJA dan Krisna untuk perencanaan, serta Sakti untuk

keuangan dan pengadaan. Layanan publik juga diperkuat dengan integrasi sistem pengaduan SP4N-LAPOR!, Portal Data Terbuka, serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terhubung ke level nasional.

4. Inovasi Proses Bisnis dan Manajemen: Kemenpora telah melakukan perbaikan proses bisnis melalui Permenpora Nomor 4 Tahun 2024 sebagai bentuk inovasi efisiensi organisasi. Selain itu, manajemen risiko telah mulai diterapkan secara terstruktur dengan penunjukan resmi pemilik dan pengelola risiko.

## Kendala

Meskipun mencatat kemajuan signifikan, terdapat beberapa kendala mendasar yang menghambat optimalisasi penerapan SPBE:

1. Kesenjangan regulasi turunan  
Meskipun kebijakan tingkat menteri sudah ada, Kemenpora masih terkendala oleh belum tersedianya dokumen turunan teknis seperti Surat Edaran (SE) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mendetail untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut di lapangan.
2. Keterbatasan kompetensi SDM.  
Kendala krusial ditemukan pada aspek sumber daya manusia, di mana kompetensi spesifik di bidang Arsitektur SPBE, Keamanan Informasi, Manajemen Data, dan Infrastruktur TIK belum terpenuhi secara menyeluruh di seluruh unit kerja.
3. Belum optimalnya siklus audit dan evaluasi.  
Kegiatan audit tik (infrastruktur, aplikasi, dan keamanan) belum melibatkan pihak eksternal bersertifikasi. Selain itu, proses reviu dan evaluasi terhadap arsitektur SPBE, Peta Rencana, serta Inovasi Proses Bisnis belum dilakukan secara periodik untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan teknologi terkini.
4. Hambatan integrasi lintas instansi.  
Sistem penghubung layanan (spl) belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem instansi pusat atau daerah lainnya. Selain itu, hasil reviu terhadap layanan sat data dan jaringan intra-instansi belum ditindaklanjuti dengan perbaikan yang nyata atau koneksi ke Jaringan Intra Pemerintah nasional secara menyeluruh.
5. Kualitas konten evaluasi layanan.

Hasil evaluasi atau reviu terhadap layanan elektronik yang ada belum sepenuhnya menunjukkan konten permasalahan yang aktual dan rekomendasi perbaikan yang mendalam, sehingga optimalisasi layanan melalui help desk belum maksimal.

Secara keseluruhan, upaya Kemenpora telah membangun fondasi yang kuat secara regulasi dan infrastruktur dasar, namun kendala dalam hal detail operasional, pemenuhan kompetensi spesifik, dan konsistensi audit menjadi tantangan utama yang harus diselesaikan untuk mencapai tingkat kematangan SPBE yang lebih tinggi.

### C. Analisis Faktor Keberhasilan

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berhasil mencatatkan kinerja SPBE yang impresif pada tahun 2024 dengan raihan indeks 3,75 yang berpredikat "Sangat Baik". Capaian ini melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 3,40 (realisasi 110%) serta menunjukkan tren pertumbuhan positif yang konsisten dengan kenaikan 0,40 poin dari tahun sebelumnya. Keberhasilan ini didorong oleh fondasi regulasi yang sangat kuat dengan skor domain kebijakan sempurna (5,00), integrasi layanan administrasi dan publik ke sistem nasional seperti aplikasi Sakti, Krisna, dan SP4N-LAPOR!, serta konektivitas infrastruktur yang telah terhubung ke Pusat Data Nasional.

Secara komparatif, indeks Kemenpora sebesar 3,75 berada jauh di atas rata-rata indeks SPBE Nasional yang tercatat sebesar 3,12 dan rata-rata Pemerintah Provinsi sebesar 3,42. Meskipun demikian, angka ini masih berada sedikit di bawah rata-rata indeks kategori Kementerian secara keseluruhan yang mencapai 4,03. Kesuksesan ini merupakan buah dari sinergi strategis Tim Koordinasi SPBE dan Forum Satu Data dalam melakukan inovasi proses bisnis serta penguatan manajemen risiko di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

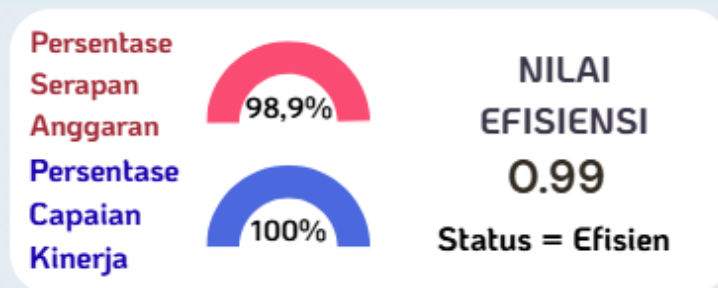
### D. OUTCOME

Pencapaian Indeks SPBE Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2024 sebesar 3,75 dengan predikat "Sangat Baik" menjadi katalisator utama dalam penguatan nilai SAKIP dan perbaikan tata kelola instansi secara menyeluruh. Keberhasilan melampaui target nasional sebesar 3,12 ini mencerminkan transformasi tata kelola yang semakin akuntabel, di mana integrasi

sistem perencanaan dan penganggaran melalui aplikasi Krisna dan Sakti telah memastikan setiap program kerja selaras dengan sasaran strategis kementerian . Penguatan ini didukung oleh fondasi regulasi yang sangat kuat, dibuktikan dengan skor sempurna 5,00 pada domain kebijakan, yang menjamin bahwa seluruh proses bisnis digital memiliki landasan hukum yang jelas dan terstruktur.

Outcome dari sinergi antara nilai SAKIP yang positif dan kematangan SPBE ini terlihat pada peningkatan efisiensi birokrasi dan transparansi layanan publik sektoral yang kini telah terintegrasi dengan sistem nasional . Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan kinerja secara real-time tidak hanya meningkatkan akurasi data kepemudaan dan keolahragaan melalui Forum Satu Data, tetapi juga memperkuat manajemen risiko di setiap unit kerja. Dengan posisi indeks yang berada di atas rata-rata Pemerintah Provinsi (3,42), perbaikan tata kelola ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenpora dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi yang berkualitas, berkesinambungan, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

#### E. NILAI EFISIENSI



Pencapaian Nilai Efisiensi 0,98 dengan status "Efisien" memiliki korelasi yang signifikan terhadap penguatan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) Kemenpora, terutama dalam aspek efisiensi birokrasi dan tata kelola digital. Keberhasilan mencapai 100% Capaian Kinerja dengan serapan anggaran sebesar 98,5% mencerminkan bahwa digitalisasi proses bisnis (core domain SPBE) telah mampu mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai target kinerja secara maksimal. Dalam kerangka SPBE, data ini menunjukkan bahwa investasi teknologi informasi dan transformasi digital di Kemenpora telah berkontribusi pada efektivitas belanja publik, di mana penggunaan aplikasi atau sistem digital mampu memangkas biaya operasional namun tetap menghasilkan output kinerja yang sempurna (100%), yang pada akhirnya akan meningkatkan poin pada aspek kematangan proses bisnis dan nilai tambah penyelenggaraan SPBE.

## F. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Secara keseluruhan, capaian indeks SPBE Kemenpora tahun 2024 sebesar 3,75 menunjukkan posisi yang sangat kompetitif di level nasional.

### Kemenpora vs Rata-Rata Kementerian

Indeks Kemenpora (3,75) saat ini masih berada di bawah rata-rata indeks kategori Kementerian yang mencapai 4,03. Meskipun demikian, Kemenpora mencatatkan keunggulan mutlak pada Domain Kebijakan SPBE dengan nilai sempurna 5,00, jauh melampaui rata-rata kementerian lainnya yang berada di angka 4,28. Selain itu, pada Domain Manajemen SPBE, Kemenpora (3,00) juga berhasil mengungguli rata-rata kementerian (2,87). Ruang peningkatan bagi Kemenpora terdapat pada Domain Tata Kelola dan Domain Layanan agar dapat setara atau melampaui rata-rata kementerian lainnya.

Tabel 3.9 Sasaran Kegiatan dan Indikator Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data Sekretariat Kemenpora 2025

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	FAB	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)	1	001 Layanan Sistem Informasi	200.000.000	196.470.000	98,24%	2	2	100,00%
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	CAN	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	1	001 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	290.000.000	285.200.000	98,34%	1	1	100,00%
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	274.624.000	272.670.215	99,29%	1	1	100,00%
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	FAB	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)	1	001 Layanan Sistem Informasi (Sistem Informasi)	365.000.000	357.360.000	97,91%	2	2	100,00%
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	CAN	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	1	001 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	300.000.000	294.000.000	98,00%	1	1	100,00%
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	1.763.209.000	1.751.088.635	99,31%	1	1	100,00%
					3.192.833.000	3.156.788.850	98,87%			

### Kemenpora vs Rata-Rata Provinsi

Kemenpora memiliki performa yang jauh lebih unggul dibandingkan rata-rata Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia. Indeks total Kemenpora (3,75) melampaui rata-rata Provinsi yang bernilai 3,42. Keunggulan ini terlihat konsisten di hampir seluruh domain, terutama pada Domain Kebijakan (selisih 1,39 poin) dan Domain Manajemen (selisih 0,83 poin). Satu-satunya area di mana rata-rata Provinsi (3,98) sedikit lebih unggul dari Kemenpora (3,80) adalah pada Domain Layanan SPBE.

### Kemenpora vs Nasional

Dibandingkan dengan rata-rata Indeks SPBE Nasional yang berada pada angka 3,12, kinerja Kemenpora menunjukkan efektivitas digitalisasi yang sangat tinggi dengan selisih mencapai 0,63 poin di atas rata-rata nasional

Tabel 3.10 Nilai Rata-rata Indeks SPBE Kemenpora

Komponen Penilaian	Kemenpora (2024)	Rata-Rata Kementerian	Rata-Rata Provinsi	Rata-Rata Nasional
Indeks SPBE Total	3,75	4,03	3,42	3,12
1. Domain Kebijakan	5,00	4,28	3,61	3,36
2. Domain Tata Kelola	3,50	3,92	3,07	2,62
3. Domain Manajemen	3,00	2,87	2,17	1,86
4. Domain Layanan	3,80	4,44	3,98	3,78

Kemenpora unggul secara signifikan dibandingkan rata-rata Provinsi dan Nasional. Fokus utama Kemenpora selanjutnya adalah mengejar keteringgalan

pada Domain Layanan dan Domain Tata Kelola untuk mencapai rata-rata kategori kementerian pusat (indeks >4,00).

## G. REKOMENDASI PERBAIKAN

Strategi Peningkatan Indeks SPBE Kemenpora

1. Akselerasi Kematangan Tata Kelola dan Manajemen (Target Skor: >4,00)  
Standardisasi Operasional: Menyusun dan menetapkan dokumen turunan teknis seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Edaran (SE) sebagai panduan implementasi dari Permenpora Nomor 7 Tahun 2022.

**Audit TIK Profesional** : Melaksanakan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE secara rutin minimal dua tahun sekali dengan melibatkan auditor eksternal yang memiliki sertifikasi resmi (Auditor TIK/Sistem Informasi).

**Penguatan Manajemen Risiko**: Melakukan reviu dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan manajemen risiko serta memastikan hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata pada tahun anggaran berikutnya.

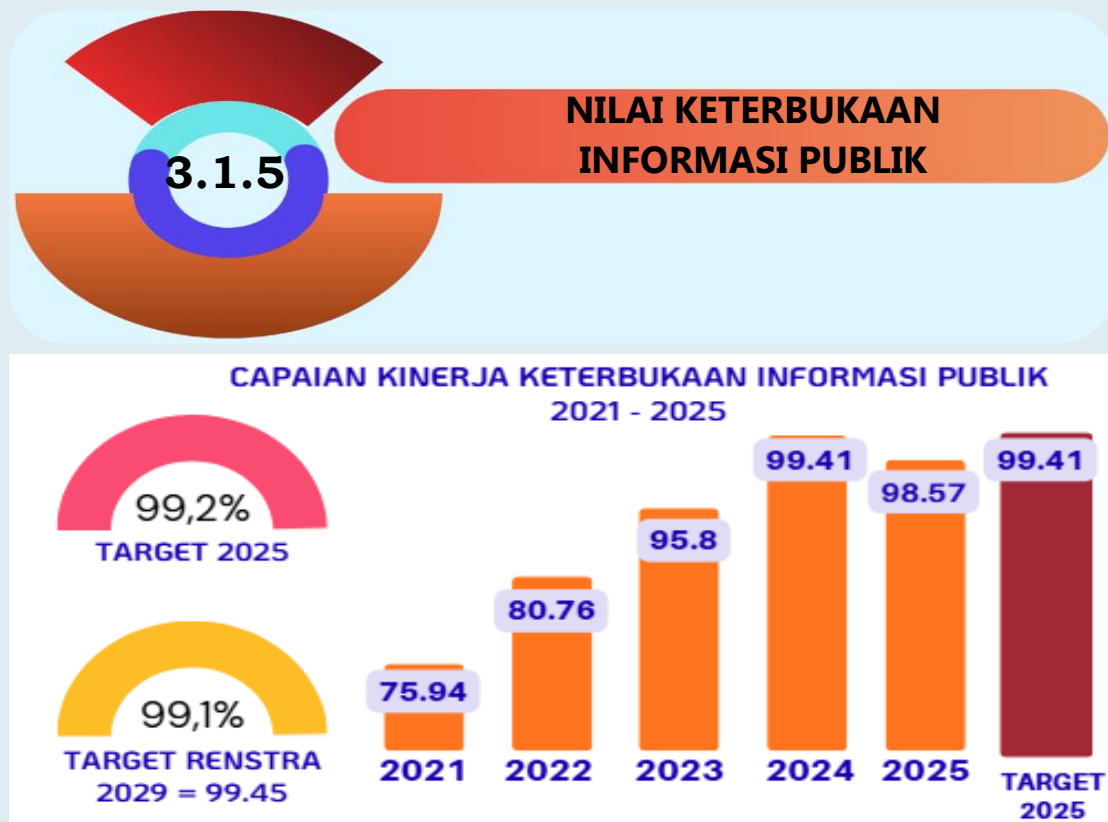
2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Target Skor: >4,00)  
Pemenuhan Kompetensi Spesifik: Menyelenggarakan program pelatihan intensif atau sertifikasi bagi SDM internal untuk memenuhi standar kompetensi di bidang Arsitektur SPBE, Keamanan Informasi, dan Manajemen Data.

**Manajemen SDM Terpadu** : Menerapkan siklus manajemen SDM SPBE secara menyeluruh, mencakup perencanaan, pengembangan, pembinaan, hingga pendayagunaan SDM di setiap unit kerja.

3. Optimalisasi Infrastruktur dan Integrasi Layanan (Target Skor: >4,50)  
Integrasi Sistem Penghubung Layanan (SPL): Mengintegrasikan SPL Kemenpora dengan Sistem Penghubung Layanan milik instansi pusat lainnya untuk memfasilitasi kolaborasi data yang lebih luas dan efisien.

**Penyempurnaan Layanan Publik Sektoral**: Menambahkan fitur kolaborasi pada aplikasi layanan publik sektoral dan melakukan perbaikan konten layanan berdasarkan hasil reviu terhadap perubahan teknologi atau kebutuhan instansi.

**Konektivitas Jaringan Nasional:** Memastikan seluruh jaringan intra-instansi di Kemenpora terhubung sepenuhnya dengan Jaringan Intra Pemerintah di tingkat nasional untuk mendukung sistem bagi pakai yang aman.



Gambar 3.8 Capaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik

#### A. CAPAIAN KINERJA

Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar **99,41**. Berdasarkan hasil **Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025** yang dilaksanakan oleh **Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia**, Kemenpora memperoleh nilai **98,57** dengan predikat **Informatif**.

Secara historis, capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Pada Tahun 2021 nilai tercatat sebesar **75,94** (Cukup Informatif), meningkat menjadi **80,76** pada Tahun

2022, kemudian melonjak menjadi **95,80** pada Tahun 2023 dengan predikat Informatif. Pada Tahun 2024, Kemenpora mencapai nilai tertinggi sebesar **99,41** dan menempati peringkat pertama nasional kategori kementerian. Pada Tahun 2025, meskipun terjadi sedikit penurunan secara numerik menjadi **98,57**, Kemenpora tetap mempertahankan predikat **Informatif** dan menempati **peringkat kedua nasional** kategori kementerian .

Capaian tersebut menempatkan Kemenpora sebagai salah satu dari **7 (tujuh) Badan Publik Terbaik Nasional**, sehingga dianugerahi **Piagam Penghargaan Arkaya Wiwarta Prajanugraha** pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi Kemenpora dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, inklusif, dan sesuai dengan ketentuan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** serta **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik** .

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target numerik yang ditetapkan, capaian nilai **98,57** tetap berada pada kategori **Sangat Baik** dan mencerminkan semakin matangnya tata kelola layanan informasi publik di lingkungan Kemenpora, sebagaimana tergambar dalam pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan PPID, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan informasi publik yang terdokumentasi dalam Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 .

## **B. UPAYA DAN KENDALA**

### **Upaya yang Dilakukan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi publik Tahun 2025, Kemenpora telah melaksanakan berbagai upaya strategis yang terdokumentasi dalam Laporan Layanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, antara lain:

1. Penetapan dan penguatan struktur **PPID Kemenpora** melalui penerbitan Keputusan Menteri dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, termasuk pembentukan PPID Utama, PPID Pelaksana, serta Petugas Layanan Informasi Publik di seluruh unit kerja .
2. Penyelenggaraan **Bimbingan Teknis Optimalisasi Layanan Informasi Publik** guna meningkatkan kapasitas, pemahaman regulasi, dan keseragaman implementasi standar layanan informasi publik bagi seluruh pengelola PPID .

3. Pemutakhiran **Daftar Informasi Publik (DIP)** dan pengelolaan informasi secara berkala, termasuk penguatan E-DIP sesuai ketentuan Peraturan Komisi Informasi.
4. Pengembangan dan restrukturisasi **website PPID Kemenpora** yang lebih informatif, terintegrasi, mudah diakses, serta dilengkapi fitur ramah disabilitas dan infografis layanan informasi publik secara *real time*.
5. Pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Internal PPID** secara rutin untuk menilai ketersediaan informasi, tingkat responsivitas, serta kualitas layanan informasi publik di seluruh unit kerja.
6. Penyelenggaraan **Forum Keterbukaan Informasi Publik** sebagai sarana edukasi, diseminasi kebijakan, dan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk komunitas olahraga dan penyandang disabilitas.

### Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi capaian indikator, antara lain:

1. Belum meratanya pemahaman dan internalisasi prinsip keterbukaan informasi publik di seluruh pegawai dan unit kerja.
2. Perbedaan tingkat kesiapan dan responsivitas PPID Pelaksana dalam penyediaan dan pemutakhiran informasi publik.
3. Perlunya konsistensi pemenuhan dokumen pendukung sesuai seluruh unsur penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, terutama dalam kondisi keterbatasan dan efisiensi anggaran.

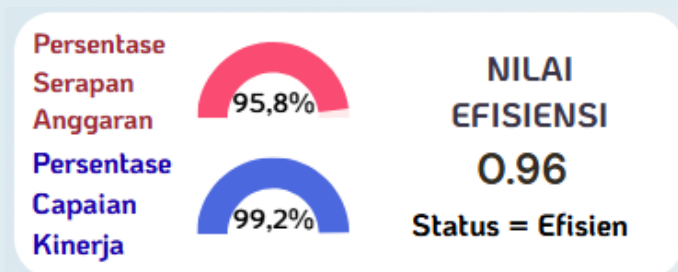
### C. OUTCOME

Kemenpora berhasil meraih prestasi tertinggi sepanjang sejarah kelembagaannya dengan dinobatkan sebagai Peringkat Pertama Badan Publik Terbaik Nasional untuk kategori Kementerian. Kemenpora mempertahankan kualifikasi "Informatif" (level tertinggi) dengan skor hampir sempurna, yakni 99,41. Kemenpora dianugerahi trofi Arkaya Wiwarta Prajanugraha sebagai simbol badan publik terbaik nasional dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, hal ini mempertegas konsistensi sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenpora.

Keunggulan Kemenpora terletak pada optimalisasi sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terintegrasi secara digital, yang memungkinkan penyediaan informasi publik dilakukan secara responsif dan minim sengketa informasi. Keberhasilan dalam mempertahankan predikat tertinggi selama dua tahun berturut-turut ini menjadi fondasi utama bagi peningkatan

Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik kementerian, yang secara kolektif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional.

#### D. NILAI EFISIENSI



Pencapaian Nilai Efisiensi yang secara konsisten berada pada status "Efisien" dengan rentang skor 0,96 menjadi indikator krusial dalam mendukung capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kemenpora sebesar 98,57.

Meskipun angka ini sedikit di bawah target 99,41, korelasi data menunjukkan bahwa pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah berjalan dengan manajemen sumber daya yang sangat optimal. Efisiensi tersebut tercermin dari kemampuan PPID dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi berkualitas tinggi dengan serapan anggaran yang sangat terukur di angka 95,8%, namun tetap mampu menghasilkan output layanan informasi yang masif dan akuntabel. Hal ini membuktikan bahwa operasional layanan informasi publik di Kemenpora tidak terjebak pada pemborosan anggaran, melainkan fokus pada efektivitas sistem digital dan responsivitas petugas, sehingga mampu mendekati target indeks KIP nasional secara kompetitif melalui tata kelola yang ramping namun berdampak luas bagi publik.

Tabel 3.11 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	419.560.000	401.958.836	95,80%	1	1	100,00%

#### E. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Dalam ajang Monev KIP 2025, Kemenpora menunjukkan performa yang mengungguli rata-rata kementerian lainnya, dengan susunan peringkat sebagai berikut :

1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Kementerian Komunikasi dan Digital

4. Kementerian Ketenagakerjaan
5. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tabel 3.12 Analisis perbandingan Skor IKIP

Entitas	Skor KIP 2024	Kualifikasi	Posisi Relatif
Kemenpora	98,57	Informatif	Peringkat 2 Nasional
Rata-rata Kementerian	85 - 92	Informatif	Berada di bawah Kemenpora
Standar Nasional IKIP	75,65	Sedang	Batas minimum keterbukaan

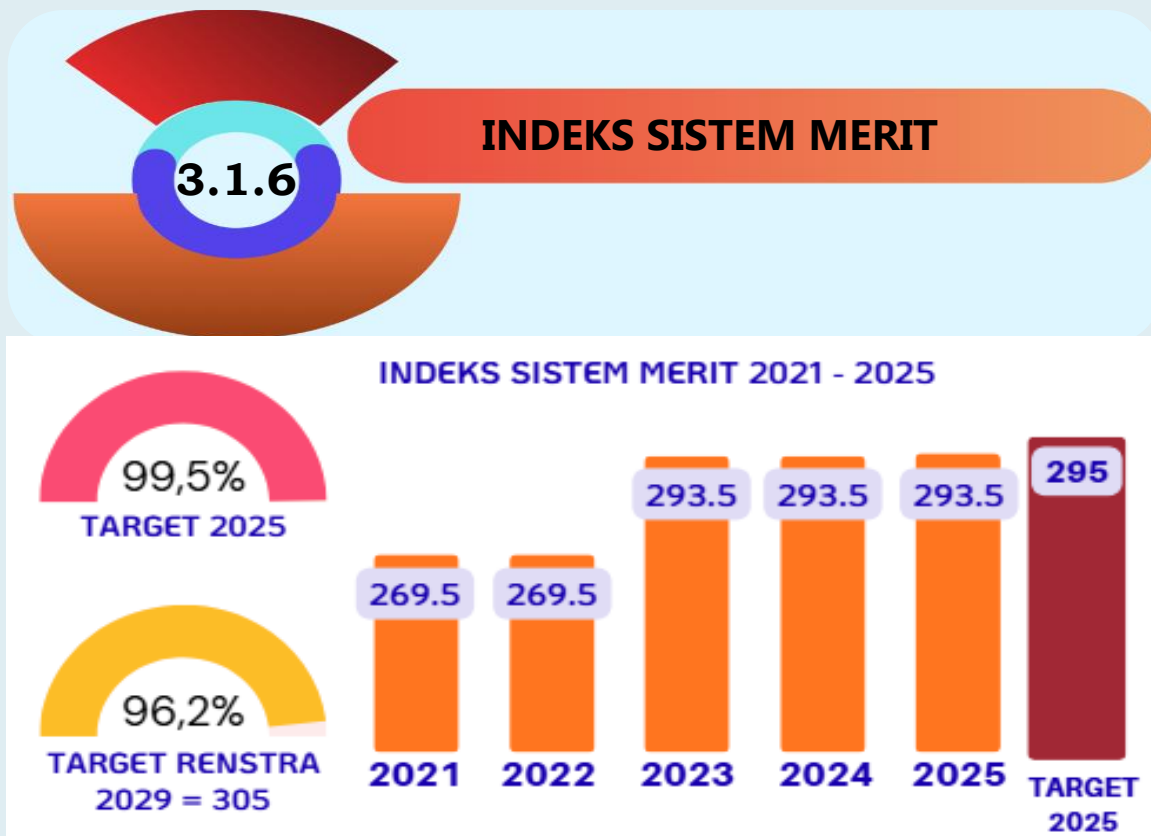
Analisis perbandingan menunjukkan bahwa performa Kemenpora berada jauh di atas rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) nasional yang berada pada skor 75,65. Dengan nilai 98,57, Kemenpora berada di posisi teratas kategori Kementerian, melampaui lembaga strategis lain seperti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang juga meraih predikat Informatif pada 2025 namun dengan fokus keberlanjutan pada pemenuhan informasi cepat dan akurat. Capaian ini menempatkan Kemenpora sebagai role model transparansi di antara Kementerian/Lembaga (K/L) lain, yang dianggap sebagai fondasi utama dalam mensukseskan program reformasi birokrasi.

#### F. REKOMENDASI PERBAIKAN

Sebagai upaya peningkatan kinerja dan menjaga keberlanjutan predikat **Informatif** pada tahun berikutnya, rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi, dan internalisasi budaya keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai dan unit kerja.
2. Memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan antara **PPID Utama** dan **PPID Pelaksana** dalam penyediaan serta pemutakhiran informasi publik.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan dokumen layanan informasi publik.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi internal secara lebih intensif sebagai instrumen pengendalian mutu layanan informasi publik.

Mengembangkan inovasi layanan informasi publik yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sebagaimana dirumuskan dalam rencana tindak lanjut PPID Kemenpora.



Gambar 3.9 Capaian Kinerja Indikator Indeks Sistem Merit

### A. CAPAIAN KINERJA

Sistem merit dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi ASN secara adil dan wajar. Dalam undang-undang ASN ini juga dijelaskan juga bahwa sistem merit diselenggarakan sesuai dengan prinsip meritokrasi yakni prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus.

Sistem Merit merupakan ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari 8 aspek diantaranya perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. Dengan satuan nilai (100-410) konversi indeks (0,2-1,0). Data diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh KASN atas penilaian sistem merit di Kemenpora Tahun 2025.

Pada tahun 2021, Kemenpora mendapatkan nilai 269,5 poin dengan predikat “Baik”. Evaluasi penilaian sistem merit dilakukan kembali pada tahun 2022 dan mendapatkan nilai 295,5 poin. Hasil penilaian ini berlaku selama 2 tahun hingga 2024. Nilai penerapan sistem merit pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 26 poin . Tren peningkatan nilai penerapan sistem merit ini juga menunjukkan bahwa manajemen ASN di Kementerian Pemuda dan Olahraga semakin baik. Internalisasi dan Pemantauan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan kegiatan dan upaya terintegrasi dengan Reformasi Birokrasi. Seluruh kegiatan penerapan sistem merit merupakan kegiatan yang merupakan mandat yang melekat ke dalam aspek-aspek pelaksanaan manajemen ASN di Kemenpora.

## B. UPAYA DAN KENDALA

Upaya – upaya yang mendukung dalam implementasi Indeks Sistem Merit di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah:

1. Pada tahun 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai *pilot project* penerapan layanan Kenaikan Pangkat Otomatis dan Layanan Penetapan Pensiun otomatis (PPO) bersama dengan 45 instansi pemerintah dalam rangka peningkatan dan percepatan kualitas pelayanan kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan komitmen bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan Instansi dalam mewujudkan automasi layanan kepegawaian.

Badan Kepegawaian Negara memberikan penghargaan kepada 5 instansi pemerintah atas Komitmen, Dedikasi dan Kontribusi Nyata Dalam Mendukung Layanan KPO. Adapun 5 instansi yang mendapat penghargaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga
2. Kementerian Keuangan
3. Lembaga Administrasi Negara
4. Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Kementerian Sosial



Gambar 3.10 Gambar Penyerahan Piagam Penghargaan

2. Melaksanakan penyusunan draft *Individual Development Program (IDP)* Tahun 2026 dalam rencana menyusun pemetaan pengembangan kompetensi untuk pengembangan karier pegawai;
3. Pada Tahun 2025 untuk memaksimalkan penerapan manajemen talenta untuk membangun *talent pool* dan rencana suksesi Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan *Benchmarking* Aplikasi Manajemen Talenta (SIMANTAP) yang diterapkan pada Mahkamah Konstitusi. Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana melakukan adopsi/cloning aplikasi SIMANTAP. Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan sosialisasi Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta, dan melakukan bimbingan teknis aplikasi manajemen talenta BKN (SIMATA) kepada pengelola kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 24 Desember 2025;
4. Hasil monitoring Badan Kepegawaian Negara dalam penetapan kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025 pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan capaian sebesar 98,54%. Selain itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan *Coaching Clinic*, Pendampingan, Bimbingan Teknis, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2025. Serta dalam pengelolaan kinerja telah diterbitkan Nota Dinas Nomor KP.08.00/10.6.1/SET/X/2025 tanggal 6 Oktober 2025 hal Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa predikat kinerja pegawai

menitikberatkan pada hasil kerja dan perilaku kerja dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kolaborasi antar pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

5. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian, dedikasi, dan loyalitas pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan, pada tahun 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan pemberian penghargaan berupa Satyalancana Karya Satya, Kenaikan Pangkat Luar Biasa, Pemilihan Duta Korpri Kemenpora, dan penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat, gaji dan tunjangan. Kemudian, sebagai bagian dari kewajiban pemberi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memastikan seluruh pegawai terdaftar dalam program Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh PT Taspen (Persero), serta program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam pengelolaan disiplin pegawai bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menggunakan aplikasi I'DIS (*Integrated Discipline*) BKN untuk mendukung penegakan disiplin ASN yang tertib, transparan, akuntabel, dan terdokumentasi secara sistem. Dalam meningkatkan pemahaman pegawai juga telah dilakukan Bimbingan Teknis Disiplin Pegawai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 kepada seluruh pegawai. Selain itu, pada tahun 2025 juga dilakukan monitoring dan evaluasi disiplin pegawai berdasarkan kehadiran secara berkala.
7. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi untuk memaksimalkan penggunaan sistem informasi kepegawaian dan e-office, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai upaya penguatan secara bertahap. Pada tahun 2024, Kemenpora telah melaksanakan integrasi Sistem Informasi Administrasi Pegawai (SIAP) Kemenpora dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) serta integrasi dengan aplikasi e-Kinerja BKN. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan sinkronisasi data kepegawaian internal agar selaras dengan data kepegawaian nasional sekaligus mendukung pengelolaan kinerja ASN yang objektif, terukur, dan berbasis sistem. Selanjutnya, pada tahun 2025, Kemenpora melanjutkan integrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendukung pengelolaan layanan kepegawaian, meliputi pengajuan dan pengelolaan cuti, izin, presensi, serta dinas luar secara terintegrasi dan terdigitalisasi. Seluruh penguatan sistem

tersebut dilakukan sebagai sarana pimpinan untuk monitoring dan pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam implementasi Indeks Sistem Merit di Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Manajemen Talenta dimanfaatkan untuk mewujudkan penataan pola karier dan yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel guna memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit di lingkungan kemenpora, namun pemanfaatan output pada Manajemen Talenta belum maksimal karena terdapat perbedaan parameter, bobot penilaian, dan penyesuaian pada aplikasi Sistem Manajemen Talenta (SIMATA) BKN. Sebelumnya Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana melakukan adopsi/*cloning* aplikasi manajemen talenta pada MK (SIMANTAP), namun dikarenakan perlu adanya pendalaman lebih lanjut terkait kesesuaian penerapan manajemen talenta MK dengan eksistensi di Kementerian Pemuda dan Olahraga saat ini dan diterbitkannya regulasi terbaru terkait Manajemen Talenta (Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025, maka rencana untuk melakukan adopsi aplikasi SIMANTAP MK tidak dapat dilanjutkan.
2. Dalam pengelolaan kinerja pegawai melalui SKP sudah menunjukkan perbaikan-perbaikan dari tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi seperti perlu adanya pedoman standarisasi dalam pemberian predikat kinerja dan perlu mengoptimalkan indikator kinerja individu pegawai yang berdasarkan pada kompetensi jabatan masing-masing pegawai dalam mendukung capaian organisasi.
3. Dalam implementasi pengelolaan administrasi pegawai berbasis sistem informasi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan integrasi antar aplikasi yang menyebabkan sebagian data belum sepenuhnya sinkron dan masih memerlukan penyesuaian secara berkala.
4. Perbedaan standar data dan alur bisnis antar sistem kepegawaian pusat dan internal instansi yang mempengaruhi kecepatan dan konsistensi layanan administrasi pegawai terutama saat integrasi dilakukan.
5. Variasi tingkat pemahaman dan kompetensi pengguna terhadap pemanfaatan sistem informasi, yang berdampak pada optimalisasi penggunaan fitur aplikasi.

Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2022 ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan Nilai 269,5 (dua ratus enam puluh sembilan koma lima) dan Indeks 0,65 (nol koma enam puluh lima). Pada tahun 2023 mengalami

kenaikan sebesar 24 poin dan ditetapkan pada Kategori III (Baik), dengan Nilai 293,5 (dua ratus sembilan puluh tiga koma lima) dan Indeks 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga). Hambatan yang dihadapi dalam implementasi Sistem Merit di tahun 2023 adalah tidak adanya aplikasi penunjang penerapan sistem manajemen talenta.

Pada tahun 2025 ini tidak ada capaian Indeks Sistem Merit sama seperti tahun 2024 dikarenakan masih menunggu sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Selain itu, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan signifikan dalam manajemen kepegawaian di Indonesia. Salah satu perubahan utama adalah pengalihan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perubahan ini memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kepegawaian, termasuk tidak dilakukannya penilaian Sistem Merit Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada tahun 2025 karena sedang dalam masa transisi fungsi KASN. Oleh karena itu, untuk nilai realisasi indikator sistem merit tahun 2025 menggunakan hasil penilaian pada tahun 2023 yang memperoleh nilai 293,5 dengan predikat baik.

### **Analisis Keberhasilan dan Hambatan**

Faktor Pendorong: Adanya integrasi data melalui aplikasi e-kinerja dan komitmen pimpinan dalam mendukung manajemen talenta ASN untuk menempatkan pegawai sesuai kompetensinya.

Faktor Penghambat: Kendala utama yang dihadapi Kemenpora pada tahun 2024 adalah sinkronisasi data pada beberapa indikator pengembangan karier dan mutasi yang menyebabkan target 310 belum tercapai sepenuhnya.

Secara keseluruhan, meskipun belum mencapai nilai "Sangat Baik" seperti BPOM atau BPS, Kemenpora berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi standar birokrasi kelas dunia melalui peningkatan berkelanjutan pada target 2025.

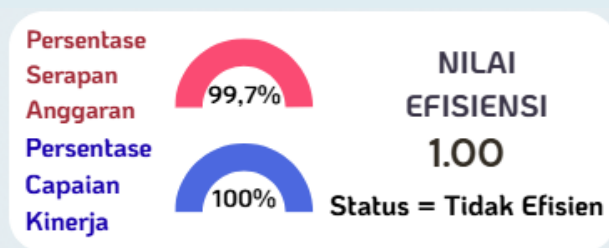
### **C. OUTCOME**

Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen penuh dalam mewujudkan birokrasi kelas dunia melalui implementasi Sistem Merit yang progresif dan akuntabel. Sepanjang tahun 2024, Kemenpora telah berhasil

mencapai Indeks Sistem Merit sebesar 293,5 dengan kategori "Baik". Capaian ini merupakan cerminan dari keberhasilan transisi manajemen SDM yang kini sepenuhnya didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, tanpa diskriminasi. Outcome utama dari penguatan sistem ini adalah terciptanya profil ASN yang profesional dan kompeten, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan akselerasi pencapaian target strategis di bidang kepemudaan dan olahraga nasional.

Memasuki tahun 2025, strategi penguatan sistem merit difokuskan pada optimalisasi manajemen talenta dan digitalisasi pemantauan kinerja melalui aplikasi e-kinerja. Dengan target indeks yang ditingkatkan menjadi 295,00, Kemenpora memprioritaskan penyempurnaan pada aspek pengembangan karier dan mutasi internal yang lebih transparan. Analisis capaian menunjukkan bahwa Kemenpora berada pada kelompok instansi pemerintah yang stabil dalam jalur transformasi meritokrasi, sejajar dengan kementerian/lembaga lain yang mengedepankan profesionalisme. Upaya berkelanjutan ini memastikan bahwa setiap penempatan personel didasarkan pada prinsip *the right man on the right place*, guna menjamin keberlanjutan reformasi birokrasi dan integritas organisasi.

#### D. NILAI EFISIENSI



Manajemen sumber daya manusia di Kemenpora telah dikelola berdasarkan prinsip profesionalisme dan produktivitas yang tinggi. Skor Indeks Sistem Merit yang sangat mendekati target (99,5% pencapaian target)

membuktikan bahwa alokasi anggaran belanja pegawai dan pengembangan kompetensi telah digunakan secara efektif untuk menempatkan personel yang tepat pada posisi yang strategis, sehingga meminimalisir pemborosan birokrasi dan memaksimalkan output organisasi. Meskipun terdapat indikator efisiensi bernilai 1.00 dengan status "Tidak Efisien" pada serapan 99,7%, hal tersebut justru menjadi catatan penting dalam sistem merit untuk terus melakukan evaluasi terhadap beban kerja dan distribusi SDM agar selaras dengan ketajaman penyerapan anggaran di masa mendatang.

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6974 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian	EBC	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	954	954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	3.797.442.000	3.789.198.134	99,78%	1	1	100,00%
6974 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian	EBC	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	996	996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Layanan)	5.702.558.000	5.681.411.284	99,63%	1	1	100,00%

Tabel 3.13 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Indeks Sistem Merit Kemenpora

## E. REKOMENDASI PERBAIKAN INDEKS SISTEM MERIT

Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu melaksanakan berbagai langkah strategis dalam penerapan Sistem Merit, yaitu:

1. Memastikan tersedianya deskripsi jabatan, hasil evaluasi jabatan, dan peta jabatan ASN yang ditetapkan dalam peraturan instansi. Digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan, pengadaan, standar kompetensi jabatan, pengembangan kompetensi, dan manajemen talenta yang terintegrasi dalam layanan elektronik terpusat.
  2. Membentuk Komite Talenta Instansi serta percepatan pelaksanaan manajemen talenta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Menyusun rencana pengembangan kompetensi yang tepat dan terencana.
  4. Menyempurnakan pembangunan talent pool dan rencana suksesi.
- Menyusun dan menetapkan rancangan peraturan pola karier internal instansi yang telah disesuaikan dengan manajemen talenta dan rencana sukses.

## 3.1.7 PERSENTASE PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3.11 Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi

### A. CAPAIAN KINERJA

Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) merupakan bagian integral dari kebijakan Penyederhanaan Birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika tugas dan fungsi organisasi. Di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), PSO dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk memangkas jenjang birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas koordinasi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan PSO di Kemenpora berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan ini menjadi dasar normatif bagi kementerian dan lembaga dalam menata ulang struktur organisasinya agar lebih ramping dan berorientasi pada fungsi, bukan semata-mata pada jenjang struktural. Dalam

konteks evaluasi reformasi birokrasi, kebijakan ini juga diperkuat dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja.

Secara konseptual, Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan melalui tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Penyederhanaan struktur organisasi;
2. Penyetaraan jabatan; dan
3. Penyesuaian sistem kerja.

Penyederhanaan struktur organisasi dilakukan dengan mengurangi jabatan administrasi yang bersifat hierarkis dan mengalihkan peran manajerial ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan bertujuan untuk memastikan bahwa pegawai yang terdampak penyederhanaan tetap memiliki kepastian karier, kelas jabatan, serta hak kepegawaian yang setara. Sementara itu, penyesuaian sistem kerja diarahkan pada perubahan pola kerja dari struktur yang kaku menjadi kerja berbasis tim, kolaboratif, dan lintas unit.

Dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2023 ditegaskan bahwa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) merupakan perbandingan antara jumlah struktur pada jabatan administrasi yang disederhanakan dengan jumlah struktur pada jabatan administrasi yang berpotensi untuk dipertahankan. Adapun kriteria jabatan administrasi yang dapat dipertahankan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut, antara lain berdasarkan karakteristik tugas, kebutuhan organisasi, serta pertimbangan efektivitas pelaksanaan fungsi. Perhitungan PSO dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

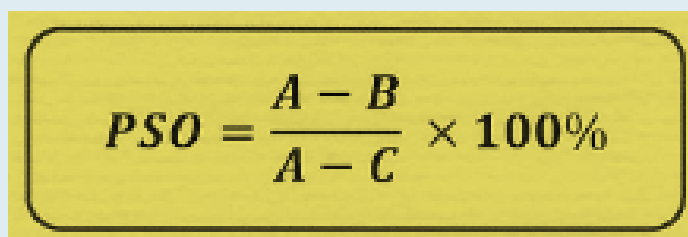
A = Jumlah Struktur Jabatan sebelum dilakukan Penyederhanaan

B = Jumlah Struktur Jabatan setelah dilakukan Penyederhanaan

C = Jumlah struktur jabatan administrasi yang berpotensi dipertahankan

Rumus ini digunakan untuk memastikan bahwa capaian PSO dapat diukur secara objektif dan dapat dibandingkan antarperiode penilaian.

Sebelum pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi, struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu pada Peraturan Menteri Pemuda


$$PSO = \frac{A - B}{A - C} \times 100\%$$

Gambar 3.12 Rumus Perhitungan PSO

dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) tercatat sebanyak 30 jabatan, Jabatan Administrator (Eselon III) sebanyak 97 jabatan, dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) sebanyak 210 jabatan. Komposisi ini menunjukkan struktur organisasi dengan jenjang hierarki yang relatif panjang, khususnya pada level jabatan administrasi.

Seiring dengan implementasi kebijakan PSO, Kemenpora telah melakukan penyesuaian organisasi melalui dua kali perubahan peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja, yaitu Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025. Perubahan regulasi tersebut mencerminkan komitmen Kemenpora dalam menurunkan jumlah jabatan administrasi, khususnya pada level Eselon III dan Eselon IV, serta menguatkan peran jabatan fungsional sebagai tulang punggung pelaksanaan tugas teknis.

Tabel berikut memberikan gambaran perbandingan struktur jabatan Kemenpora sebelum dan setelah pelaksanaan PSO.

Tabel 3.14 struktur jabatan Kemenpora sebelum dan setelah pelaksanaan PSO

Jabatan Struktural	Sebelum Penyederhanaan Organisasi	Setelah Penyederhanaan Organisasi			
	Permenpora 1516 Tahun 2015	Permenpora 8 Tahun 2022	%	Permenpora 1 Tahun 2025	%
Eselon II (JPT Pratama)	30	25	16.67%	27	10.00%
Eselon III (Administrator)	97	2	97.94%	6	93.81%
Eselon IV (Pengawas)	210	1	99.52%	5	97.62%

Berdasarkan hasil penilaian reformasi birokrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai PSO sebesar 100 pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025, Kementerian PANRB tidak melaksanakan evaluasi dan penilaian PSO, sehingga Kemenpora menggunakan baseline penilaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, dengan nilai tetap sebesar 100. Dengan demikian, Kemenpora mampu mempertahankan capaian nilai PSO secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur organisasi telah dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

## B. UPAYA DAN KENDALA

Selain penyederhanaan struktur organisasi, Kemenpora juga melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyederhanaan birokrasi. Berbagai regulasi internal telah ditetapkan untuk mendukung implementasi sistem kerja baru, dan terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penyesuaian sistem kerja ini diarahkan untuk mendorong pola kerja berbasis tim, pemanfaatan pegawai lintas unit, serta peningkatan fleksibilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Dalam praktiknya, implementasi PSO dan penyesuaian sistem kerja di lingkungan Kemenpora masih menghadapi sejumlah kendala dan tantangan. Penetapan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora pada tanggal 2 Januari 2025 dan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2025 tentang Uraian Fungsi Organisasi pada tanggal 20 Maret 2025 relatif masih baru, sehingga implementasinya belum genap satu tahun dan menyulitkan pelaksanaan evaluasi yang komprehensif. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan evaluasi, baik di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi maupun di unit teknis, juga menjadi tantangan tersendiri.

Kendala lainnya adalah penerapan sistem kerja yang belum optimal di beberapa unit kerja, antara lain masih terbatasnya pemanfaatan pegawai lintas unit, ketimpangan beban kerja antarpegawai, serta adanya pegawai yang lebih aktif pada unit lintas dibandingkan unit generiknya. Di samping itu, penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan sistem kerja baru belum dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh unit kerja, dan belum semua unit kerja memperbarui surat tugas tim kerja sesuai dengan ketentuan terbaru.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan sejumlah upaya strategis. Upaya tersebut antara lain melalui sosialisasi berkelanjutan, baik secara formal maupun informal, untuk menginternalisasi pemahaman mengenai uraian fungsi organisasi kepada seluruh pegawai. Kemenpora juga merencanakan pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2025 yang dijadwalkan pada tanggal 18 November 2025, guna mengukur efektivitas kelembagaan serta menjangkau masukan dan kendala dari unit kerja.

Selain itu, telah dilaksanakan bimbingan teknis terkait penerapan sistem kerja kepada unit kerja, serta bimbingan teknis penyusunan Standar Operasional Prosedur. Hingga bulan Oktober 2025, jumlah SOP yang telah ditetapkan mencapai 31 SOP. Kemenpora juga secara aktif melakukan koordinasi untuk pembaruan surat tugas tim kerja melalui pengiriman nota dinas Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada seluruh unit kerja, pelaksanaan reviu surat tugas tim kerja, serta koordinasi teknis dengan sekretariat deputy dan unit kerja teknis.

### **Analisis Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak terlepas dari beberapa faktor kunci. Faktor tersebut meliputi dukungan dan komitmen pimpinan dalam mengawal kebijakan penyederhanaan organisasi, dukungan Kementerian PANRB melalui pendampingan penataan organisasi, serta kemampuan adaptasi pegawai Kemenpora dalam menghadapi perubahan struktur dan sistem kerja sebagai dampak dari penyederhanaan organisasi. Dengan dukungan faktor-faktor tersebut, PSO di Kemenpora diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan indikator reformasi birokrasi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

### **C. OUTCOME**

Kementerian Pemuda dan Olahraga telah berkomitmen melakukan transformasi struktural melalui penyederhanaan organisasi guna menciptakan birokrasi yang lebih lincah, dinamis, dan berorientasi pada hasil. Outcome utama dari kebijakan ini adalah pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang bertujuan untuk memangkas hirarki pengambilan keputusan yang panjang dan birokratis. Langkah ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan upaya strategis untuk memastikan setiap unit kerja mampu merespons perubahan kebutuhan di sektor kepemudaan dan olahraga secara lebih cepat dan efisien. Melalui struktur yang lebih ramping, Kemenpora berupaya memaksimalkan potensi sumber daya manusia melalui sistem kerja kolaboratif lintas unit atau cross-cutting yang mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian.

#### D. ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan data evaluasi terbaru, Kemenpora mencatatkan capaian signifikan dalam efektivitas kelembagaan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi data antarunit.

Indeks Efektivitas Kelembagaan: Realisasi capaian tahun 2023 sebesar 96,35, namun target tahun 2024 ditetapkan lebih rendah yaitu sebesar 94.

**Efisiensi Struktur:** Dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain yang telah mencapai predikat "Sangat Baik" dalam reformasi birokrasi, Kemenpora telah menyelesaikan tahap krusial penyederhanaan birokrasi.

#### E. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan dinamika implementasi Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) dan penyesuaian sistem kerja tahun 2025, berikut adalah rumusan Perbaikan Kinerja ke Depan yang dirancang untuk memperkuat korelasi antara efektivitas organisasi dan produktivitas individu:

##### 1. Institusionalisasi Evaluasi Dampak Berkelanjutan

Mengingat regulasi baru (Permenpora No. 1/2025 dan Kepmenpora No. 34/2025) belum berjalan satu tahun, perbaikan harus difokuskan pada pemantauan transisi dan ke depan menjadikan agenda evaluasi tanggal 18 November 2025 sebagai titik awal audit kelembagaan rutin setiap semester untuk menjaring kendala teknis secara real-time.

##### 2. Optimalisasi Sistem Kerja dan Keseimbangan Beban Kerja

Menjawab tantangan ketimpangan beban kerja dan loyalitas unit (generik vs lintas unit), dengan cara :

- a) Standardisasi Matriks Peran: Menyusun matriks peran dan hasil (role-result matrix) yang jelas bagi setiap pegawai agar keterlibatan dalam tim lintas unit tidak mengabaikan fungsi generik.
- b) Analisis Beban Kerja (ABK) Digital: Melakukan revaluasi ABK pasca-penyederhanaan untuk memetakan kembali distribusi tugas, sehingga tidak terjadi penumpukan beban pada individu tertentu.
- c) Pembaruan Administrasi Tim: Melakukan percepatan pembaruan surat tugas tim kerja di seluruh unit sesuai ketentuan terbaru guna memberikan legalitas hukum dan kejelasan tanggung jawab bagi individu.

### 3. Akselerasi Sinkronisasi Tata Kelola (SOP & Dokumen)

- a) Melanjutkan target pencapaian SOP (melampaui 31 SOP yang sudah ada) dengan fokus pada prosedur lintas fungsi (cross-cutting) untuk mendukung fleksibilitas kerja tim
- b) Menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan SOP yang lebih spesifik pada unit teknis untuk mengurangi beban kerja Biro SDM dan Organisasi dalam proses asistensi.

### 4. Penguatan Budaya Kerja Agile dan Kapasitas SDM

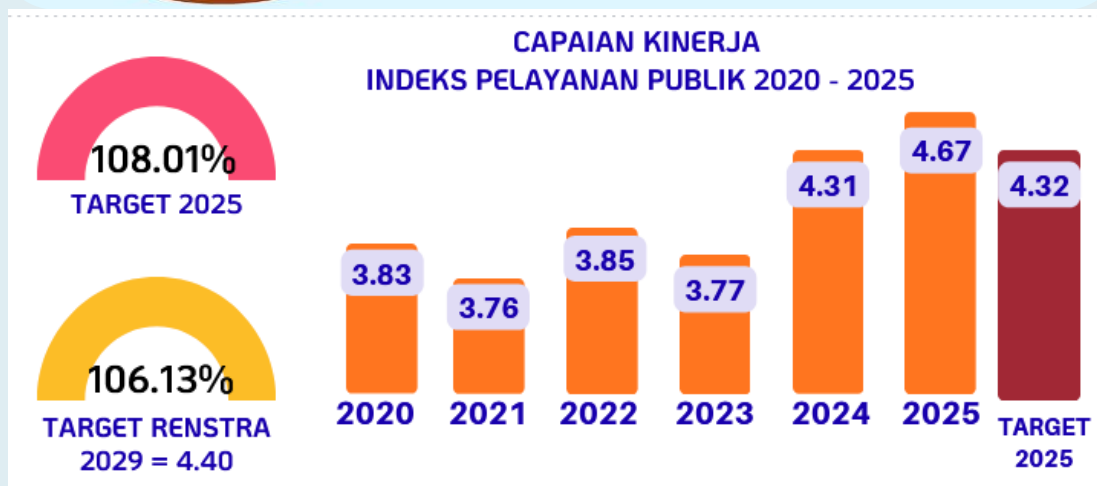
Memanfaatkan faktor adaptabilitas pegawai sebagai penggerak kinerja:

- a) Internalisasi Budaya Kerja: Melanjutkan sosialisasi formal dan informal untuk mengubah pola pikir pegawai dari "orientasi jabatan struktural" ke "orientasi fungsi dan hasil".
- b) Peningkatan Kompetensi Manajerial Tim: Memberikan pelatihan khusus bagi ketua tim kerja dalam mengelola anggota dari berbagai unit lintas guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas secara kolaboratif.

### 5. Penguatan Asistensi dan Pendampingan Eksternal

Sinergi dengan KemenPANRB: Mempertahankan pendampingan intensif dengan KemenPANRB untuk memastikan penataan organisasi di Kemenpora tetap selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional.

Rangkaian perbaikan ini diharapkan dapat mentransformasi PSO dari sekadar pemenuhan indikator administratif menjadi pendorong nyata bagi Indeks Efektivitas Kelembagaan dan Indeks Pelayanan Publik Kemenpora yang lebih tinggi di masa depan.



Gambar 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik

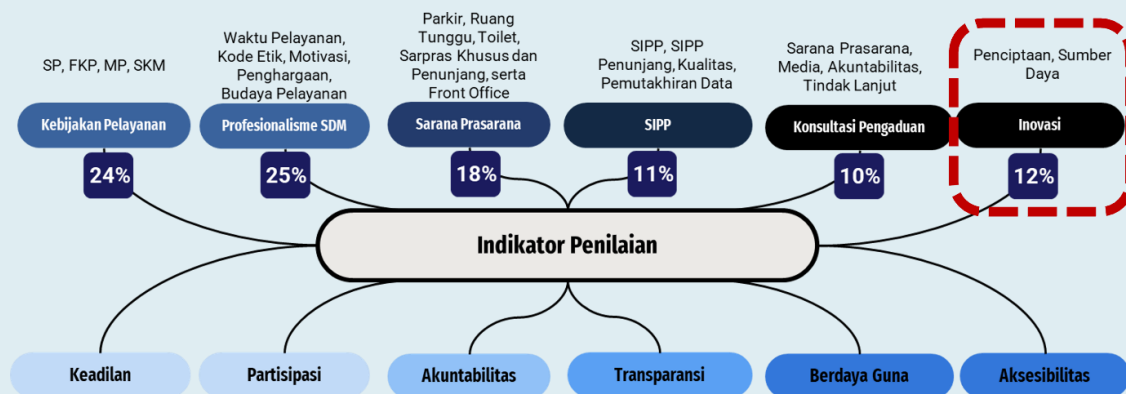
### A. CAPAIAN KINERJA

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.

Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kemenpora maka dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan indikator yang jelas dan terukur serta memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil dari PEKPPP di

lingkungan Kemenpora yang mengacu pada PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pedoman teknis di lapangan, evaluator, dan unit lokus mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP (sebagai panduan terbaru untuk kegiatan Pemantauan, PEKPPP Mandiri, dan PEKPPP Khusus).

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sarana Prasarana, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan aspek Inovasi.



Gambar 3.14 Aspek dan Prinsip Evaluasi PEKPPP

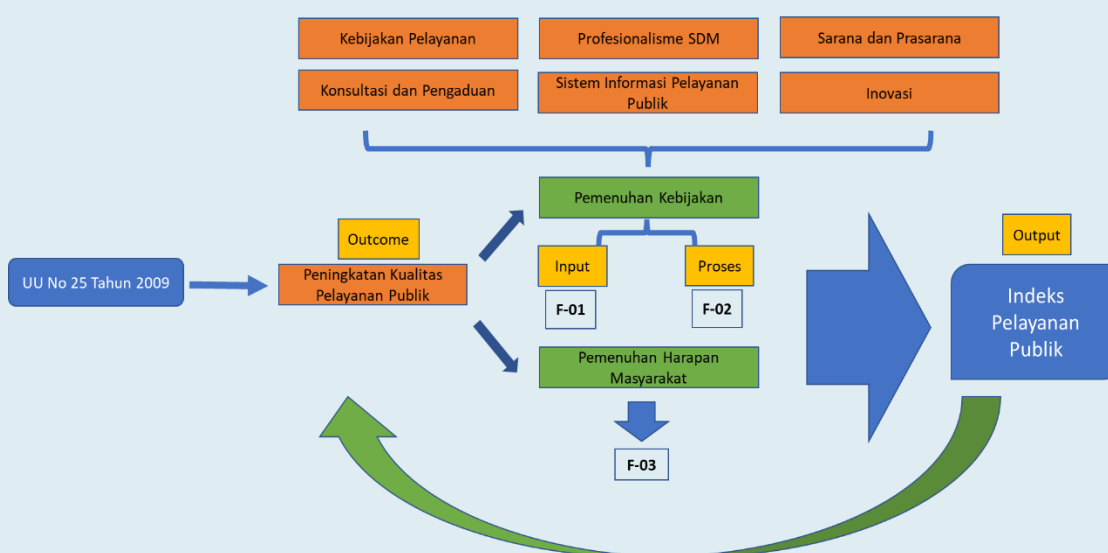
Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan melalui pengisian formulir, evaluasi lapangan, dan pembuatan berita acara. Terdapat 3 formulir dalam PEKPPP yaitu:

1. Formulir F-01 diisi oleh unit penyelenggara (self-assessment);
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator (verifikasi objektif); dan
3. Formulir F-03 diisi oleh masyarakat/pengguna layanan (survey persepsi).

Penghitungan nilai indeks diperoleh dari nilai komposit 3 formulir, yaitu formulir F01 terdiri dari 6 aspek; formulir F02 terdiri dari 6 Aspek; dan formulir F03 terdiri dari 5 aspek. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan pengumpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagai berikut :

Interval Nilai	Kategori	Predikat
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
4,01-4,50	A-	Sangat Baik
3,51-4,00	B	Baik
3,01-3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51-3,00	C	Cukup
2,01-2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51-2,00	D	Prioritas Pembinaan
1,01-1,50	E	Prioritas Pembinaan
0-1,00	F	Prioritas Pembinaan

Tabel 3.15 Nilai dan Kategori Indeks Pelayanan Publik

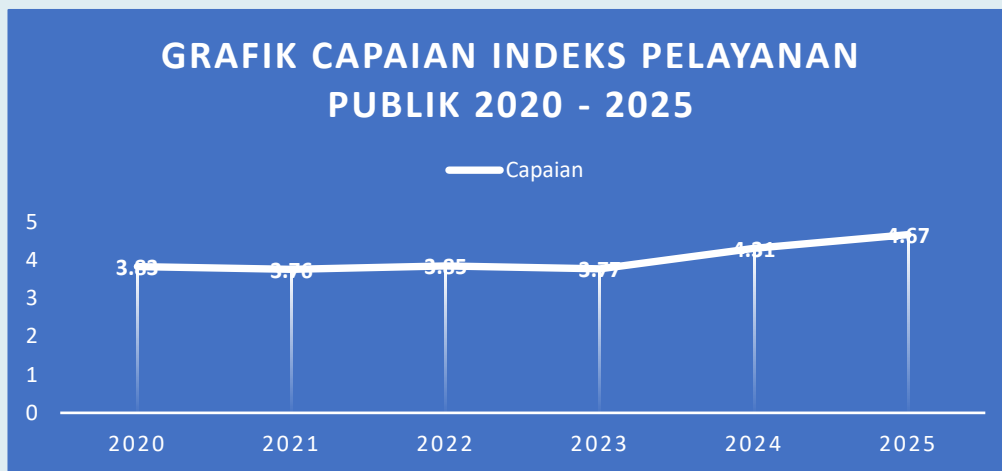


Gambar 3.15 Alur Proses Perolehan Indeks Pelayanan Publik

Adapun target dan capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 yang dibandingkan dengan *baseline* 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Capaian Indeks Pelayanan Publik 2020-2025

Tahun	Capaian
2020	3,83
2021	3,76
2022	3,85
2023	3,77
2024	4,31
2025	4,67



Grafik 3.2 Capaian Indeks Pelayanan Publik 2020-2025

Indeks Pelayanan Publik Kemempora mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data capaian (*baseline*) Indeks Pelayanan Publik Kemempora selama 3 tahun terakhir dapat dianalisis bahwa terdapat interval perubahan nilai Indeks Pelayanan Publik dimana periode tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,08 namun setelah itu selalu mengalami peningkatan. Periode tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,54 dan periode tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,36. Capaian tersebut memenuhi target yang diharapkan sebesar 4,32 dengan kategori A (Pelayanan Prima) yang merupakan kategori tertinggi dalam predikat penyelenggaraan pelayanan publik. Ini merupakan raihan tertinggi yang pernah diperoleh Kemempora.

Tabel 3.17 Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022-2025

Indeks Pelayanan Publik				
Tahun Pelaksanaan	2022	2023	2024	2025
Target	4,01	4,26	4,01	4,32
Capaian	3,85	3,77	4,31	4,67
Kategori	B (Baik)	B (Baik)	A- (Sangat Baik)	A (Pelayanan Prima)

## B. UPAYA DAN KENDALA

Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja yaitu:

1. Komitmen pimpinan
2. Koordinasi secara intensif dengan unit terkait penyediaan Prasarana dan Sarana antara lain melalui nota dinas permohonan kepada Kepala Biro Humas dan Umum, koordinasi secara langsung dengan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, koordinasi secara teknis dengan Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Biro Humas dan Umum;

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi, di antaranya:

1. Peningkatan penyediaan Prasarana dan Sarana termasuk Sarpras untuk Disabilitas;
2. Belum adanya kanal khusus Pelayanan Publik di website Kemenpora

### PEKPPP MANDIRI

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/101/PP.00.02/2025 hal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025, maka diamanatkan bahwa instansi pemerintah wajib melaksanakan PEKPPP Mandiri terhadap paling sedikit 25% dari total Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OPP). OPP dimaksud adalah Unit Organisasi setingkat Eselon II. Untuk menindaklanjuti amanat tersebut, maka telah dilakukan PEKPPP secara Mandiri kepada 11 (sebelas) unit organisasi tingkat Eselon II yang telah diusulkan atau sebesar 40% dari total jumlah unit organisasi setingkat Eselon II yang terdapat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri 2025 yang dilaksanakan oleh Kemenpora adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Hasil pelaksanaan PEKPPP Mandiri 2025

No	Unit Organisasi	Indeks	Predikat	Kategori
1	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data	2,93	C	Cukup
2	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	3,19	B-	Baik dengan Catatan
3	Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda	2,52	C	Cukup
4	Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global	2,68	C	Cukup
5	Asisten Deputi Olahraga-Pendidikan	-	Tidak mengisi F01	
6	Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus	3,27	B-	Baik
7	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga	3,44	B-	Baik dengan Catatan
8	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi	3,91	B	Baik
9	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi	3,11	B-	Baik dengan Catatan
10	Asisten Deputi Pengelolaan Jasa, Sarana, dan Prasarana Olahraga	3,88	B	Baik
11	Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global	2,68	C	Cukup

### C. OUTCOME

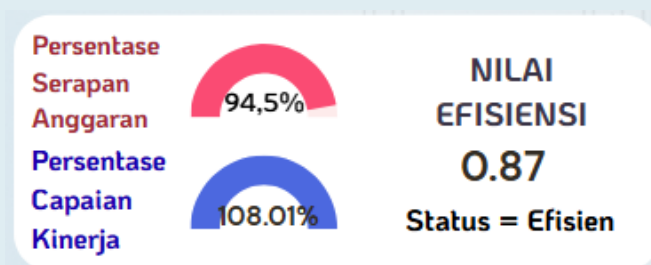
Sejalan dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kemenpora, Indeks Kepuasan Masyarakat Kemenpora juga mengalami peningkatan signifikan.

Pelayanan Publik adalah hak mutlak bagi Masyarakat. Pelayanan publik yang prima diharapkan Masyarakat dapat memperoleh layanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Melalui pemenuhan indikator–indikator kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka unit/instansi penyelenggara pelayanan publik telah mencapai output yang diharapkan dari setiap indikator, namun keberhasilan Pelayanan Publik tidak hanya diukur dari terpenuhinya indikator capaian tersebut.

Salah satu outcome yang terukur dan objektif adalah tingkat kepuasan pengguna layanan (Masyarakat). Hal tersebut dikarenakan, pengguna layanan merupakan objek nyata yang menera layanan dari penyelenggara layanan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sejalan dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik Kemenpora, Indeks Kepuasan Masyarakat Kemenpora juga mengalami peningkatan secara signifikan dari baseline Tahun 2023 sebesar 80,77 dengan kategori Baik menjadi 90,05 dengan kategori Sangat Baik di Tahun 2024 dan di tahun 2025 menjadi 91,38 dengan kategori Sangat Baik. Selanjutnya diharapkan Kemenpora dapat terus meningkatkan Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun–tahun selanjutnya dengan target impact (dampak) dari penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima adalah Kepercayaan (trust) Masyarakat terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi semakin meningkat.

### D. NILAI EFISIENSI



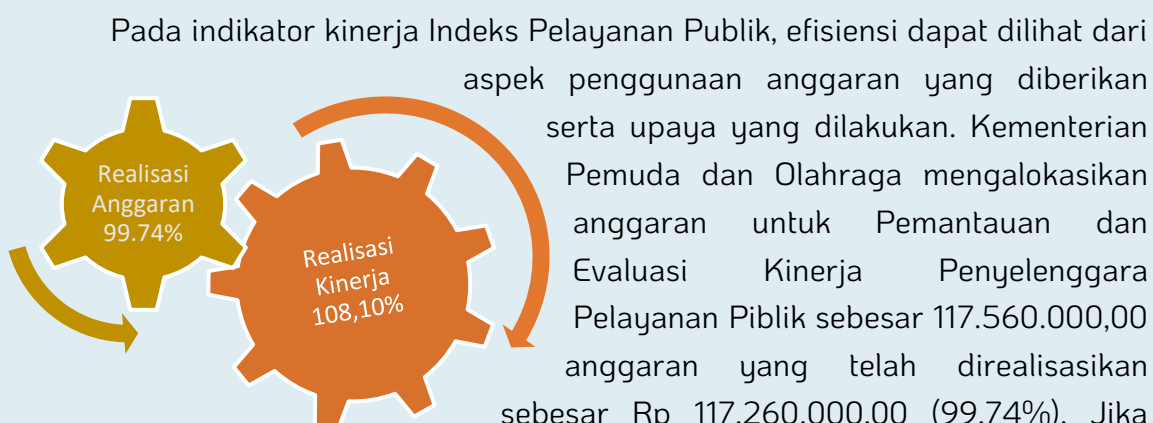
Pencapaian Nilai Efisiensi yang berada pada angka 0.87 dengan status "Efisien" menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan Kemenpora dalam melampaui target Indeks Pelayanan Publik

(IPP), yang mencatatkan skor 4.67 dari target 4.32. Korelasi ini membuktikan bahwa manajemen anggaran di kementerian telah bertransformasi dari sekadar penyerapan dana menjadi pendorong kualitas layanan, di mana realisasi kinerja yang sangat tinggi (mencapai 108.01%) dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang hemat dan tepat sasaran. Keunggulan IPP yang melampaui ekspektasi

ini merupakan manifestasi dari efisiensi birokrasi, yang menunjukkan bahwa alokasi biaya operasional berhasil dikonversi menjadi perbaikan nyata pada sarana, prasarana, dan kecepatan layanan masyarakat, sehingga mempertegas komitmen Kemenpora dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepuasan publik dan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.19 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan pada Indeks Pelayanan Publik Kemenpora

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6974 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	509.395.000	481.645.000	94,55%	1	1	100,00%



Gambar 3.16 Persentase Realisasi Anggaran dan Kinerja

Pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik, efisiensi dapat dilihat dari aspek penggunaan anggaran yang diberikan serta upaya yang dilakukan. Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalokasikan anggaran untuk Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik sebesar 117.560.000,00 anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 117.260.000,00 (99,74%). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang dihasilkan, yaitu sebesar 108,10% maka efisiensi yang diperoleh sebesar 0,92. Nilai efisiensi 0,92 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 yang dialokasikan untuk mencapai target Indeks Pelayanan Publik telah digunakan secara efisien.

### E. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Kemenpora telah berhasil meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik dengan meraih peringkat **18 dari 93 KL**.

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di

Kementerian, Lembaga, Daerah Tahun 2025, Kementerian Pemuda dan Olahraga berada pada urutan ke-18 dari 93 Kementerian/Lembaga yang dilakukan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025. Oleh karena itu, hasilnya dapat diperbandingkan untuk melihat dan mempelajari keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik di kementerian atau lembaga lain. Benchmarking terhadap Kementerian/Lembaga yang turut ikut serta dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik perlu dilakukan agar Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat memastikan layanan publik yang prima dan berkualitas bagi masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Kementerian PANRB pada tahun 2025 berhasil mencapai nilai indeks sebesar 4,51 poin. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil mencapai nilai indeks sebesar 3,93. Sementara Kementerian PPN/Bappenas berhasil mencapai nilai indeks 3,18. Capaian dari ketiga Kementerian yang sama-sama berada pada klaster 3 bersama Kemenpora tersebut menunjukkan bahwa capaian Kemenpora sebesar 4,67 sudah sangat baik dan menandakan kualitas pelayanan publik di Kemenpora sudah sangat baik.

## **F. REKOMENDASI ERBAIKAN KINERJA**

Peningkatan kebijakan pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, optimalisasi website Kemenpora dan SP4N LAPOR!

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

1. Terkait Aspek Kebijakan Pelayanan perlu pendampingan penyusunan Standar Pelayanan agar seluruh unit kerja di Kemenpora memiliki Standar Pelayanan yang menjadi dasar pelaksanaan layanannya.
2. Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan.
3. Terkait Sarana Prasarana, perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

4. Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik, agar memanfaatkan *website* [kemenpora.go.id](http://kemenpora.go.id) untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
5. Terkait konsultasi dan pengaduan, memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR!

Untuk aspek inovasi, mendorong unit kerja untuk terus belajar untuk menciptakan inovasi baik.



Gambar 3.17 Capaian Kinerja Indikator Indeks Reformasi Hukum

#### A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor PPH-OT.03.01-132 tanggal 13 Oktober 2025

tentang *Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025*, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai **99,40** dengan kategori **AA (Istimewa)**.

Capaian tersebut **melampaui target Tahun 2025 sebesar 87**, dengan tingkat capaian kinerja mencapai **114,25%**. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan capaian tahun sebelumnya serta mencerminkan komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memperkuat tata kelola hukum, kualitas regulasi, dan budaya kepatuhan hukum di lingkungan kementerian.

## **B. UPAYA DAN KENDALA**

Dalam rangka pencapaian Indeks Reformasi Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui **Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum Biro Hukum dan Kerja Sama** telah melakukan berbagai upaya, antara lain melaksanakan evaluasi mandiri secara berkala serta melakukan koordinasi intensif dengan **Kementerian Hukum** selaku instansi pembina IRH. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan hambatan, antara lain:

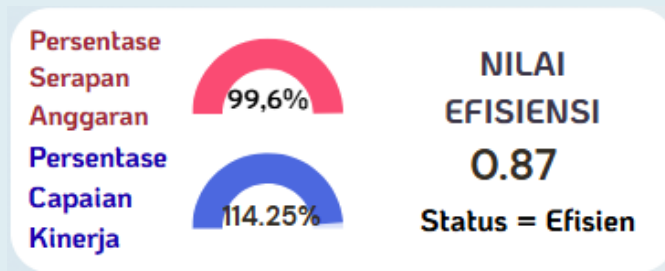
1. **Kesulitan dalam memperoleh evidence** penilaian IRH dari unit teknis pada masing-masing kedeputian.
2. **Belum ditetapkannya pegawai pada unit teknis kedeputian** yang secara khusus ditugaskan sebagai tim kerja IRH, sehingga proses pengumpulan evidence masih terpusat pada Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum Biro Hukum dan Kerja Sama.
3. **Minimnya informasi terkait pengembangan kompetensi** bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. **Masih rendahnya tingkat pemahaman pegawai** mengenai pentingnya Indeks Reformasi Hukum sebagai instrumen penguatan tata kelola hukum dan birokrasi.

## **C. OUTCOME**

Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang Reformasi Hukum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pilar utama dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan di sektor pemuda dan olahraga. Dengan perolehan skor 98,42, Kemenpora telah membuktikan efektivitas dalam menata struktur regulasi yang lebih ramping dan adaptif

terhadap dinamika global. Strategi ke depan diarahkan pada penguatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dan optimalisasi partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan regulasi. Langkah ini memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diterbitkan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda yang inklusif.

#### D. NILAI EFISIENSI



Keberhasilan Kemenpora melampaui target IRH secara signifikan ini membuktikan bahwa manajemen sumber daya di bidang hukum telah dikelola dengan sangat

produktif; di mana dengan serapan anggaran yang terkendali 99,6%, Kemenpora mampu menghasilkan capaian kinerja hukum yang luar biasa, bahkan menyentuh angka 114,25%. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa proses harmonisasi regulasi, kompetensi aparatur hukum, dan kualitas pelayanan hukum di lingkungan Kemenpora tidak sekadar menghabiskan anggaran, melainkan berhasil menciptakan terobosan tata kelola hukum yang berkualitas tinggi dengan biaya yang optimal. Tingginya skor IRH ini menjadi bukti nyata bahwa efisiensi birokrasi telah berhasil memacu efektivitas pelaksanaan reformasi hukum di Kemenpor

Tabel 3.20 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan pada Indeks Reformasi Hukum Kemenpora

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	PAC	PAC Peraturan Pemerintah (PP, RPP)	1	001 Peraturan Pemerintah yang tersusun (RPP)	1.040.000.000	1.036.010.000	99,62%	2	2	100,00%
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	PAD	PAD Peraturan Presiden (PerPres, R.Perpres)	1	001 Peraturan Presiden yang tersusun (PerPres)	1.100.000.000	1.093.740.000	99,43%	2	2	100,00%
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	PAG	PAG Peraturan Menteri (PerMen, Perka, RPermen)	1	001 Peraturan Menteri yang tersusun (PerMen)	800.000.000	792.190.000	99,02%	7	9	128,57%
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	AAH	AAH Peraturan lainnya (peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan)	1	001 Peraturan Lainnya yang tersusun (peraturan)	900.000.000	897.440.000	99,72%	10	33	330,00%
6973 Penyelenggaraan Hukum dan Kerjasama	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957	957 Layanan Hukum (Layanan)	4.060.000.000	4.049.315.435	99,74%	2	2	100,00%
					7.900.000.000	7.868.695.435	99,60%			

## E. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Dalam rilis penilaian IRH oleh Kementerian Hukum dan HAM selaku instansi pembina, Kemenpora berada pada jajaran instansi dengan performa hukum terbaik nasional.

Tabel 3.21 Analisis Skor Perbandingan Skor IRH

Instansi	Skor IRH 2024	Predikat	Perbandingan Posisi
Kemenpora	98,42	Sangat Baik	Unggul dalam aspek penataan regulasi sektor teknis.
Kemenkumham	99,25	Sangat Baik	Sebagai instansi pembina dengan nilai tertinggi.

Instansi	Skor IRH 2024	Predikat	Perbandingan Posisi
Kementerian Agama	96,40	Sangat Baik	Berada di kelompok kategori yang sama dengan Kemenpora.
Rata-rata K/L	85 - 90	Baik	Kemenpora berada jauh di atas rata-rata nasional.

#### F. REKOMENDASI PERBAIKAN

Untuk meningkatkan dan mempertahankan capaian Indeks Reformasi Hukum ke depan, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan **evaluasi mandiri secara berkelanjutan** serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Hukum selaku instansi pembina IRH.
2. **Memenuhi seluruh indikator penilaian IRH** secara sistematis dan terukur.
3. **Membentuk tim kerja IRH pada masing-masing unit teknis kedeputian** guna mendukung pembagian tugas dan efektivitas pengumpulan evidence penilaian.
4. **Membentuk tim asesor dan tim penilai mandiri IRH** di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
5. **Meningkatkan pengelolaan Website JDIH Kementerian Pemuda dan Olahraga** sesuai dengan ketentuan **Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019** tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.



Gambar 3.18 Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kemenpora

### A. CAPAIAN KINERJA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (IKPA) menunjukkan tren perbaikan kinerja dari tahun ke tahun. Pada periode 2021–2023, nilai IKPA relatif stabil pada kisaran 80–83, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 dengan capaian 90,15. Pada Tahun Anggaran 2025, Kemenpora menetapkan target IKPA sebesar 90,15 dengan kategori **Baik**.

Berdasarkan hasil monitoring melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi IKPA Kemenpora Tahun 2025 mencapai **92,19**, atau **102,26%** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran telah melampaui target kinerja yang direncanakan. Dengan capaian tersebut, kinerja pelaksanaan anggaran Kemenpora Tahun 2025 berada pada kategori **Sangat Baik**, sekaligus mencerminkan peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## B. UPAYA DAN KENDALA

### Upaya yang Dilakukan

Untuk mencapai kinerja pelaksanaan anggaran yang optimal, Kemenpora telah melakukan berbagai upaya, antara lain:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi IKPA secara berkala melalui OMSPAN untuk memastikan kepatuhan terhadap indikator penilaian IKPA.
2. Meningkatkan koordinasi antara unit kerja, pengelola keuangan, dan KPPN dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Mendorong percepatan realisasi anggaran dan penyelesaian tagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memperkuat pengendalian internal dalam pengelolaan UP/TUP serta pencatatan dan pelaporan data kontrak.

### Kendala/Hambatan

Meskipun capaian IKPA Tahun 2025 melampaui target, masih terdapat beberapa kendala pada indikator tertentu, antara lain:

1. **Deviasi Halaman III DIPA**, yang disebabkan oleh perencanaan penarikan dana yang belum sepenuhnya selaras dengan realisasi serta perubahan jadwal kegiatan.
2. **Belanja Kontraktual**, yang dipengaruhi oleh keterlambatan proses pengadaan dan penetapan kontrak, serta kecenderungan pendaftaran kontrak yang menumpuk pada triwulan akhir.
3. **Pengelolaan UP dan TUP**, yang masih menghadapi keterlambatan pengajuan SPM GUP/PTUP serta ketidaktepatan perencanaan kebutuhan dana.

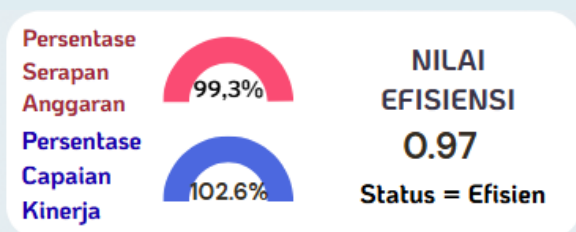
## C. OUTCOME

IKPA bagi Kemenpora bukan sekadar angka administratif, melainkan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata (Value for Money) bagi pembangunan pemuda dan prestasi olahraga. Narasi strategis Kemenpora di tahun 2025 berfokus pada "Kemenpora Reform" melalui Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru yang lebih lincah. Strategi ini

mengintegrasikan perencanaan berbasis risiko untuk meminimalkan deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasi di lapangan. Dengan menjaga nilai IKPA tetap tinggi, Kemenpora mempertegas komitmennya terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik

Transformasi ini didukung oleh pemanfaatan sistem digital dalam pemantauan realisasi secara real-time, yang memungkinkan pimpinan melakukan intervensi cepat jika terjadi kendala penyerapan. Melalui kedisiplinan dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan percepatan belanja kontraktual di awal tahun, Kemenpora berupaya memastikan akselerasi program prioritas nasional tidak terhambat oleh kendala birokrasi keuangan, sekaligus memastikan bahwa seluruh program prioritas nasional di bidang kepemudaan dan olahraga dapat terlaksana secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

#### D. NILAI EFISIENSI



Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif, di mana efektivitas pengelolaan keuangan berhasil

dikonversi secara maksimal menjadi capaian kinerja organisasi yang melampaui target. Hal ini dibuktikan dengan profil Nilai Efisiensi yang secara konsisten berada pada status "Efisien" di angka 0,98, yang mencerminkan ketepatan dalam koordinasi layanan manajemen keuangan kementerian. Keunggulan tersebut terlihat nyata melalui keberhasilan beberapa unit kerja yang mampu meraih Persentase Capaian Kinerja hingga 100% bahkan mencapai 120%, namun tetap menjaga Persentase Serapan Anggaran di angka 99,3%. Capaian ini menegaskan komitmen Kemenpora dalam menerapkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan berorientasi hasil, di mana setiap alokasi dana dikelola dengan prinsip efisiensi yang ketat guna memastikan keberlanjutan program strategis di bidang pemuda dan olahraga.

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	EBD	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955	955 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	22.658.079.000	22.533.238.657	99,45%	1	1	100,00%
7851 Pengelolaan Keuangan dan Umum	EBD	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955	955 Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)	725.516.000	696.752.800	96,04%	1	1	100,00%
					23.383.595.000	23.229.991.457	99,34%			

Tabel 3.22 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora

## E. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Dalam rilis evaluasi IKPA oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan untuk periode 2024, Kemenpora menunjukkan performa yang kompetitif namun masih memiliki ruang untuk peningkatan guna menyamai instansi papan atas.

Tabel 3.23 Perbandingan Nilai IKPA

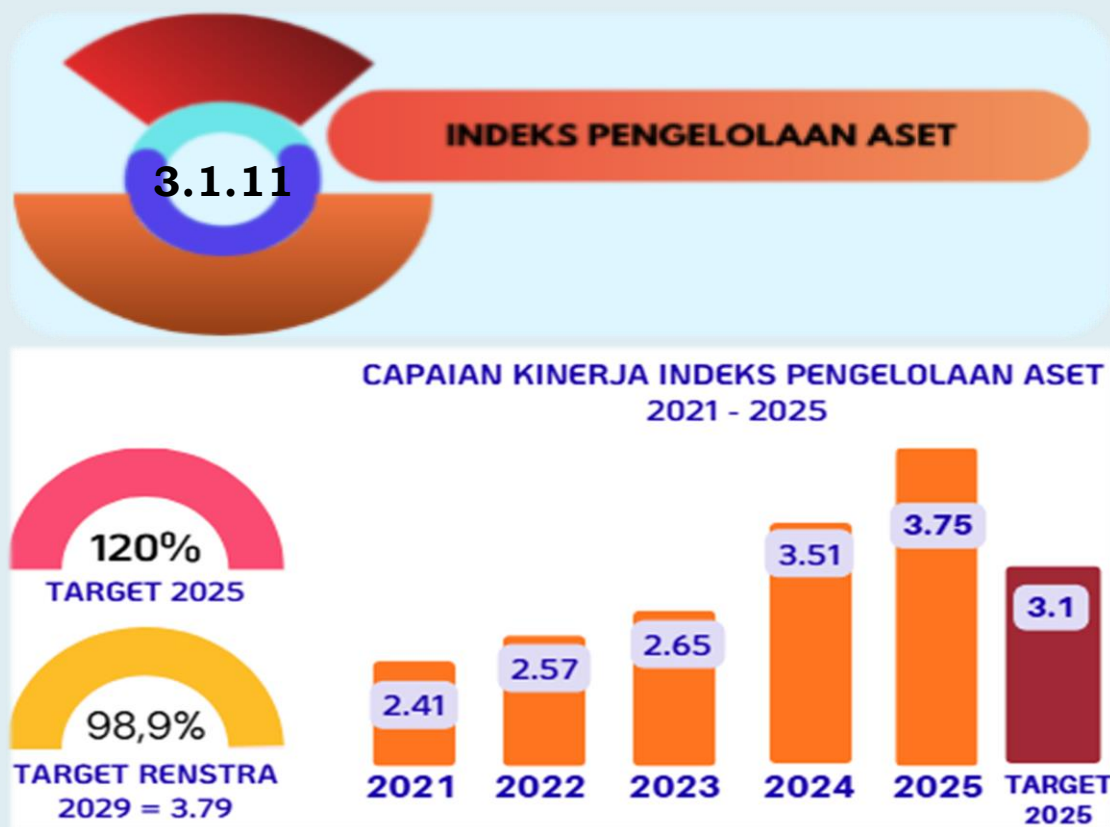
Entitas	Nilai IKPA 2024	Predikat	Analisis Posisi
Kemenpora	~92,00	Sangat Baik	Konsisten di kategori atas, fokus pada peningkatan kualitas perencanaan (Halaman III DIPA).
Itjen Kemkomdigi	100,00	Sempurna	Meraih nilai sempurna melalui kepemimpinan yang kuat dalam pelaksanaan anggaran.
Lembaga Mitra KPPN	97 - 99	Sangat Baik	Rata-rata kementerian besar (seperti Setjen Kemenkes atau Kemlu) berada di kisaran ini.

Entitas	Nilai IKPA 2024	Predikat	Analisis Posisi
Rata-rata Nasional	~91,30	Baik	Kemenpora berada sedikit di atas rata-rata kinerja satker mitra KPPN besar.

## F. PERBAIKAN KINERJA

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran ke depan, rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain:

1. Menyelaraskan penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran per triwulan, serta menjaga deviasi antara rencana dan realisasi tidak melebihi batas yang ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja kontraktual melalui percepatan proses pengadaan, ketepatan waktu pendaftaran kontrak, serta pemerataan distribusi kontrak sepanjang tahun anggaran.
3. Mengoptimalkan pengelolaan UP dan TUP dengan perencanaan yang lebih matang, percepatan revolving UP, serta peningkatan disiplin dalam pertanggungjawaban keuangan.
4. Memperkuat pemantauan dan evaluasi IKPA secara berkelanjutan sebagai instrumen pengendalian kinerja pelaksanaan anggaran, guna menjaga
5. capaian IKPA tetap berada pada kategori Baik atau Sangat Baik.



Gambar 3.19 Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Aset

## A. CAPAIAN KINERJA

Capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) tahun 2025 sebesar 3,49 menunjukkan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang **sangat baik dan melampaui target** yang ditetapkan sebesar 3,10, dengan tingkat capaian mencapai **112,5%**. Kinerja ini mencerminkan konsistensi peningkatan pengelolaan BMN secara berkelanjutan dalam kurun waktu 2021–2025, meskipun terjadi dinamika kebijakan dan perubahan metodologi penilaian pada tahun berjalan.

Dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, capaian IPA tahun 2025 tetap berada pada level kinerja tinggi dan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset telah berjalan semakin tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pemanfaatan aset secara optimal. Capaian tersebut juga menegaskan peran aktif Tim BMN dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BMN, peningkatan kualitas pelaporan, serta optimalisasi pemanfaatan aset negara.

## B. UPAYA DAN KENDALA

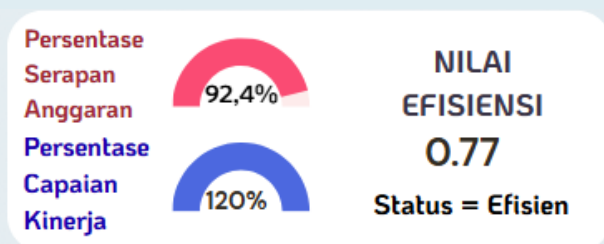
Meskipun di tahun ini Biro Keuangan dan Umum berhasil memenuhi nilai IPA, namun terjadi penurunan capaian nilai dari tahun 2024. Hal ini disebabkan beberapa paramater IPA yang ditetapkan pada tahun 2025 tidak dapat tercapai, yaitu sebagai berikut:

- a) Target PNBPN tahun 2025 ditetapkan terlalu tinggi, karena penyusunannya mengikuti capaian PNBPN tahun 2024. Pada tahun 2024, capaian PNBPN sebagian besar berasal dari hasil lelang penghapusan Gedung/Bangunan Wisma Soegondo serta bangunan lainnya di Cibubur dalam rangka pembangunan Cibubur Youth Elite Sport Center. Kegiatan lelang tersebut bukan merupakan kegiatan rutin Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga tidak dapat dijadikan dasar realistis dalam penyusunan target PNBPN tahun 2025.
- b) Perubahan metodologi penilaian IPA, terutama pada Parameter 1 terkait saldo temuan BMN pada LKPP s.d. tahun 2024 yang ditindaklanjuti pada tahun 2025, yang berdampak cukup signifikan terhadap nilai.
- c) Tindak lanjut temuan terkait Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat/Pemda memerlukan waktu penyelesaian yang panjang, karena beberapa Pemerintah Daerah sebagai penerima bantuan sarana dan prasarana olahraga menolak hibah.
- d) Parameter kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK sulit ditingkatkan karena terdapat BMN yang berada di Hambalang yang belum dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan.

## C. OUTCOME

Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang aset negara bukan sekadar inventaris fisik, melainkan modal strategis untuk mendukung ekosistem pemuda dan olahraga nasional. Narasi strategis Kemenpora di tahun 2025 berfokus pada prinsip "Highest and Best Use", di mana setiap sarana dan prasarana aparatur serta prasarana olahraga dikelola untuk mencapai utilitas maksimal sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK). Strategi ini mengintegrasikan digitalisasi manajemen aset dengan sistem pengadaan yang transparan, guna memastikan sarana publik tetap prima untuk melayani masyarakat dan stakeholder keolahragaan. Dengan meraih predikat juara nasional dalam pengelolaan aset, Kemenpora mempertegas komitmennya sebagai kementerian yang andal, profesional, dan berintegritas dalam menjaga kekayaan negara demi kemajuan prestasi bangsa.

## D. NILAI EFISIENSI



Keberhasilan Kemenpora dalam melampaui target Indeks Pengelolaan Aset, yang mencatatkan skor 3.75 dari target 3.1. Korelasi ini membuktikan bahwa manajemen sumber daya kementerian telah berjalan sangat

produktif, di mana optimalisasi pemanfaatan aset dilakukan secara selaras dengan pengendalian anggaran dan pencapaian target kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset tetap dan barang milik negara (BMN) di Kemenpora tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga efektif dalam mendukung operasional program kerja tanpa memerlukan pemborosan anggaran, sehingga menciptakan value for money yang signifikan dalam siklus logistik dan pemeliharaan infrastruktur kementerian.

Tabel 3.24 Alokasi Rincian *Output* intervensi kegiatan pada Indeks Pengelolaan Aset Kemenpora

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
7851 Pengelolaan Keuangan dan Umum	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956	956 Layanan BMN (Layanan)	3.413.033.000	3.055.235.738	89,52%	1	1	100,00%
6971 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	956	956 Layanan BMN (Layanan)	586.967.000	558.774.496	95,20%	1	1	100,00%

## E. ANALISIS PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2025, Pengelola Barang menerbitkan regulasi terbaru terkait pengukuran kinerja pengelolaan BMN, yaitu KMK 39/KM.6/2025 tentang Indikator Kinerja Pengelolaan BMN. Parameter yang menjadi indikator kinerja pengelolaan BMN meliputi:

1. Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN;
2. Realisasi PNB dari pengelolaan aset;
3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN;
4. Asuransi BMN;
5. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN;
6. Tindak lanjut BMN rusak berat;

7. Sertifikasi BMN; dan
8. Penggunaan BMN sesuai ketentuan.

Dalam konteks benchmarking, capaian IPA Kementerian Pemuda dan Olahraga yang **melampaui target nasional** menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah selaras dengan arah kebijakan pengelolaan aset pemerintah pusat. Hal ini diperkuat dengan diraihnya **Juara I Kategori Utilisasi Barang Milik Negara Kelompok II** pada ajang **Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025** yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Prestasi tersebut menjadi indikator eksternal yang menegaskan bahwa pemanfaatan BMN di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga telah dilakukan secara optimal an memberikan nilai tambah nyata.

Gambar 3.20 Foto Penghargaan Reksa Bandha



## F. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Dalam hal perhitungan IPA tahun 2025, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN dan memperkuat capaian kinerja pada tahun berikutnya.

1. Penyusunan target PNBPN yang lebih realistis, penyusunan target pnbp berdasarkan capaian PNBPN rutin (penghapusan barang rusak, sewa dll) dan bukan berdasarkan capaian bersifat insidental seperti lelang penghapusan gedung dan bangunan.
2. Melakukan rekonsiliasi berkala dengan DJKN dalam menyusun langkah-langkah percepatan dan rekomendasi penyelesaian temuan, serta menetapkan tindak lanjut untuk menurunkan saldo temuan terkait BMN.
3. Surat Permohonan Hibah dan Surat Pernyataan Penerimaan Hibah diserahkan bersamaan dengan permohonan bantuan persediaan diserahkan ke masyarakat/pemda diajukan.

4. Mengidentifikasi BMN yang belum sesuai penggunaan SBSK serta menyusun rencana strategi pengelolaan BMN.



Gambar 3.21 Capaian Kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK

#### A. Capaian Kinerja

Indikator **Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi APIP/BPK RI yang Ditindaklanjuti** pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan ukuran tingkat kepatuhan dan efektivitas unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagai amanah **Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004** tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tabel 3.25 Tindak Lanjut Rekomendasi APIP/BPK RI yang Ditindaklanjuti

NO	TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI	SESUAI
1	2006	8	8
2	2007	5	4
3	Prasarana 2008	2	0
4	BA 2009	5	4
5	2008	9	9
6	2009	5	5
7	BA 2010	2	1
8	LK 2010	6	5
9	LK 2011	36	31
10	KN 2011-2012	13	12
11	LK 2012	47	44
12	PDTT 2012-2013	9	7
13	LK 2013	17	15
14	LK 2014	28	24
15	PDTT 2014-2015	3	2
16	LK 2015	49	44
17	LK 2016	39	31
18	LK 2017	12	11
19	LK 2018	12	12
20	PDTT 2019	3	3
21	LK 2019	18	14
22	LK 2020	19	15
23	LK 2021	14	14
24	PDTT 2022	2	2
25	LK 2022	23	22
26	LK 2023	13	9
27	PDTT 2023	7	6
	<b>TOTAL</b>	<b>406</b>	<b>354</b>
<b>Penyelesaian Rekomendasi</b>			<b>87.1921</b>

Berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dan pengawasan APIP sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2023, terdapat **406 rekomendasi**, dengan **354 rekomendasi telah dinyatakan sesuai**, sehingga persentase penyelesaian rekomendasi mencapai **87,19%**.

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar **72%**, sementara realisasi capaian mencapai **87,19%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **121,10% dari target**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Kemenpora dalam

menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan berada pada kategori **sangat baik** dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, meskipun terdapat perbedaan nomenklatur indikator, substansi pengukuran tetap mengacu pada tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengawasan. Dengan demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan **tren perbaikan dan konsistensi peningkatan kualitas tata kelola serta akuntabilitas keuangan** di lingkungan Sekretariat Kemenpora.

## B. Upaya dan Kendala/Hambatan

### 1. Upaya yang Dilakukan

Dalam rangka meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi APIP/BPK RI, Sekretariat Kemenpora telah melakukan beberapa upaya konkret, antara lain:

1. **Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data rekomendasi lintas tahun**, termasuk rekomendasi sejak tahun 2006.
2. **Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat dan unit kerja terkait** untuk percepatan penyelesaian rekomendasi yang belum tuntas.
3. **Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala** terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan LK, PDTT, dan pemeriksaan kinerja.
4. **Mendorong penyelesaian rekomendasi secara substansial**, tidak hanya administratif, termasuk perbaikan sistem, prosedur, dan pengendalian intern.

### 2. Kendala/Hambatan

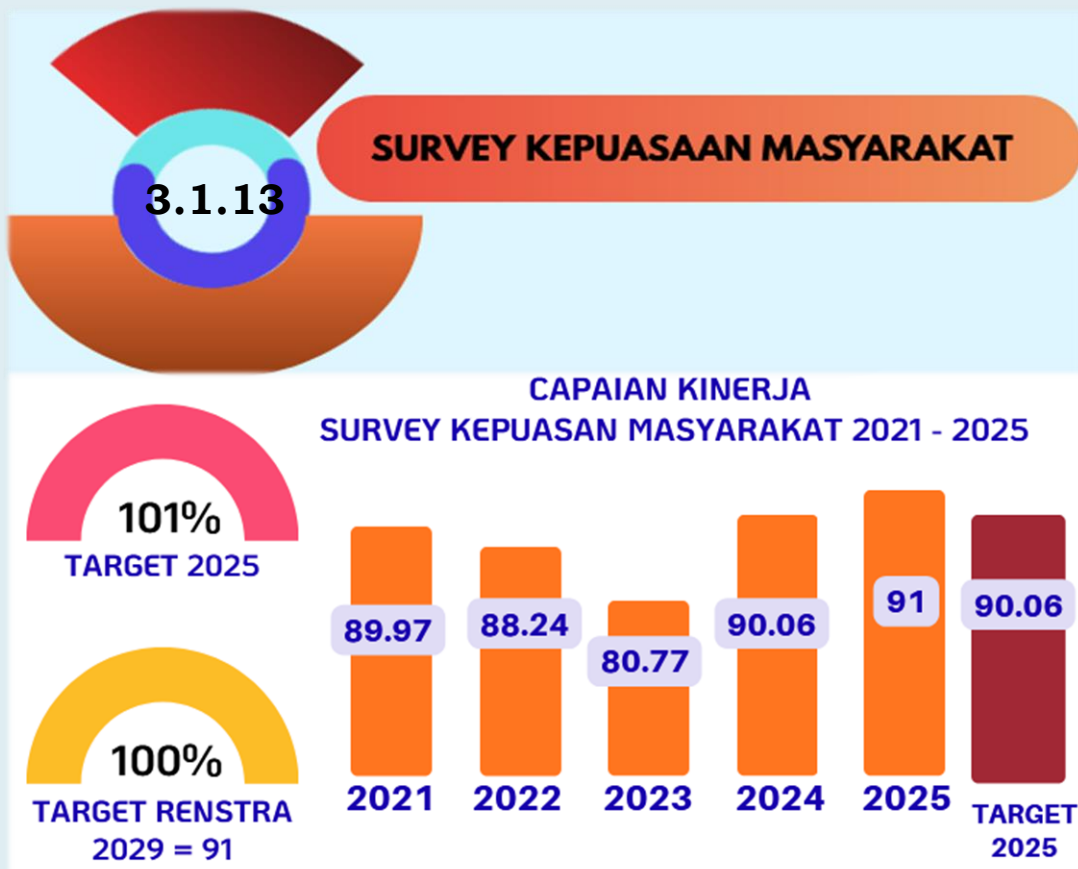
Dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi penyelesaian seluruh rekomendasi, antara lain:

1. **Sebagian rekomendasi berasal dari pemeriksaan lama**, sehingga dokumen pendukung dan penanggung jawab kegiatan tidak selalu tersedia secara lengkap.
2. **Rekomendasi PDTT dan prasarana bersifat kompleks**, memerlukan waktu dan koordinasi lintas unit kerja.
3. **Rekomendasi lintas tahun dan lintas program**, yang memerlukan penyesuaian kebijakan dan penyempurnaan prosedur secara bertahap.

### C. Rekomendasi Perbaikan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja tindak lanjut rekomendasi APIP/BPK RI pada periode berikutnya, Sekretariat Kemempora merekomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. **Memprioritaskan penyelesaian rekomendasi lama**, khususnya yang berasal dari pemeriksaan prasarana dan PDTT lintas tahun.
2. **Memperkuat peran Inspektorat dalam monitoring dan pendampingan teknis**, agar penyelesaian rekomendasi lebih tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. **Meningkatkan konsistensi pencatatan dan pelaporan tindak lanjut rekomendasi**, sehingga data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Melakukan harmonisasi indikator kinerja**, agar perbedaan nomenklatur indikator antar tahun tidak mempengaruhi kesinambungan pengukuran kinerja.



Gambar 3.22 Capaian Kinerja Indikator Survey Kepuasan Masyarakat

## A. Capaian Kinerja

Pada Tahun 2025, kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyelenggaraan pelayanan publik menunjukkan capaian yang **sangat baik**. Hal ini tercermin dari **nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 91**, melampaui target tahun 2025 sebesar **90,06**, dengan tingkat capaian kinerja mencapai **100,44%**. Capaian tersebut juga mengalami **peningkatan sebesar 0,95 poin** dibandingkan tahun 2024 yang memperoleh nilai 90,05.

Hasil survei yang dilaksanakan pada periode 4 Juli–30 November 2025 melibatkan **8.457 responden** dari 5 unit Eselon I dan 27 unit Eselon II, sehingga dapat menggambarkan persepsi masyarakat pengguna layanan secara komprehensif.



The screenshot shows a web interface for SKM evaluation. At the top, there are filters for 'Periode' (01-01-2025 to 31-12-2025) and 'Unit Kerja' (Kementerian Pemuda dan Olahraga). Below the filters is a table with the following data:

#	Unsur SKM	Total Skor	Indeks	Keterangan
1	Persyaratan	37761	89,84	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	37631	89,53	Sangat Baik
3	Waktu Penyelesaian	37196	88,49	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	40149	95,52	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi jenis pelayanan	37634	89,54	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	38162	90,79	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	38465	91,51	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	40721	96,88	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	37942	90,27	Sangat Baik
IKM			91,38	Sangat Baik

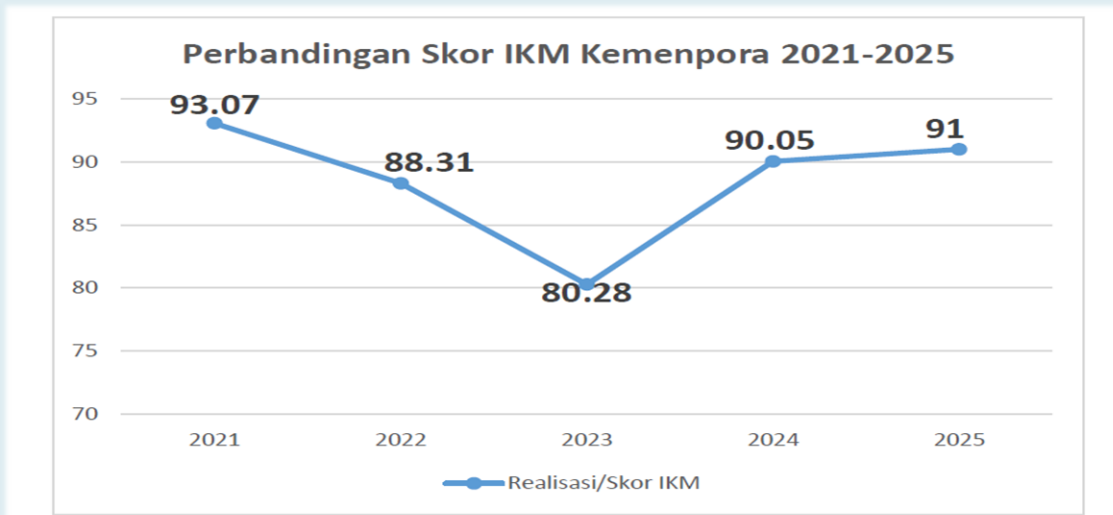
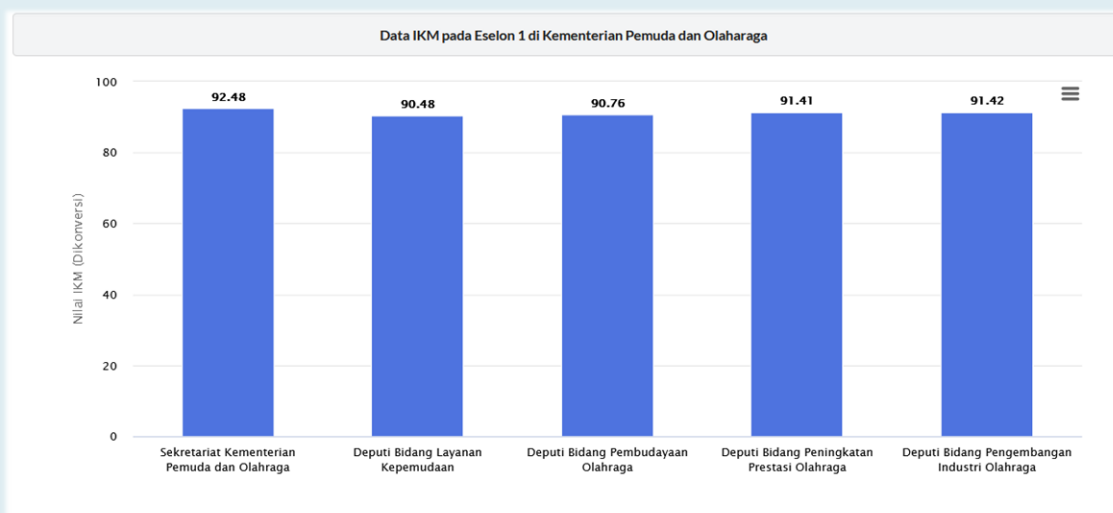
Gambar 3.23 Unsur penilaian SKM

Secara tren lima tahun terakhir (2021–2025), nilai IKM Kemenpora relatif stabil pada kategori **Sangat Baik**, dengan fluktuasi yang dipengaruhi oleh cakupan periode survei dan jumlah responden, khususnya pada tahun 2023. Peningkatan capaian tahun 2025 mencerminkan konsistensi komitmen Kemenpora dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem, digitalisasi survei (e-SKM), serta kolaborasi lintas unit kerja.

Hasil penilaian terhadap sembilan unsur pelayanan menunjukkan seluruh unsur berada pada kategori **Sangat Baik** dengan nilai IKM sebesar **91,38**. Unsur

**Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan** mencatat nilai tertinggi (96,88), diikuti **Biaya/Tarif** (95,52), yang mencerminkan efektivitas mekanisme pengaduan serta transparansi pelayanan. Unsur **Perilaku** dan **Kompetensi Pelaksana** juga memperoleh nilai di atas 90, menunjukkan profesionalisme petugas pelayanan. Adapun unsur **Waktu Penyelesaian** memperoleh nilai relatif terendah (88,49), meskipun tetap pada kategori Sangat Baik, sehingga menjadi area yang perlu terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

Grafik 3.3 Data IKM pada Eselon 1 Kemenpora



Grafik 3.4 Perbandingan Skor IKM Kemenpora 2021-2025

Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi e-SKM Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025, seluruh unit Eselon I memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kategori **Sangat Baik** dengan rentang nilai di atas 90. Nilai tertinggi dicapai oleh Sekretariat Kemenpora sebesar **92,48**, diikuti oleh Deputi

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga yang masing-masing mencatat nilai di atas **91**. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada seluruh unit Eselon I Kemempora telah berjalan secara konsisten, efektif, dan memenuhi harapan pengguna layanan.

## **B. UPAYA DAN KENDALA/HAMBATAN**

### **Upaya yang Telah Dilakukan**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menindaklanjuti hasil SKM tahun sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:

1. **Penguatan tata kelola pelayanan publik**, melalui pendampingan penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit kerja;
2. **Pelaksanaan Bimbingan Teknis** terkait SOP dan Standar Pelayanan bagi seluruh unit kerja;
3. **Optimalisasi kanal pengaduan publik**, seperti SP4N-LAPOR!, website resmi, dan media sosial, yang mendorong peningkatan signifikan pada unsur penanganan pengaduan;
4. **Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)** sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan;
5. **Pemanfaatan aplikasi e-SKM** sebagai instrumen pengumpulan dan pengolahan data survei secara transparan dan terintegrasi.

### **Kendala/Hambatan**

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain:

1. **Belum seluruh unit kerja memiliki dan menerapkan Standar Pelayanan dan SOP secara lengkap**, khususnya untuk seluruh jenis layanan yang diselenggarakan;
2. **Variasi waktu penyelesaian layanan** yang dirasakan masyarakat akibat belum terstandarisasinya proses layanan di seluruh unit;

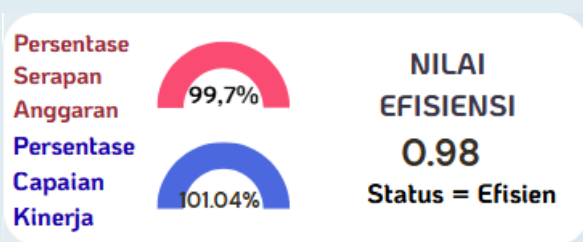
3. **Penurunan jumlah responden** pada beberapa unit kerja tertentu, yang dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan program dan perubahan struktur organisasi;
4. **Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan** pada sebagian unit kerja, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas layanan.

Kendala tersebut tercermin dari unsur **Waktu Penyelesaian Pelayanan** yang masih memperoleh nilai terendah sebesar **87,95** dengan kategori Baik.

### C. OUTCOME

Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang kepuasan masyarakat sebagai indikator fundamental dalam kesuksesan Reformasi Birokrasi. Narasi strategis Kemenpora di tahun 2026 berfokus pada "Tata Kelola Bersih dan Program Prioritas Terukur". Strategi ini diwujudkan melalui penguatan sistem layanan digital melalui aplikasi E-SKM Kemenpora yang lebih optimal dalam aspek keamanan dan penyajian data. Dengan capaian nilai mutu "A", Kemenpora berkomitmen untuk tidak sekadar memenuhi standar administratif, tetapi menciptakan customer experience yang responsif terhadap kebutuhan pemuda dan stakeholder olahraga. Pendekatan pelayanan publik diarahkan untuk mendukung momentum Bonus Demografi dengan memastikan setiap layanan kementerian—mulai dari fasilitasi kewirausahaan pemuda hingga infrastruktur olahraga—mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### D. NILAI EFISIENSI



Manajemen sumber daya di kementerian telah bertransformasi menjadi pendorong kualitas layanan publik yang nyata, di mana optimalisasi anggaran berbanding lurus dengan tingkat kepuasan

penerima layanan. Data menunjukkan bahwa unit-unit kerja mampu meraih Persentase Capaian Kinerja yang sangat tinggi, bahkan hingga menyentuh angka 101.04%, namun tetap menjaga Persentase Serapan Anggaran yang disiplin di rentang 99.7%. Efisiensi ini mengindikasikan bahwa alokasi biaya operasional tidak hanya terserap secara administratif, tetapi efektif dalam mendanai inovasi

dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat, sehingga mampu menciptakan nilai tambah (value for money) yang dirasakan langsung oleh publik dalam bentuk pelayanan yang lebih responsif dan akuntabel.

Tabel 3.26 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Tingkat Survey Kepuasan Kemenpora

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6974 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Keorganisasian	EBC	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	954	954 Layanan Manajemen SDM (Layanan)	117.560.000	117.260.000	99,74%	1	1	100,00%

## E. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 dan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik ke depan, Kementerian Pemuda dan Olahraga merekomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

1. **Percepatan penyusunan, penetapan, dan implementasi Standar Pelayanan serta SOP** pada seluruh unit kerja dan seluruh jenis layanan;
2. **Peningkatan konsistensi penerapan standar waktu pelayanan**, sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan keseragaman dalam penyelesaian layanan;
3. **Penguatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik** secara berkala untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan;
4. **Optimalisasi Forum Konsultasi Publik** sebagai sarana strategis dalam menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat pengguna layanan;
5. **Peningkatan kapasitas SDM dan dukungan sarana prasarana pelayanan**, guna mendukung pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan responsif.

Melalui implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kepuasan masyarakat.



Gambar 3.25 Capaian Kinerja Indikator Persentase Opini Positif Media terhadap Pemberitaan Kemenpora

### A. CAPAIAN KINERJA

Persentase opini positif media terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2025 mencapai **92,6%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **91%**. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi komunikasi publik yang dijalankan secara terintegrasi dan proaktif oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, khususnya melalui penguatan media monitoring, aktivasi juru bicara, serta kampanye kebijakan yang terencana dan berkelanjutan. Tingginya sentimen positif juga didukung oleh konsistensi penyampaian pesan strategis Kemenpora dan intensitas pemberitaan yang konstruktif di berbagai kanal media.

Capaian kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemberitaan media arus utama maupun media daring nasional terhadap program, kebijakan, dan kegiatan Kemenpora berada dalam kategori positif dan netral konstruktif. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi publik yang dijalankan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, khususnya dalam pengelolaan isu, penyampaian pesan strategis pimpinan, serta kecepatan dan ketepatan dalam merespons dinamika informasi publik.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM kehumasan, serta pemanfaatan sistem monitoring media yang lebih terstruktur. Namun demikian, evaluasi internal juga menunjukkan perlunya peningkatan kualitas analisis isu dan narasi strategis agar pemberitaan positif tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak reputasional jangka panjang bagi Kemenpora

## **B. UPAYA DAN KENDALA**

Meskipun capaian indikator telah memenuhi target, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain tingginya dinamika isu publik di sektor kepemudaan dan olahraga, keterbatasan sumber daya kehumasan dibandingkan dengan volume eksposur media, serta masih adanya potensi misinformasi yang berkembang di ruang digital. Kondisi ini menuntut kesiapsiagaan tinggi dan kemampuan respons cepat dalam pengelolaan komunikasi krisis.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini antara lain melalui penguatan manajemen media relations, peningkatan kualitas siaran pers dan konten kehumasan, pelaksanaan agenda media briefing dan media gathering secara terencana, serta optimalisasi kanal komunikasi digital resmi Kemenpora. Selain itu, koordinasi intensif dengan unit teknis di lingkungan Kemenpora juga dilakukan untuk memastikan keselarasan substansi pesan yang disampaikan kepada publik.

Sebagai langkah perbaikan kinerja ke depan, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol akan memperkuat fungsi media intelligence, mengembangkan standar operasional pengelolaan isu strategis dan krisis komunikasi, serta meningkatkan kolaborasi dengan media nasional dan komunitas digital. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan persentase opini positif media secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan nilai tambah kinerja kehumasan Kemenpora.

## **C. OUTCOME**

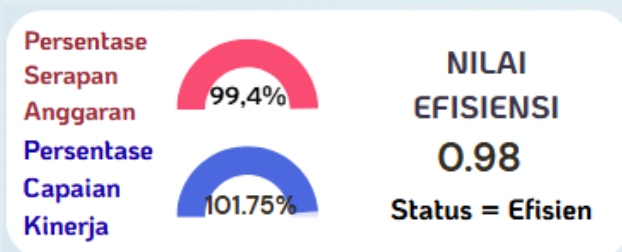
Tingginya persentase opini positif media terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2025 memberikan dampak nyata terhadap penguatan citra dan reputasi kelembagaan di tingkat nasional. Capaian ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap kebijakan, program, dan kinerja Kemenpora, serta memperkuat persepsi positif pemangku kepentingan terhadap peran strategis Kemenpora dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga.

Keberhasilan pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan responsif juga berdampak pada terciptanya iklim informasi yang kondusif, di mana isu-isu strategis dapat dikelola secara lebih terarah dan proporsional. Hal ini mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Kemenpora, meminimalkan potensi eskalasi isu negatif, serta memperkuat legitimasi kebijakan publik yang diambil oleh pimpinan.

Selain itu, outcome dari capaian indikator ini tercermin pada meningkatnya daya jangkau dan kualitas penyampaian pesan strategis Kemenpora kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan tidak hanya diterima secara luas, tetapi juga dipahami secara lebih baik oleh publik, sehingga mendorong partisipasi, dukungan, dan keterlibatan masyarakat terhadap program-program Kemenpora.

Secara kelembagaan, capaian ini memperkuat fungsi kehumasan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan terjaganya sentimen positif media secara berkelanjutan, Kemenpora memiliki fondasi reputasi yang kuat untuk menghadapi dinamika isu publik di masa mendatang, sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan nilai tambah kinerja komunikasi publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### D. NILAI EFISIENSI



Tingginya efisiensi ini mencerminkan bahwa manajemen anggaran komunikasi publik di Kemenpora telah dikelola secara sangat produktif, di mana optimalisasi fungsi kehumasan berjalan selaras dengan

pengendalian biaya operasional. Korelasi data menunjukkan bahwa dengan tingkat Serapan Anggaran yang terkendali 99,4%, kementerian mampu menghasilkan output kinerja yang melampaui standar, bahkan menyentuh angka 101.75% pada beberapa aspek fungsional. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi diseminasi informasi dan manajemen isu yang dilakukan PPID serta Biro Humas tidak hanya sekadar menghabiskan anggaran, melainkan berhasil membangun citra positif institusi melalui penggunaan sumber daya yang hemat namun berdampak luas. Capaian ini mempertegas bahwa efisiensi birokrasi di Kemenpora menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan media yang kredibel dan akuntabel.

Tabel 3.27 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Persentase Opini Positif Media Terhadap Kemenpora

Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6971 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Protokol	EBA	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958	958 Layanan Hubungan Masyarakat (Layanan)	16.502.000.000	16.403.305.939	99,40%	1	1	100,00%



Gambar 3.26 Capaian Kinerja Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan

#### A. CAPAIAN KINERJA

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan yang disusun oleh

kementerian/lembaga. Penilaian IPPN berfokus pada sejauh mana dokumen perencanaan kementerian telah disusun secara **selaras, terintegrasi, dan konsisten** dengan tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

IPPN menilai kualitas perencanaan dengan menitikberatkan pada keselarasan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penganggaran, serta keterkaitannya dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian, IPPN tidak hanya menilai kelengkapan dokumen perencanaan, tetapi juga konsistensi substansi dan keterhubungan antar dokumen dalam satu siklus perencanaan pembangunan.

Metode pengukuran IPPN dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh kementerian dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun pengukuran. Penilaian ini mencerminkan kualitas perencanaan yang telah dihasilkan dan diimplementasikan oleh kementerian secara komprehensif.

Sumber data pengukuran IPPN berasal dari Hasil Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Formulasi perhitungan IPPN disusun berdasarkan penjumlahan nilai dari tiga aspek utama, yaitu:

**Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) =  
Aspek Integrasi + Aspek Sinkronisasi + Aspek Keterhubungan Perencanaan  
Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja**

Gambar 3.23 Formulasi Perhitungan Persentase Opini Positif Media terhadap Pemberitaan Kemempora

### 1. Aspek Integrasi

Aspek Integrasi dinilai berdasarkan tingkat keselarasan dokumen perencanaan internal kementerian dengan dokumen perencanaan nasional, yang meliputi:

- Tingkat kepatuhan **Rencana Strategis (Renstra) K/L** terhadap RPJMN;
- Tingkat konsistensi **Rencana Kerja (Renja) K/L** terhadap Renstra K/L;
- Tingkat kepatuhan **Renja K/L** terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

## 2. Aspek Sinkronisasi

Aspek Sinkronisasi menilai kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran, yang meliputi:

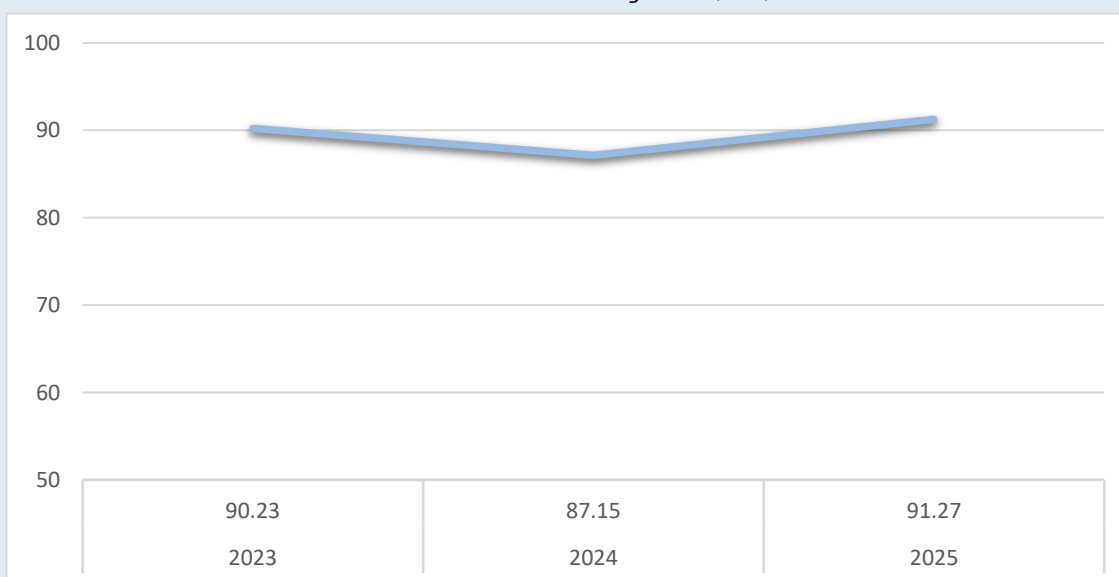
- Kepatuhan anggaran K/L dalam membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan;
- Kesesuaian pagu anggaran RKA K/L dengan pagu anggaran Renja K/L;
- Kepatuhan anggaran K/L dalam membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.

## 3. Aspek Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

Aspek ini dinilai berdasarkan sejauh mana target dan sasaran pembangunan nasional telah diterjemahkan secara konsisten menjadi target dan sasaran kinerja kementerian/lembaga, sehingga mendukung pencapaian kinerja pembangunan secara terukur dan akuntabel.

Dengan metode pengukuran tersebut, capaian IPP Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebesar **91,27** mencerminkan keberhasilan Kemenpora dalam menjaga integrasi, sinkronisasi, dan keterhubungan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan perencanaan kinerja. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di lingkungan Kemenpora telah berjalan secara selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, konsisten antar dokumen, serta mendukung penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana diharapkan dalam evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Grafik 3.6 Tren Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Tahun 2021–2025



Grafik tren Indeks Perencanaan Pembangunan (IPP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021–2025 menunjukkan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan, meskipun dalam perjalanannya terdapat dinamika capaian dari tahun ke tahun.

Pada periode Tahun 2021–2022, capaian IPP menunjukkan upaya penguatan fondasi perencanaan, khususnya dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan strategis dan penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran. Upaya tersebut menjadi dasar bagi peningkatan kinerja perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada Tahun 2023, capaian IPP mencapai **90,23**, yang mencerminkan semakin baiknya konsistensi dokumen perencanaan, keterkaitan antara sasaran, indikator, dan program/kegiatan, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada Tahun 2024 terjadi penurunan capaian menjadi **87,15**, yang dipengaruhi oleh kebutuhan penyesuaian dokumen perencanaan terhadap dinamika kebijakan serta proses harmonisasi indikator kinerja.

Pada Tahun 2025, capaian IPP meningkat signifikan menjadi **91,27**, melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya sekaligus melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan Kemenpora dalam memperkuat kualitas dan konsistensi perencanaan, meningkatkan koordinasi antarunit kerja, serta memastikan keselarasan antara Renstra Kemenpora, perencanaan tahunan, dan RPJMN.

Secara keseluruhan, tren IPP Tahun 2021–2025 menggambarkan komitmen Kemenpora dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, adaptif, dan akuntabel sebagai fondasi pencapaian kinerja pembangunan nasional.

## B. UPAYA DAN KENDALA

Dalam rangka meningkatkan capaian IPP, Kemenpora telah melakukan berbagai upaya strategis, antara lain:

1. Penguatan kualitas penyusunan dan reviu dokumen perencanaan agar selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan.
2. Peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam proses perencanaan, penganggaran, serta penetapan indikator kinerja.

3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja.
4. Penyesuaian dokumen perencanaan secara responsif terhadap dinamika kebijakan dan arahan pimpinan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan antara lain masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antarunit kerja terkait indikator dan metodologi penilaian IPP, adanya kebutuhan penyesuaian dokumen perencanaan akibat perubahan kebijakan strategis, serta keterbatasan waktu dalam proses penyempurnaan dan harmonisasi dokumen perencanaan.

### C. OUTCOME

Capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sebesar 91,27 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan di lingkungan Kemenpora. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan telah berjalan secara terintegrasi, sinkron, dan konsisten antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penganggaran, serta perencanaan kinerja, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara lebih terarah dan terukur.

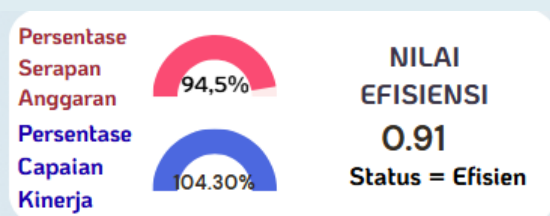
Outcome dari capaian IPPN ini tercermin pada meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Kemenpora, karena perencanaan yang disusun telah selaras dengan prioritas nasional serta didukung oleh penganggaran yang tepat sasaran. Keterhubungan yang kuat antara sasaran pembangunan, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya mendorong pelaksanaan program yang lebih fokus, efisien, dan berdampak nyata bagi pembangunan kepemudaan dan olahraga.

Selain itu, capaian IPPN yang tinggi turut memperkuat akuntabilitas kinerja Kemenpora, khususnya dalam kerangka evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dokumen perencanaan yang konsisten dan berkualitas menjadi dasar yang kuat bagi pengukuran kinerja, pelaporan, serta pengambilan keputusan berbasis data dan hasil evaluasi.

Secara kelembagaan, keberhasilan ini membangun fondasi perencanaan pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan di lingkungan Kemenpora. Dengan kualitas perencanaan yang semakin baik, Kemenpora memiliki kapasitas yang

lebih kuat dalam merespons dinamika kebijakan, menjaga kesinambungan pembangunan, serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan olahraga.

#### D. NILAI EFESIENSI



Tingginya indeks perencanaan ini mencerminkan kualitas sinkronisasi antara perencanaan program dengan realisasi anggaran yang sangat akurat. Hal ini dibuktikan melalui data kinerja yang menunjukkan bahwa Kemenpora

mampu menghasilkan output yang melampaui ekspektasi capaian kinerjahingga mencapai 104,30% dengan tetap menjaga Persentase Serapan Anggaran yang disiplin di angka 94,5%. Keberhasilan melampaui target indeks ini membuktikan bahwa proses perencanaan pembangunan di kementerian telah menerapkan prinsip value for money, di mana alokasi dana disusun secara tajam untuk mendukung sasaran strategis tanpa terjadi inefisiensi belanja, sehingga memperkuat akuntabilitas kinerja kementerian secara keseluruhan.

Tabel 3.28 Alokasi Rincian Output intervensi kegiatan pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Kemenpora

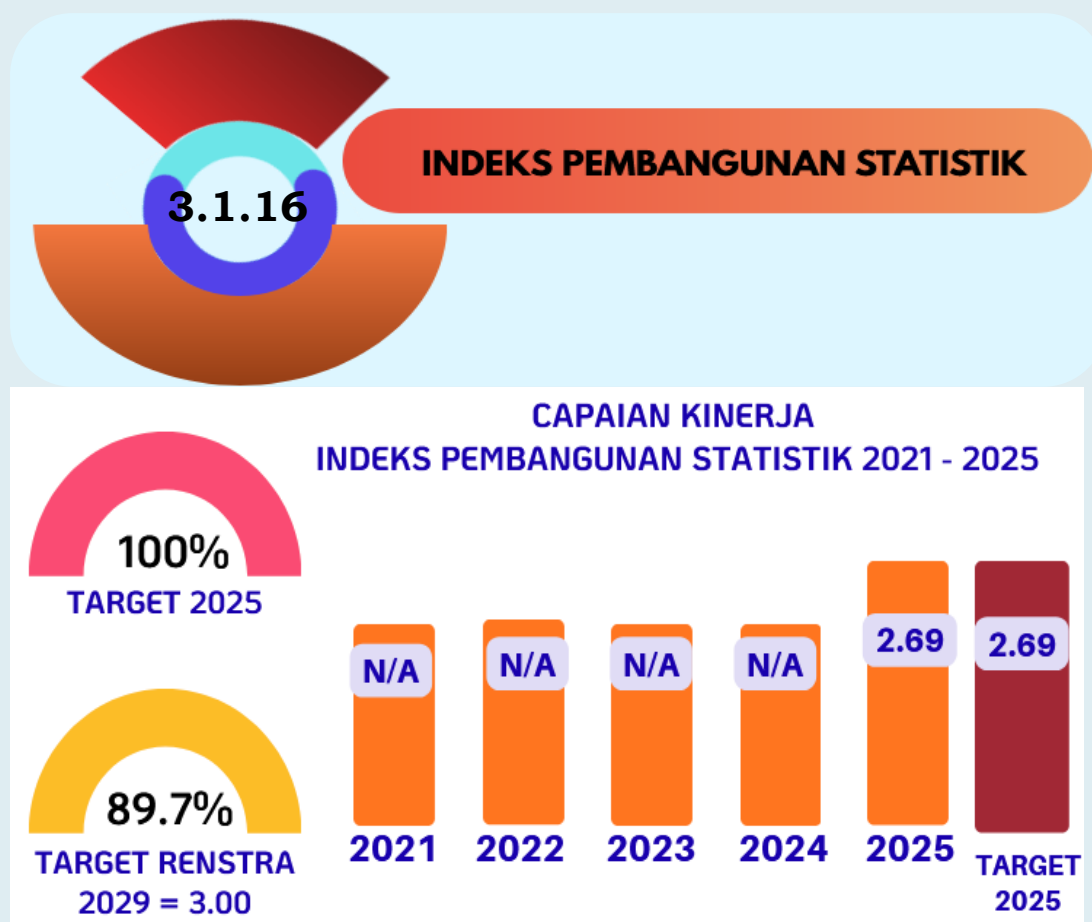
Kegiatan	Kode KRO	KRO	Kode RO	RO	PAGU	REALISASI	% RA	Target Volume Output	Realisasi Volume Output	% RVO
6972 Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Kinerja, dan Data	EBD	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan)	19.962.316.000	18.872.263.954	94,54%	1	1	100,00%

#### E. REKOMENDASI PERBAIKAN

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas capaian IPP ke depan, Kemenpora perlu melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia perencana melalui bimbingan teknis dan pendampingan yang berkelanjutan.
2. Memperkuat pengendalian, pemantauan, dan evaluasi perencanaan agar keselarasan antara Renstra Kemenpora, perencanaan tahunan, dan RPJMN tetap terjaga.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi guna mendukung konsistensi data dan indikator kinerja.

4. Meningkatkan koordinasi lintas unit kerja sejak tahap perencanaan awal untuk meminimalkan kebutuhan penyesuaian dokumen di tahap akhir. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas perencanaan pembangunan Kemenpora dapat terus meningkat dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.



Gambar 3.29 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Statistik

#### A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor, BPS melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral kepada K/L/D termasuk Kementerian Pemuda

dan Olahraga. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral.

IPS menggambarkan sejauh mana Kemenpora mengelola data secara terstandar, menyediakan data yang berkualitas, mutakhir, dan mudah diakses, memiliki tata kelola statistik yang baik, dan mengoptimalkan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan dengan tujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Kemenpora. Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator sebagai berikut :

Tabel 3.29 Penilaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan EPPS

• DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk
	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Kelepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas			SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik				
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik			Penguatan SSN Berkelanjutan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik			Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data	

Tahun 2025, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, rencana *Grand Design*

RB 2025-2045 dan *Roadmap* RB 2025-2029, kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Upaya pembangunan statistik sektoral difokuskan untuk pembinaan statistik yang lebih intensif dalam rangka perbaikan tata kelola statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah berdasarkan rekomendasi hasil EPSS 2024.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Kementerian Pemuda dan Olahraga** tahun 2024 adalah **2,69** dengan predikat **“Baik”**. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.30 Hasil Penilaian EPPS untuk Indeks Pembangunan Statistik Kemenpora

DOMAIN	BOBOT	NILAI NASIONAL	NILAI PENILAIAN KEMENPORA	HASIL
Domain Prinsip SDI	28%	2,43	3,00	
Domain Kualitas Data	24%	2,27	2,53	
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,47	2,68	
Domain Kelembagaan	17%	2,32	2,65	
Domain Statistik Nasional	12%	2,20	2,34	
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,35</b>	<b>2,69</b>	

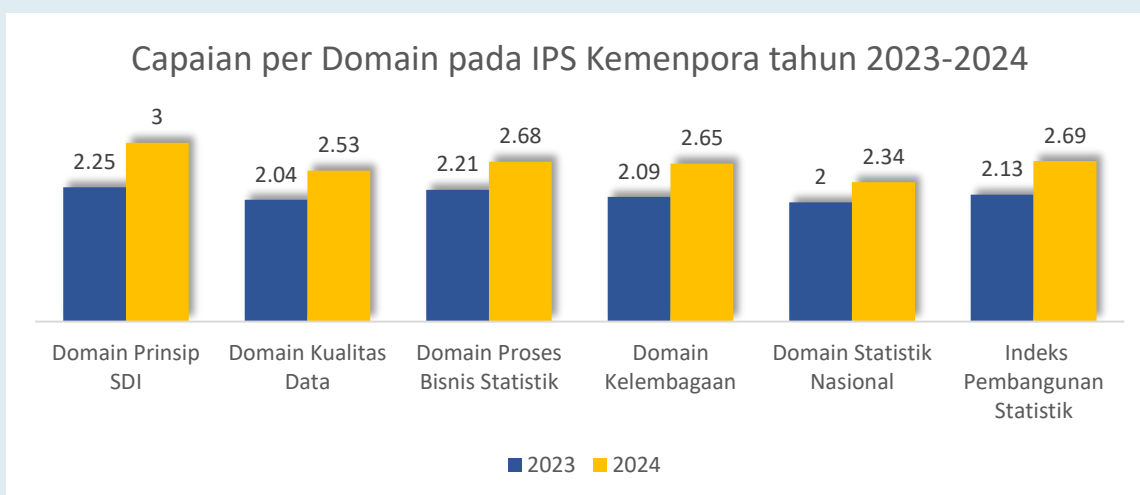
Adapun rincian pada masing-masing aspek domain dijelaskan dalam tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.31 Hasil Penilaian EPPS untuk Indeks Pembangunan Statistik Kemenpora masing-masing aspek domain

DOMAIN / ASPEK	BOBOT	NILAI INDEKS
<b>Domain Prinsip SDI</b>		
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
<b>Domain Kualitas Data</b>		
Relevansi	21%	3,00
Akurasi	16%	2,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,50
Aksesibilitas	21%	3,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,00

DOMAIN / ASPEK	BOBOT	NILAI INDEKS
<b>Domain Proses Bisnis Statistik</b>		
Perencanaan Data	32%	2,33
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	2,50
Penyebarluasan Data	21%	3,00
<b>Domain Kelembagaan</b>		
Profesionalitas	35%	2,00
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	3,00
<b>Domain Statistik Nasional</b>		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	2,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	2,33

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kemenpora Tahun 2024 sebesar 2,69 dengan predikat “baik” lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 2,13 dengan predikat “Cukup”. Hal ini didorong oleh adanya peningkatan pada seluruh domain pada IPS.



Grafik 3.7 Capaian perdomain pada IPS Kemenpora 2023-2025

## B. UPAYA DAN KENDALA

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka Pembinaan statistik sektoral di Kementerian Pemuda dan Olahraga di tahun 2025 meliputi:

1. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas SDM terkait data yaitu :

- a. Penunjukan pic produsen data pada setiap unit kerja eselon 2.
- b. Memberikan pemahaman dan pelatihan terkait data kepada pic produsen data melalui kegiatan sebagai berikut:
  - 1) *Brainstorming* Satu Data Indonesia dan Satu Data Kemenpora.
  - 2) Workshop Rekomendasi Kegiatan Statistik.
  - 3) Workshop *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).
  - 4) Workshop Metadata Statistik.
  - 5) Workshop Standar Data Statistik.
2. Pengusulan rekomendasi statistik.
3. Penerapan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).
4. Penyusunan publikasi statistik.



Gambar 3.30 Foto-foto Rapat terkait Pembahasan Indeks Pembangunan Statistik tahun 2025

Kendala dalam pembinaan statistik sektoral diantaranya:

1. Kemenpora belum memiliki prosedur baku terkait aspek penerapan akurasi data, indikator aktualitas data, serta keterbandingan dan konsistensi data statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data.
2. Belum ada prosedur baku terkait desain statistik pada aspek perencanaan dan analisis data pada aspek pengolahan data yang berlaku untuk seluruh produsen data.

3. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan data, analisis data.
4. Masih terfokus dalam upaya peningkatan kapasitas namun untuk perbaikan kelembagaan masih belum optimal.

### Succes Story

1. Kemenpora memiliki Satu Portal Data Pemuda dan Olahraga yang telah interkoneksi dengan Satu Data Indonesia dan merupakan wujud komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memperkuat tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan. Langkah selanjutnya melalui portal ini, berbagai data pemuda dan olahraga yang sebelumnya tersebar di unit kerja dan aplikasi yang berbeda berhasil dihimpun dalam satu platform terpadu dengan standar data dan metadata yang seragam. One Data Kemenpora berfungsi sebagai sumber data resmi tunggal (*single source of truth*) yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program pemuda dan olahraga secara lebih efektif dan berbasis bukti.
2. Rilis publikasi **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** dan **Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)** Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penguatan kebijakan berbasis data di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Publikasi ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian



Gambar 3.31 Tampilan Portal Satu Data Pemuda dan Olahraga

pembangunan pemuda dan olahraga secara nasional maupun daerah, yang disusun berdasarkan data terstandar, metodologi yang terukur, serta melalui proses pengolahan dan validasi yang akuntabel. IPP dan IPO Tahun 2025 tidak

hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja pembangunan, tetapi juga sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan, potensi, dan prioritas intervensi kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Melalui rilis publikasi IPP dan IPO Tahun 2025, Kemenpora memperkuat komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan data dan informasi strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat luas. Publikasi ini menjadi referensi penting dalam perencanaan program, monitoring, dan evaluasi pembangunan pemuda dan olahraga, serta mendukung sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, rilis IPP dan IPO Tahun 2025 juga mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola data Kemenpora yang sejalan dengan prinsip **Satu Data Indonesia** dan berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

### C. NILAI EFISIENSI

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Statistik yang didukung oleh 2 Komponen pada



Gambar 3.32 Laporan IPP dan IPO 2025

2 Rincian Output yang tergabung dengan komponen indikator lainnya. Berdasarkan capaian kinerja yang dihasilkan yaitu 100% angka efisiensi yang diperoleh yaitu 0,97. Nilai 0,97 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2025 sebesar

Rp. 657.207.000 yang dialokasikan untuk mencapai target Indeks Pembangunan Statistik sebesar 2,69 dinilai efisien.

Tabel 3.32 Alokasi anggaran IPS Tahun 2025

Kode Komponen	Komponen	Anggaran	Realisasi	%
6972.EBA.963.051 dan 6973.EBA.963.051	Pengelolaan Sistem Informasi dan Big Data	657.207.000	638.272.360	97,12

#### D. ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA

Penyelenggaraan EPSS dilaksanakan secara nasional sehingga dapat diperoleh capaian secara nasional yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.33 Data IPS Nasional Tahun 2025

Indeks	Nasional	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>IPS</b>	<b>2,35</b>	<b>2,78</b>	<b>2,81</b>	<b>2,25</b>	<b>2,55</b>	<b>2,25</b>	<b>2,51</b>
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

Di tahun 2024, capaian indeks pembangunan statistik secara nasional sebesar 2,35, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun capaian IPS Kemenpora melebihi capaian nasional dan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun jika dibandingkan dengan Kementerian lainnya, Kemenpora memiliki capaian di bawah rata-rata Kementerian maupun LPNK.

Jika dibandingkan dengan pencapaian secara global, salah satu ukuran yang relevan dengan Indeks Pembangunan Statistik adalah The Open Data Inventory (ODIN). The Open Data Inventory (ODIN) adalah indeks global yang mengukur kelengkapan (coverage) dan keterbukaan (openness) data statistik resmi suatu

negara yang dipublikasikan oleh kantor statistik nasional. ODIN dikembangkan oleh Open Data Watch (ODW) untuk menilai sejauh mana data statistik suatu negara Tersedia untuk berbagai sektor prioritas, Dipublikasikan secara terbuka, mudah diakses, dan dapat digunakan kembali serta Memenuhi prinsip open data dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dua dimensi utama ODIN adalah Coverage (Kelengkapan Data) dan Openness (Keterbukaan Data).

Di tingkat global, Indonesia memperoleh skor ODIN 74 yang terdiri dari skor data coverage sebesar 71 dan data openness sebesar 76 dan menempati posisi ke 37 dari 198 negara, sedangkan di tingkat Asia Tenggara, Indonesia menempati posisi ke-3 dari 11 negara. Sekalipun indikator tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan Indeks Pembangunan Statistik, namun indikator tersebut relevan untuk mengetahui posisi Indonesia terkait dengan Data di tingkat Internasional.



Gambar 3.33 Perolehan Skor ODIN 74

## E. PERBAIKAN KINERJA

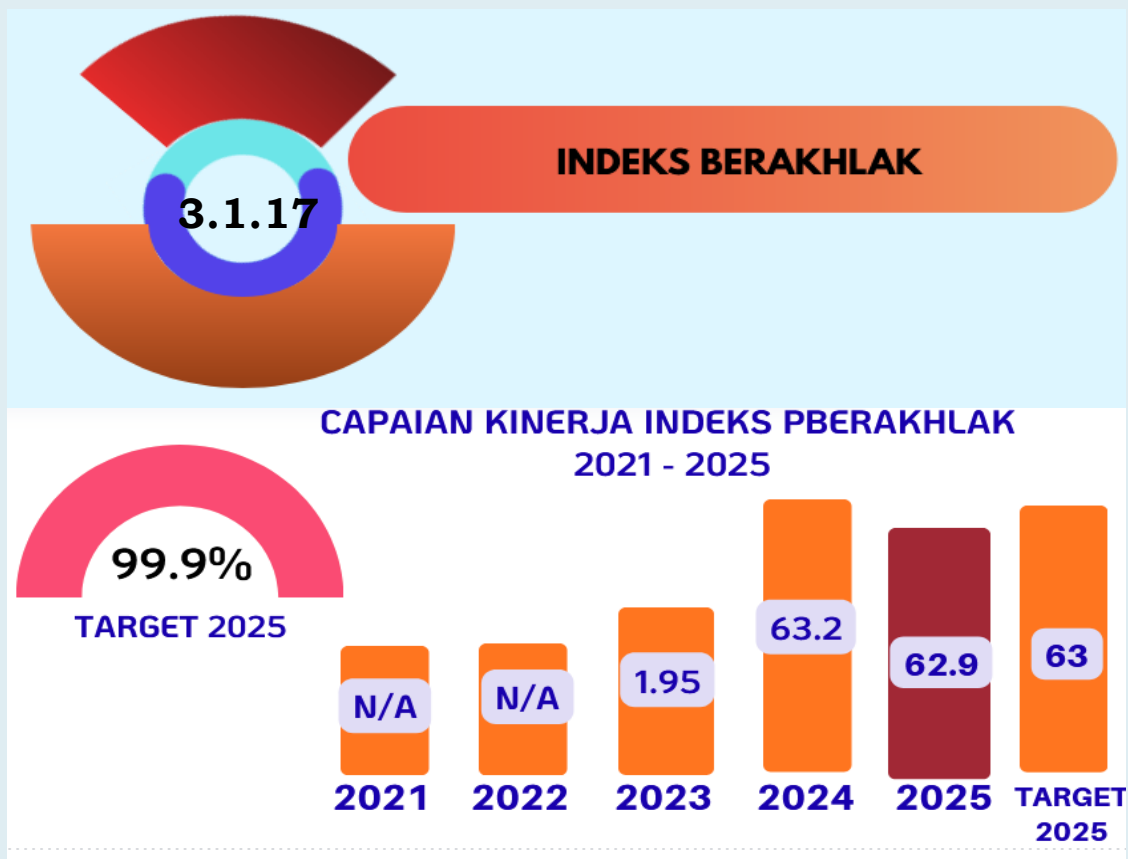
Dalam upaya pencapaian target, faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam peningkatan Indeks Pembangunan Statistik di kemenpora diantaranya adalah

1. Telah ada kebijakan SDI yang mengatur aspek standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk yang berlaku untuk seluruh produsen data, yaitu Permenpora No 14 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. Variabel-variabel yang digunakan dan indikator-indikator yang dihasilkan dari kegiatan statistik di Kemenpora sudah menerapkan Standar Data Statistik Nasional.
3. Diseminasi statistik IPO dan IPP telah dilakukan sesuai dengan jadwal rilis yang direncanakan dan merujuk pada peraturan yang berlaku untuk seluruh produsen data. Jadwal rilis tersebut juga telah diumumkan kepada pengguna data melalui portal Satu Data Kemenpora.
4. Penerapan proses bisnis statistik secara umum telah berada pada predikat Baik.
5. Kolaborasi Kemenpora dengan Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait metadata dan standar data statistik.

Adapun rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan ke depan dalam rangka perbaikan kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. perlu melakukan melakukan reuiu dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil reuiu dan evaluasi tersebut.
2. membuat prosedur baku yang mengatur penerapan akurasi data, aktualitas data, serta keterbandingan dan konsistensi data statistik dan melakukan reuiu dan evaluasi secara berkala pada aspek relevansi dan aksesibilitas data untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.
3. menyusun prosedur baku terkait desain statistik pada aspek perencanaan kegiatan statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data, menyusun prosedur baku terkait analisis data pada aspek pengolahan data yang berlaku untuk seluruh produsen data dan melakukan reuiu dan evaluasi secara berkala pada setiap aspek proses bisnis statistik untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan melakukan tindak lanjut dari hasil reuiu dan evaluasi tersebut

4. perlu melaksanakan rencana pembangunan statistik sesuai dengan perencanaan pembangunan data statistik yang sudah ditetapkan. Perencanaan pembangunan data statistik diharapkan selalu di reviu secara berkala bersama dengan pembina data.
5. perlu tim penjaminan kualitas beserta tugas dan tanggung jawab sesuai tingkat kualitas yang diinginkan untuk tiap-tiap tahapan kegiatan kegiatan.
6. perlu memulai pemanfaatan big data untuk menghasilkan data statistik pendukung dalam penyelenggaraan kegiatan statistik.



Gambar 3.34 Capaian Kinerja Indikator Indeks BerAkhlaK

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun 2024, nilai Indeks BerAKHLAK Kementerian Pemuda dan Olahraga mencapai 63,2, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan

capaian Tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa internalisasi dan implementasi Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan Kemenpora berada pada kategori “cukup sehat”, serta semakin mendekati target Tahun 2025 sebesar 64. Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen organisasi dalam membangun budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, harmonisasi, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi.

Capaian Indeks BerAKHLAK Tahun 2024 didukung oleh berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Salah satunya melalui pelaksanaan Program SIGMA (Sharing dan Inovasi Generasi Muda ASN) yang telah berjalan hingga Volume 4, sebagai wadah penguatan nilai-nilai BerAKHLAK melalui kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran lintas unit kerja. Selain itu, Kemenpora secara aktif melaksanakan sosialisasi Core Values ASN BerAKHLAK kepada pegawai, baik secara tatap muka maupun daring, guna memastikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Upaya penguatan budaya kerja juga dilakukan melalui Sharing Session Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) di lingkungan kerja sebagai bagian dari perhatian organisasi terhadap kesehatan mental ASN, serta pelaksanaan Program Sharing Day yang rutin dilaksanakan setiap hari Rabu pada minggu ke-2 dan ke-4 setiap bulan. Program-program tersebut mendorong terciptanya lingkungan kerja yang suportif, terbuka, dan saling menghargai. Di samping itu, penguatan tata kelola etika dan disiplin ASN dilaksanakan melalui penetapan Nota Dinas Penunjukan PIC Disiplin dan Kode Etik pada masing-masing unit kerja eselon II.

Sebagai bentuk penguatan pembelajaran eksternal, Kemenpora juga melaksanakan benchmarking penerapan Core Values ASN BerAKHLAK ke instansi lain, salah satunya BKKBN, guna mengadopsi praktik baik dalam pengelolaan budaya kerja dan internalisasi nilai organisasi. Seluruh rangkaian upaya tersebut secara sinergis berkontribusi terhadap peningkatan Indeks BerAKHLAK dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ASN Kemenpora yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja.

Ke depan, Kemenpora akan terus memperkuat konsistensi implementasi nilai BerAKHLAK melalui perluasan program internalisasi, peningkatan peran pimpinan sebagai role model, serta penguatan monitoring dan evaluasi budaya kerja, sehingga target Indeks BerAKHLAK Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

## B. UPAYA DAN KENDALA

Upaya yang telah dilakukan :

1. Melakukan Bimtek terkait Disiplin kepada PIC Disiplin dan Kode Etik di setiap unit kerja
2. Mengimplementasikan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK
3. Sosialisasi tentang Pentingnya Mental Health Pegawai dan/atau Pertolongan Pertama Pada Luka Psikologis Pegawai
4. Terus Menjalankan Program Sharing Day dan/atau SIGMA
5. Komitmen Pimpinan dilakukan Ketika bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja
6. Mensosialisasikan dalam penggunaan logo Core Values ASN BerAKHLAK dalam pemanfaatan media dan alat

Kendala :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Media dan Alat dalam mengimplementasikan Core Values ASN BerAKHLAK
2. Belum optimalnya internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Perlunya komitmen pimpinan di masing-masing unit kerja dalam memberikan pemahaman untuk penguatan budaya kerja sehingga memberikan pengetahuan dan motivasi seluruh pegawai untuk dapat memahami tugas, fungsi, peran, berdampak positif dalam penerapan BerAKHLAK.

## C. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Untuk meningkatkan capaian Indeks BerAKHLAK serta memastikan target Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal, beberapa rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. **Optimalisasi media dan sarana internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK**  
Meningkatkan pemanfaatan media komunikasi internal, baik digital maupun non-digital, seperti infografis, video singkat, banner, serta konten media sosial internal, guna memperkuat pemahaman dan implementasi nilai BerAKHLAK secara berkelanjutan di seluruh unit kerja.
2. **Penguatan internalisasi BerAKHLAK yang terintegrasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari**

Mengintegrasikan nilai-nilai BerAKHLAK ke dalam proses bisnis, standar operasional prosedur (SOP), serta aktivitas kerja pegawai, sehingga internalisasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi tercermin dalam perilaku dan kinerja ASN secara nyata.

3. **Peningkatan peran pimpinan sebagai role model budaya kerja**

Mendorong komitmen pimpinan di setiap unit kerja untuk secara aktif menjadi teladan dalam penerapan Core Values ASN BerAKHLAK, melalui pembinaan rutin, komunikasi langsung kepada pegawai, serta konsistensi dalam penegakan disiplin dan etika kerja.

4. **Penguatan kapasitas PIC Disiplin dan Kode Etik**

Melanjutkan dan memperluas kegiatan bimbingan teknis serta forum koordinasi bagi PIC Disiplin dan Kode Etik agar mampu menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pendampingan budaya kerja secara lebih efektif dan berkesinambungan.

5. **Pengembangan program penguatan budaya kerja yang inovatif dan partisipatif**

Mengembangkan Program Sharing Day dan SIGMA agar lebih variatif, kontekstual, dan melibatkan partisipasi aktif pegawai lintas unit kerja, sehingga dapat menjadi ruang berbagi praktik baik, penguatan mental health, serta inovasi dalam penerapan nilai BerAKHLAK.

6. **Penguatan monitoring dan evaluasi penerapan Core Values ASN BerAKHLAK**

Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat pemahaman dan implementasi nilai BerAKHLAK di setiap unit kerja, serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program penguatan budaya kerja.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat semakin optimal dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi serta pencapaian target Indeks BerAKHLAK Tahun 2025.



# LAPORAN KINERJA 2025

## SEKRETARIAT KEMENPORA



# BAB 4

## PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional. Secara umum, kinerja Sekretariat Kemenpora pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Capaian kinerja secara keseluruhan mencapai **103,50%** dengan realisasi anggaran sebesar **91,83%** dan nilai efisiensi **0,97**, yang menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan akuntabel. Dari sisi pengukuran kinerja, sebagian besar indikator telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, dengan mayoritas indikator berada pada kategori **“Sangat Baik”** dan **“Baik”**, serta hanya sebagian kecil yang masih berada pada kategori **“Cukup”** dan memerlukan penguatan ke depan.

Pada aspek prestasi strategis, Kementerian Pemuda dan Olahraga berhasil meraih sejumlah penghargaan nasional, antara lain **Juara I Kategori Utilisasi BMN Terbaik pada Anugerah Reksa Bandha 2025** serta predikat **Keterbukaan Informasi Publik kategori “Informatif”** dengan nilai **99,41**, yang mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan pengelolaan aset negara yang optimal.

Selain itu, transformasi digital pemerintahan terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, tercermin dari capaian **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,75** dengan kategori **“Sangat Baik”**, yang menandakan semakin efektifnya tata kelola pemerintahan digital di lingkungan Kemenpora.

## 4.2 Kendala dan Tantangan

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, pelaksanaan tugas Sekretariat Kemenpora masih dihadapkan pada beberapa kendala dan tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain adanya **penyesuaian dan pemotongan anggaran yang signifikan**, sehingga menuntut penajaman prioritas program dan peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Pada aspek manajemen sumber daya manusia, pemanfaatan **Manajemen Talenta** belum optimal, terutama akibat perbedaan parameter dan sistem aplikasi antara kebijakan internal Kemenpora dengan sistem nasional yang dikelola oleh BKN. Selain itu, internalisasi **Core Values ASN BerAKHLAK** serta pemanfaatan media pendukungnya belum merata di seluruh unit kerja.

Kendala lainnya adalah masih ditemukannya tantangan dalam **integrasi dan sinkronisasi data antar aplikasi kepegawaian internal dengan sistem nasional**, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis informasi.

### 4.3 Rekomendasi Kebijakan dan Upaya Perbaikan

Sebagai upaya peningkatan kinerja dan penyempurnaan tata kelola ke depan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penguatan Implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi**, melalui peningkatan standardisasi penerapan SAKIP di seluruh unit kerja serta penyempurnaan cascading kinerja yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
2. **Akselerasi Digitalisasi dan Tata Kelola SPBE**, dengan menyusun dan menetapkan dokumen teknis pendukung seperti SOP dan Surat Edaran, serta melaksanakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara profesional dan berkala minimal setiap dua tahun.
3. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, melalui percepatan penetapan Standar Pelayanan dan SOP pada seluruh jenis layanan, guna memberikan kepastian waktu, prosedur, dan kualitas layanan kepada masyarakat.
4. **Optimalisasi Pengelolaan Aset dan PNBPN**, dengan menyusun target PNBPN yang lebih realistis berbasis pendapatan rutin serta mempercepat proses hibah aset kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Penguatan Budaya Kerja dan Disiplin ASN**, melalui peningkatan peran pimpinan sebagai role model dalam internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK serta pelaksanaan bimbingan teknis disiplin dan kode etik secara berkelanjutan bagi PIC di setiap unit kerja.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun-tahun mendatang dapat semakin optimal, adaptif terhadap dinamika kebijakan, serta memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.